

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 (AUDITED)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	9
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	9
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	12
3. NERACA	13
4. LAPORAN OPERASIONAL	15
5. LAPORAN ARUS KAS	17
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	19
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	20
7.1 Pendahuluan.....	20
7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD.....	23
7.3. Iktisar Pencapaian Kinerja	37
7.4. Kebijakan Akuntansi.....	43
7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	52
7.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan	130
7.7. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan.....	131
7.8. Penutup.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK.....	23
Tabel 2. Tingkat Kemiskinan.....	24
Tabel 3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah.....	25
Tabel 4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah.....	25
Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah	25
Tabel 6. Gini Ratio Kalimantan Tengah	26
Tabel 7. IPM Kalimantan Tengah.....	27
Tabel 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah.....	28
Tabel 9. Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah	29
Tabel 10. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam jutaan rupiah	29
Tabel 11. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020	39
Tabel 12. Daftar Perangkat Daerah Tahun 2020.....	44
Tabel 13. Persentase Penyisihan Piutang.....	48
Tabel 14. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2020 dan TA 2019	52
Tabel 15. Pendapatan Asli Daerah TA 2020 dan TA 2019.....	53
Tabel 16. Realisasi Pendapatan Asli Daerah per Perangkat Daerah.....	53
Tabel 17. Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah.....	54
Tabel 18. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah	56
Tabel 19. Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	60
Tabel 20. Rekapitulasi Pendapatan Transfer.....	62
Tabel 21. Rekapitulasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63
Tabel 22. Rekapitulasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2020 dan TA 2019	64
Tabel 23. Rekapitulasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67
Tabel 24. Rekapitulasi Pendapatan Hibah	68
Tabel 25. Rekapitulasi Pendapatan Lainnya	68
Tabel 26. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2020.....	70
Tabel 27. Belanja Pegawai per Perangkat Daerah TA 2020	71
Tabel 28. Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah TA 2020	72
Tabel 29. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2020	73
Tabel 30. Realisasi Belanja Hibah TA 2020.....	73
Tabel 31. Rincian Obyek Belanja Bantuan Sosial TA 2020	74
Tabel 32. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020.....	74
Tabel 33. Rincian Obyek Belanja Modal Tanah TA 2020.....	75
Tabel 34. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SOPD TA 2020	75
Tabel 35. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020	76
Tabel 36. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SOPD TA 2020	76
Tabel 37. Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020	77
Tabel 38. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SOPD TA 2020	78
Tabel 39. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020	78
Tabel 40. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SOPD TA 2020.....	78
Tabel 41. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020	79
Tabel 42. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SOPD TA 2020	79
Tabel 43. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2020	80
Tabel 44 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2020.....	82
Tabel 45. SiLPA.....	83
Table 46. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	84

Table 47. Kas di Bendahara BOS	86
Tabel 48. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	87
Tabel 49. Rekapitulasi Piutang Pendapatan.....	88
Tabel 50. Rincian Pajak Alat-alat Berat/Besar perusahaan	88
Tabel 51. Rincian Piutang PBBKB.....	88
Tabel 52. Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	88
Tabel 53. Rincian Piutang Lain – lain PAD yang Sah.....	89
Tabel 54. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.....	89
Tabel 55. Rincian Piutang Pendapatan Lainnya	89
Tabel 56. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.....	90
Tabel 57. Rekapitulasi Penyisihan Piutang.....	91
Tabel 58. Rincian Beban Dibayar di Muka.....	92
Tabel 59. Rekapitulasi Persediaan	92
Tabel 60. Persediaan per Jenis dan per SOPD	92
Tabel 61. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	94
Tabel 62. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019	95
Tabel 63. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020.....	96
Tabel 64. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 per SOPD.....	96
Tabel 65. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	97
Tabel 66. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 per SOPD ..	97
Tabel 67. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	98
Tabel 68. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 per SOPD	99
Tabel 69. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	100
Tabel 70. Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 per SOPD.....	100
Tabel 71. Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	101
Tabel 72. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 per SOPD.....	101
Tabel 73. Mutasi Aset KDP	102
Tabel 74. Aset Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 per SOPD.....	102
Tabel 75. Mutasi Akumulasi Penyusutan	103
Tabel 76. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin.....	103
Tabel 77. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	104
Tabel 78. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi	104
Tabel 79. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	104
Tabel 80. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)	106
Tabel 81. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)	106
Tabel 82. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019	106
Table 83 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)	106
Tabel 84. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	107
Tabel 85. Rincian Aset Lain-lain	107
Tabel 86. Rincian Utang PFK.....	108
Tabel 87. Rincian Utang Beban Pegawai per Perangkat Daerah	110
Tabel 88. Rincian Utang Beban Barang dan Jasa per Perangkat Daerah.....	111
Tabel 89. Utang Beban Transfer	112
Tabel 90. Utang Beban Lain-Lain.....	112
Tabel 91. Utang Jangka Pendek Lainnya.....	113
Tabel 92. Rincian Pendapatan-LO	113
Tabel 93. Obyek PAD-LO	113
Tabel 94. Pendapatan Pajak Daerah - LO	114
Tabel 95. Pendapatan Retribusi Daerah - LO	115
Tabel 96. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	115
Tabel 97. Lain-lain PAD yang Sah	115
Tabel 98. Pendapatan Transfer - LO.....	116
Tabel 99. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	116
Tabel 100. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO.....	116

Tabel 101. Bantuan Keuangan - LO 116

Tabel 102. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO..... 117

Tabel 103. Beban Hibah 119

Tabel 104. Beban Bantuan Sosial 120

Tabel 105. Beban Penyusutan dan Amortisasi..... 120

Tabel 106. Beban Penyisihan Piutang..... 121

Tabel 107. Beban Lain-lain..... 122

Tabel 108. Surplus/Defisit dari Operasi..... 123

Tabel 109. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya..... 123

Tabel 110. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya..... 123

Tabel 111 Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah..... 130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD 37

Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD 38

Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja..... 38

Gambar 4. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 53

Gambar 5. Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 63

Gambar 6. Komposisi Belanja 69

Gambar 7. Komposisi Realisasi Belanja Operasi 70

Gambar 8. Komposisi Belanja Modal..... 75



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Operasional (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
PENDAPATAN – LRA	7.5.2.1	4.816.639.952.634,00	4.767.014.514.749,24	98,97	4.990.195.455.014,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	7.5.2.1.1	1.485.940.751.841,00	1.570.137.570.176,27	105,67	1.776.231.952.739,76
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	7.5.2.1.1.1	1.156.285.867.687,00	1.243.223.219.389,33	107,52	1.438.977.522.676,40
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.2.1.1.2	15.063.134.000,00	14.374.692.453,00	95,43	41.568.852.809,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.5.2.1.1.3	85.840.500.000,00	79.366.317.748,00	92,46	78.920.997.801,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	7.5.2.1.1.4	228.751.250.154,00	233.173.340.585,94	101,93	216.764.579.453,36
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	7.5.2.1.2	3.322.575.490.793,00	3.170.347.450.809,00	95,42	3.191.205.289.485,95
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	7.5.2.1.2.1	3.255.923.105.793,00	3.103.450.065.809,00	95,32	3.173.404.284.485,95
Bagi Hasil Pajak – LRA	7.5.2.1.2.1.1	177.524.624.282,00	143.899.478.029,00	81,06	121.270.799.919,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	7.5.2.1.2.1.2	532.437.188.787,00	441.819.113.594,00	82,98	486.695.632.798,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	7.5.2.1.2.1.3	1.442.656.367.000,00	1.439.305.729.000,00	99,77	1.603.623.745.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	7.5.2.1.2.1.4	1.103.304.925.724,00	1.078.425.745.186,00	97,75	961.814.106.768,95
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	7.5.2.1.2.2	63.222.385.000,00	63.222.385.000,00	100,00	13.636.005.000,00
Dana Penyesuaian – LRA	7.5.2.1.2.2.1	63.222.385.000,00	63.222.385.000,00	100,00	13.636.005.000,00
Bantuan Keuangan – LRA	7.5.2.1.2.3	3.430.000.000,00	3.675.000.000,00	107,14	4.165.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	7.5.2.1.2.3.1	3.185.000.000,00	3.430.000.000,00	107,69	3.675.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	7.5.2.1.2.3.2	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	490.000.000,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.5.2.1.3	8.123.710.000,00	26.529.493.763,97	326,57	22.758.212.789,09
Pendapatan Hibah – LRA	7.5.2.1.3.1	8.123.710.000,00	5.608.344.996,00	69,04	7.911.643.179,13
Pendapatan Lainnya – LRA	7.5.2.1.3.2	0.00	20.921.148.767,97	0,00	14.846.569.609,96
BELANJA	7.5.2.2	4.772.120.280.347,21	4.466.805.961.013,31	93,60	4.312.954.965.435,97
BELANJA OPERASI	7.5.2.2.1	3.400.772.364.031,77	3.172.105.602.013,78	93,28	3.014.997.333.250,40
Belanja Pegawai	7.5.2.2.1.1	1.657.231.739.285,92	1.519.642.134.846,00	91,70	1.441.007.470.001,46
Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.1.2	658.285.638.237,47	604.276.917.767,53	91,80	808.068.776.442,98
Belanja Subsidi	7.5.2.2.1.3	0,00	0,00	0,00	1.122.859.000,00
Belanja Hibah	7.5.2.2.1.4	1.063.602.486.508,38	1.028.723.379.193,25	96,72	746.052.446.211,96
Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.2.1.5	21.652.500.000,00	19.463.170.207,00	89,89	18.745.781.594,00
BELANJA MODAL	7.5.2.2.2	1.155.327.868.741,35	1.108.301.881.143,53	95,93	1.293.574.792.335,57
Belanja Modal Tanah	7.5.2.2.2.1	195.000.000,00	50.638.019,00	25,97	4.149.872.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.2.2.2	252.334.619.113,75	226.420.242.082,00	89,73	193.455.529.421,60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.2.2.3	136.569.775.190,60	131.198.367.274,03	96,07	219.961.247.717,44
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.2.2.4	713.022.785.177,00	711.922.419.210,51	99,85	841.913.017.817,98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.2.2.2.5	53.015.689.260,00	38.522.674.557,99	72,66	33.901.359.578,55
Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.2.2.2.6	190.000.000,00	187.540.000,00	98,71	193.765.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	7.5.2.2.3	216.020.047.574,09	186.398.477.856,00	86,29	4.382.839.850,00
Belanja Tak Terduga		216.020.047.574,09	186.398.477.856,00	86,29	4.382.839.850,00
TRANSFER	7.5.2.3	655.846.652.874,63	564.218.836.044,25	86,03	751.187.658.351,98
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	7.5.2.3.1	620.554.652.874,63	555.738.836.044,25	89,56	714.590.110.368,98
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		620.554.652.874,63	555.738.836.044,25	89,56	714.590.110.368,98
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.5.2.3.2	35.292.000.000,00	8.480.000.000,00	24,03	36.597.547.983,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.2.3.2.1	1.050.000.000,00	900.000.000,00	85,71	25.900.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.2.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1.377.047.983,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	7.5.2.3.2.3	34.242.000.000,00	7.580.000.000,00	22,14	9.320.500.000,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.2.4	(611.326.980.587,84)	(264.010.282.308,32)	43,19	(73.947.168.773,15)
PEMBIAYAAN	7.5.2.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.1	611.326.980.587,84	610.945.412.699,44	99,94	690.274.149.360,98
Penggunaan SiLPA		611.326.980.587,84	610.945.412.699,44	99,94	690.274.149.360,98
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.2	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		611.326.980.587,84	610.945.412.699,44	99,94	685.274.149.360,98
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.2.6	0,00	346.935.130.391,12	0,00	611.326.980.587,83

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.3.1	611.326.980.587,84	698.702.677.095,42
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.3.2	610.945.412.699,44	690.274.149.360,98
Sub Total		381.567.888,40	8.428.527.734,44
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.3.3	346.935.130.391,12	611.326.980.587,84
Sub Total		347.316.698.279,52	619.755.508.322,28
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.3.4	(381.567.888,40)	28.245.320,00
Lain-lain	7.5.3.5	0,00	(8.456.773.054,44)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	7.5.3.6	346.935.130.391,12	611.326.980.587,84

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

3. NERACA



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
ASET	7.5.4		
ASET LANCAR	7.5.4.1		
Kas di Kas Daerah	7.5.4.1.1.1	276.735.299.340,20	538.378.995.565,51
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.4.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.4.1.1.3	0,00	590.256.332,00
Kas di BLUD	7.5.4.1.1.4	60.362.374.642,53	33.930.446.733,32
Kas di Bendahara FKTP	7.5.4.1.1.5	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	7.5.4.1.1.6	3.844.736.884,53	32.863.217.775,75
Kas yang dibatasi penggunaannya	7.5.4.1.1.7	5.188.883.779,86	5.294.437.427,86
Kas Lainnya	7.5.4.1.1.8	804.681.906,00	108.984.109,00
Setara Kas	7.5.4.1.1.9	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	7.5.4.1.1.10	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	7.5.4.1.1.11	50.255.029.479,49	81.077.842.806,00
Piutang Lainnya	7.5.4.1.1.12	466.166.718,00	764.274.818,00
Penyisihan Piutang	7.5.4.1.1.13	(10.573.621.951,49)	(18.666.526.190,79)
Beban Dibayar Dimuka	7.5.4.1.1.14	401.209.837,16	402.231.803,50
Persediaan	7.5.4.1.1.15	524.130.339.990,38	417.502.039.998,17
JUMLAH ASET LANCAR		911.615.100.626,66	1.092.246.201.178,32
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.4.1.2		
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.4.1.2.1		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.4.1.2.1.1	740.853.312.655,11	730.815.719.069,25
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		740.853.312.655,11	730.815.719.069,25
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		740.853.312.655,11	730.815.719.069,25
ASET TETAP	7.5.4.1.3		
Tanah	7.5.4.1.3.1	1.942.707.809.590,03	1.944.646.878.890,03
Peralatan dan Mesin	7.5.4.1.3.2	1.421.474.858.048,81	1.182.638.189.144,70
Gedung dan Bangunan	7.5.4.1.3.3	2.299.087.026.371,56	2.167.446.753.821,88
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.4.1.3.4	7.278.901.471.182,79	6.053.598.799.821,72
Aset Tetap Lainnya	7.5.4.1.3.5	167.691.287.045,72	144.706.303.647,59
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.4.1.3.6	353.261.624.986,76	930.414.053.053,34
Akumulasi Penyusutan	7.5.4.1.3.7	(4.623.320.573.409,49)	(3.911.266.369.697,41)
JUMLAH ASET TETAP		8.839.803.503.816,18	8.512.184.608.681,85
ASET LAINNYA	7.5.4.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	7.5.4.1.4.1	10.135.189,00	4.563.389,00
Tagihan TGR	7.5.4.1.4.2	546.107.524,00	626.107.524,00
Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.4.3	56.613.606.636,28	65.222.410.793,43
- Aset Tak Berwujud (bruto)	7.5.4.1.4.3.1	116.884.630.811,99	113.729.589.811,99
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.4.1.4.3.2	(60.271.024.175,71)	(48.507.179.018,56)
Aset Lain-lain.	7.5.4.1.4.4	484.374.550.329,66	1.296.845.962.541,99
- Aset Lain-Lain Bruto		680.182.256.919,36	2.493.895.783.638,18
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(195.807.706.589,70)	(1.197.049.821.096,19)
JUMLAH ASET LAINNYA		541.544.399.678,94	1.362.699.044.248,42
JUMLAH ASET		11.033.816.316.776,89	11.697.945.573.177,84
KEWAJIBAN	7.5.4.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.4.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.4.2.1.1	846.162,00	160.642.644,40
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.4.2.1.2	67.516.800,00	124.196.800,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
Utang Beban	7.5.4.2.1.3	317.760.447.726,19	284.282.689.154,98
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.4.2.1.4	66.702.314,86	37.289.152,46
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		317.895.513.003,05	284.604.817.751,84
JUMLAH KEWAJIBAN		317.895.513.003,05	284.604.817.751,84
EKUITAS			
EKUITAS		10.715.920.803.773,84	11.413.340.755.426,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.033.816.316.776,89	11.697.945.573.177,84

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020	2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN – LO	7.5.5.1	4.770.346.401.736,74	4.696.909.591.550,09	73.436.810.186,65	1,56
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.5.1.1	1.549.394.203.179,62	1.779.970.546.948,00	(230.576.343.768,38)	(12,95)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.5.1.1.1	1.229.511.608.698,82	1.441.924.917.646,40	(212.413.308.947,58)	(14,73)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.5.1.1.2	14.112.078.836,00	41.764.853.641,00	(27.652.774.805,00)	(66,21)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.5.1.1.3	89.403.911.333,86	96.964.547.490,64	(7.560.636.156,78)	(7,80)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.5.5.1.1.4	216.366.604.310,94	199.316.228.169,96	17.050.376.140,98	8,55
PENDAPATAN TRANSFER - LO	7.5.5.1.2	3.170.102.450.809,00	2.843.639.329.486,00	326.463.121.323,00	11,48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	7.5.5.1.2.1	3.103.450.065.809,00	2.826.573.324.486,00	276.876.741.323,00	9,80
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	7.5.5.1.2.2	63.222.385.000,00	13.636.005.000,00	49.586.380.000,00	363,64
Bantuan Keuangan – LO	7.5.5.1.2.3	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.5.5.1.3	50.849.747.748,12	73.299.715.116,09	(22.449.967.367,97)	(30,63)
Pendapatan Hibah – LO	7.5.5.1.3.1	47.027.861.186,28	58.448.613.270,13	(11.420.752.083,85)	(19,54)
Pendapatan Lainnya – LO	7.5.5.1.3.2	3.821.886.561,84	14.851.101.845,96	(11.029.215.284,12)	(74,27)
BEBAN OPERASIONAL	7.5.5.2	5.361.316.704.898,16	4.653.304.449.908,73	708.012.254.989,43	15,22
Beban Pegawai	7.5.5.2.1	1.529.751.691.276,80	1.434.877.485.076,46	94.874.206.200,34	6,61
Beban Persediaan	7.5.5.2.2	171.366.501.968,37	295.142.971.741,84	(123.776.469.773,47)	(41,94)
Beban Jasa	7.5.5.2.3	326.939.884.354,12	225.972.789.287,40	100.967.095.066,72	44,68
Beban Pemeliharaan	7.5.5.2.4	47.725.411.148,62	71.794.620.976,46	(24.069.209.827,84)	(33,53)
Beban Perjalanan Dinas	7.5.5.2.5	120.542.125.333,97	246.925.760.894,34	(126.383.635.560,37)	(51,18)
Beban Subsidi	7.5.5.2.6	0.00	1.122.859.000,00	(1,122,859,000.00)	(100,00)

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

URAIAN	Ref	2020	2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Hibah	7.5.5.2.7	1.784.583.606.457,89	858.520.873.039,32	926.062.733.418,57	107,87
Beban Bantuan Sosial	7.5.5.2.8	22.918.328.007,00	21.121.667.583,20	1.796.660.423,80	8,51
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.5.2.9	760.387.911.898,84	724.256.922.646,05	36.130.989.252,79	4,99
Beban Penyisihan Piutang	7.5.5.2.10	254.547.897,47	674.417.860,44	(419.869.962,97)	(62,26)
Beban Lain-lain	7.5.5.2.11	1.117.681.784,00	298.865.488,00	818.816.296,00	273,97
Beban Transfer	7.5.5.2.12	595.729.014.771,08	772.595.216.315,22	(176.866.201.544,14)	(22,89)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.5.5.3	(590.970.303.161,42)	43.605.141.641,36	(634.575.444.802,78)	(1.455,28)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	7.5.5.4	6.580.054.955,77	179.999.648,15	6.400.055.307,62	3.555,59
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	7.5.5.5	189.400.000,00	0,00	189.400.000,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	7.5.5.6	4.897.362.600,00	1.486.867.437,68	3.410.495.162,32	229,37
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.5.7	1.493.292.355,77	(1.306.867.789,53)	2.800.160.145,30	(214,26)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	7.5.5.8	(589.477.010.805,65)	42.298.273.851,83	(631.775.284.657,48)	(1.493,62)
POS LUAR BIASA	7.5.5.9				
Pendapatan Luar Biasa - LO	7.5.5.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	7.5.5.9.2	127.051.341.320,00	3.590.750.350,00	123.460.590.970,00	3.438,30
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	7.5.5.10	(127.051.341.320,00)	(3.590.750.350,00)	(123.460.590.970,00)	3.438,30
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.5.11	(716.528.352.125,65)	38.707.523.501,83	(755.235.875.627,48)	(1.951,13)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.6.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah – LRA		1.243.223.219.389,33	1.438.977.522.676,40
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA		14.374.692.453,00	41.568.852.809,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA		79.366.317.748,00	78.920.997.801,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA		232.844.347.185,94	215.878.397.003,36
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		143.899.478.029,00	121.270.799.919,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		441.819.113.594,00	486.695.632.798,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.439.305.729.000,00	1.603.623.745.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		1.078.425.745.186,00	961.814.106.768,95
Penerimaan Dana Penyesuaian		63.222.385.000,00	13.636.005.000,00
Bantuan Keuangan – LRA		3.675.000.000,00	4.165.000.000,00
Pendapatan Hibah – LRA		5.608.344.996,00	7.911.643.179,13
Pendapatan Lainnya - LRA		20.921.148.767,97	14.846.569.609,96
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		4.766.685.521.349,24	4.989.309.272.564,80
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		1.519.642.134.846,00	1.441.007.470.001,46
Belanja Barang dan Jasa		604.276.917.767,53	808.068.776.442,98
Belanja Subsidi		0,00	1.122.859.000,00
Belanja Hibah		1.028.723.379.193,25	746.052.446.211,96
Belanja Bantuan Sosial		19.463.170.207,00	18.745.781.594,00
Belanja Tak Terduga		186.398.477.856,00	4.382.839.850,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		555.738.836.044,25	714.590.110.368,98
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		900.000.000,00	25.900.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	1.377.047.983,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa		7.580.000.000,00	9.320.500.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		3.922.722.915.914,03	3.770.567.831.452,38
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		843.962.605.435,21	1.218.741.441.112,42
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.6.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA		0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin – LRA		0,00	3.240.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LRA		328.993.400,00	882.942.450,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		328.993.400,00	886.182.450,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		50.638.019,00	4.149.872.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		226.420.242.082,00	193.455.529.421,60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		131.198.367.274,03	219.961.247.717,44
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		711.922.419.210,51	841.913.017.817,98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		38.522.674.557,99	33.901.359.578,55
Belanja Modal Aset Lainnya		187.540.000,00	193.765.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	5.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		1.108.301.881.143,53	1.298.574.792.335,57

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.107.972.887.743,53)	(1.297.688.609.885,57)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.6.3		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		216.684.983.500,00	267.356.780.178,71
Kas BLUD yang masuk ke Kasda		105.553.648,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		216.790.537.148,00	267.356.780.178,71
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		216.793.121.447,00	267.247.796.069,31
Koreksi SILPA		111.941.135,00	8.428.527.734,44
Jumlah Arus Kas Keluar		216.905.062.582,00	275.676.323.803,75
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(114.525.434,00)	(8.319.543.625,04)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	7.5.6.4	(264.124.807.742,32)	(87.266.712.398,19)
Saldo Awal Kas	7.5.6.5	605.871.900.515,58	684.787.393.507,72
Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya		5.188.883.779,86	0,00
Koreksi Saldo Awal Bareskrim		0,00	15.972.083.587,70
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	(7.620.864.181,65)
Saldo Akhir Kas	7.5.6.6	346.935.976.553,12	605.871.900.515,58
Saldo Akhir Kas Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		276.735.299.340,20	538.378.995.565,51
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	590.256.332,00
Kas di BLUD		60.362.374.642,53	33.930.446.733,32
Kas Di Bendahara FKTP		0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS		3.844.736.884,53	32.863.217.775,75
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		5.188.883.779,86	0,00
Kas Lainnya		804.681.906,00	108.984.109,00
Saldo Akhir Kas	7.5.6.7	346.935.976.553,12	605.871.900.515,58

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020 (Rp)	2019 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.5.7.1	11.413.340.755.425,99	10.889.810.823.960,17
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.7.2	(716.528.352.125,65)	38.707.523.501,83
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.7.3	19.108.400.473,50	484.822.407.963,99
Koreksi Ekuitas Lainnya		19.108.400.473,50	484.822.407.963,99
EKUITAS AKHIR	5.7.4	10.715.920.803.773,84	11.413.340.755.425,99

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);

- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;
- gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- hh. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- ii. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- jj. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- kk. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- ll. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- mm. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.

nn. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
7.a	Pendahuluan
7.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.b	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.b.1)	Ekonomi Makro
7.b.2)	Kebijakan Keuangan
7.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
7.d	Kebijakan Akuntansi
7.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
7.d.5)	Investasi Permanen
7.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
7.e.1)	Penjelasan Umum
7.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.e.3)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
7.e.4)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.e.6)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
7.e.7)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.e.8)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
7.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
7.g	Penutup

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,82%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,58%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,329%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,05%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -1,41%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,03%

- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp152.190.908,20;

7.2.1.1. **Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	4,83	4,82	-16%
	Kotawaringin Barat	4,11	3,59	-52%
	Kotawaringin Timur	5,90	5,62	-28%
	Kapuas	5,09	5,04	-5%
	Barito Selatan	4,39	4,45	6%
	Barito Utara	4,95	5,17	22%
	Sukamara	3,16	3,23	7%
	Lamandau	3,01	3,09	8%
	Seruyan	7,19	6,85	-34%
	Katingan	5,02	4,79	-23%
	Pulang Pisau	4,24	4,09	-15%
	Gunung Mas	4,91	4,75	-16%
	Barito Timur	6,32	6,09	-23%
	Murung Raya	6,00	5,85	-15%
	Palangka Raya	3,35	3,44	9%
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	134.590	132,94	-165%
	Kotawaringin Barat	12.760	11,46	-130%
	Kotawaringin Timur	27.380	26,64	-74%
	Kapuas	18.230	18,17	-6%
	Barito Selatan	5.990	6,12	13%
	Barito Utara	6.460	6,78	32%
	Sukamara	2.010	2,13	12%
	Lamandau	2.470	2,61	14%
	Seruyan	14.660	14,53	-13%
	Katingan	8.510	8,23	-28%
	Pulang Pisau	5.390	5,21	-18%
	Gunung Mas	5.860	5,78	-8%
	Barito Timur	7.970	7,88	-9%
	Murung Raya	7.210	7,18	-3%
	Palangka Raya	9.690	10,23	54%
3	Provinsi (%)	4,81	4,82	1%
4	Nasional (%)	9,22	5,26	-396%
5	Peringkat Provinsi	4	4	0%
6	Peringkat Nasional	5	5	0%

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya sebagaimana tergambar pada tabel Tabel 2. Tingkat Kemiskinan.

Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 sebesar 4,81% mengalami penurunan/dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin berhasil/kurang berhasil ditekan hingga menjadi 4,82% dan diharapkan pada tahun 2021 terus meningkat hingga angka 4%. Persentase penduduk miskin Kalimantan Tengah berada di peringkat empat terendah dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan sebagaimana Tabel 33 berikut

Tabel 3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	0,55	0,4	-15%
	Kotawaringin Timur	0,92	0,87	-5%
	Kapuas	0,56	0,78	22%
	Barito Selatan	0,39	0,89	50%
	Barito Utara	0,76	0,67	-9%
	Sukamara	0,51	0,3	-21%
	Lamandau	0,22	0,36	14%
	Seruyan	1,26	0,87	-39%
	Katingan	0,94	0,51	-43%
	Pulang Pisau	0,54	0,73	19%
	Gunung Mas	0,99	0,75	-24%
	Barito Timur	0,72	0,55	-17%
	Murung Raya	0,69	0,87	18%
	Kota Palangka Raya	0,43	0,44	1%
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,7	0,8	10%
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	6%
4	Peringkat Provinsi	1	1	0%
5	Peringkat Nasional	5	5	0%

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2020

Tabel 4. Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	0,13	0,08	-5%
	Kotawaringin Timur	0,24	0,16	-8%
	Kapuas	0,10	0,19	9%
	Barito Selatan	0,05	0,26	21%
	Barito Utara	0,17	0,13	-4%
	Sukamara	0,10	0,05	-5%
	Lamandau	0,03	0,09	6%
	Seruyan	0,31	0,16	-15%
	Katingan	0,30	0,09	-21%
	Pulang Pisau	0,11	0,20	9%
	Gunung Mas	0,26	0,21	-5%
	Barito Timur	0,12	0,08	-4%
	Murung Raya	0,14	0,24	10%
	Kota Palangka Raya	0,09	0,08	-1%
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,14	0,20	6%
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	1%
4	Peringkat Provinsi	1	1	0%
5	Peringkat Nasional	5	5	0%

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2020

7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah sebesar 4,58%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)			
	Kotawaringin Barat	2,62	4,76	214%
	Kotawaringin Timur	4,47	5,25	78%
	Kapuas	5,37	4,98	-39%
	Barito Selatan	4,18	4,21	3%
	Barito Utara	3,92	5,29	137%
	Sukamara	4,90	4,7	-20%
	Lamandau	2,34	2,83	49%
	Seruyan	4,49	4,3	-19%
	Katingan	5,45	5,69	24%

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
	Pulang Pisau	1,74	2,63	89%
	Gunung Mas	2,64	2,49	-15%
	Barito Timur	2,89	2,91	2%
	Murung Raya	3,07	3,10	3%
	Palangka Raya	5,78	5,95	17%
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,10	4,58	48%
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,01	7,07	206%
4	Peringkat Provinsi	1	1	0%
5	Peringkat Nasional	8	8	0%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,58%, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 4,10% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019. Namun demikian TPT Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,01% pada tahun 2019 dan sebesar 7,07% pada tahun 2020.

7.2.1.3. **Indek Gini (Gini Ratio)**

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah sebesar 0,329 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 6. Gini Ratio Kalimantan Tengah				
No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	-	-	0,00%
	Kotawaringin Timur	-	-	0,00%
	Kapuas	-	-	0,00%
	Barito Selatan	-	-	0,00%
	Barito Utara	-	-	0,00%
	Sukamara	-	-	0,00%
	Lamandau	-	-	0,00%
	Seruyan	-	-	0,00%
	Katingan	-	-	0,00%
	Pulang Pisau	-	-	0,00%
	Gunung Mas	-	-	0,00%
	Barito Timur	-	-	0,00%
	Murung Raya	-	-	0,00%
	Palangka Raya	-	-	0,00%
2	Tingkat Provinsi	0,336	0,329	-0,70%
3	Tingkat Nasional	0,382	0,381	-0,10%
3	Peringkat Provinsi	5	5	0,00%
4	Peringkat Nasional	16	16	0,00%

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,329. Angka ini turun 0,70 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,336 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang (60≤IPM<70)
- c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah sebesar 71,05 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. IPM Kalimantan Tengah

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota			
	Kotawaringin Barat	72,85	72,87	2%
	Kotawaringin Timur	71,16	71,31	15%
	Kapuas	69,38	69,48	10%
	Barito Selatan	70,10	70,22	12%
	Barito Utara	70,52	70,59	7%
	Sukamara	67,95	68,03	8%
	Lamandau	70,51	70,51	0%
	Seruyan	67,57	67,58	1%
	Katingan	68,55	68,68	13%
	Pulang Pisau	68,34	68,45	11%
	Gunung Mas	70,65	70,81	16%
	Barito Timur	71,34	71,39	5%
	Murung Raya	67,89	67,98	9%
	Palangka Raya	80,77	80,77	0%
2	Provinsi	70,91	71,05	14%
3	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	2%
4	Peringkat Provinsi	3	4	1%
5	Peringkat Nasional	21	15	6%

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 71,05 poin, dibandingkan Tahun 2019 sebesar 70,91 poin mengalami kenaikan sebesar 14 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita . Umur harapan hidup saat lahir mencapai 69,74 tahun pada Tahun 2020, lebih lama/cepat 0,05 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,59 tahun dengan harapan lama sekolah 12,66 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar 11,15 juta rupiah per tahun atau menurun sebesar 82 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada pada urutan 4 dari 5 Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan berada pada urutan 15 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan

ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010) (Jutaan Rp)					
	Kotawaringin Barat	12.173.280,82	12.877.922,93	13.004.133,55	-	-
	Kotawaringin Timur	17.234.264,51	18.463.503,73	17.892.282,31	-	-
	Kapuas	10.182.438,54	10.911.917,61	10.798.257,58	-	-
	Barito Selatan	4.160.875,11	4.367.077,69	4.240.166,86	-	-
	Barito Utara	6.748.596,68	7.114.706,19	6.955.410,03	-	-
	Sukamara	2.686.337,80	2.848.957,20	2.905.498,92	-	-
	Lamandau	3.505.611,04	3.746.506,75	3.815.647,04	-	-
	Seruyan	5.750.252,31	6.042.859,74	5.908.284,83	-	-
	Katingan	4.829.628,19	5.110.045,88	4.943.731,58	-	-
	Pulang Pisau	3.190.169,67	3.393.285,88	3.484.581,28	-	-
	Gunung Mas	3.266.084,54	3.501.688,36	3.619.286,71	-	-
	Barito Timur	5.052.797,98	5.327.941,22	5.182.503,51	-	-
	Murung Raya	5.538.869,35	5.868.150,19	5.722.378,50	-	-
	Palangka Raya	10.156.319,93	10.884.597,34	10.594.467,68	-	-
	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	98.956,72	-
	Indonesia	-	-	-	-	10.722.442,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	Kotawaringin Barat	6,46	6,8	0,98		
	Kotawaringin Timur	6,93	7,94	-3,09		
	Kapuas	7,01	7,62	-1,04		
	Barito Selatan	5,12	5,44	-2,91		
	Barito Utara	5,95	6,01	-2,24		
	Sukamara	6,17	6,27	1,98		
	Lamandau	6,86	6,7	1,85		
	Seruyan	5,21	5,18	-2,23		
	Katingan	6,59	6,56	-3,25		
	Pulang Pisau	5,94	5,83	2,69		
	Gunung Mas	6,87	6,63	3,36		
	Barito Timur	5,71	5,98	-2,73		
	Murung Raya	5,61	5,87	-2,48		
	Palangka Raya	7,12	7,17	-2,67		
	Provinsi Kalimantan Tengah				-3,12	
	Indonesia					-2,07
3	Peringkat Provinsi	-	-	-	2	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	18

Selama kurun waktu Tahun 2018 - Tahun 2020 perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan 1,41%. Pada periode Tahun 2018 - Tahun 2019 pertumbuhan perkonomian Provinsi Kalimantan Tengah 6,21% dan pada kurun waktu Tahun 2018 - Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah sebesar -3,12%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan menempati urutan 2 dari laju pertumbuhan provinsi lain dalam wilayah pulau Kalimantan sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah menempati urutan 18 dari laju pertumbuhan 34 provinsi di Indonesia.

7.2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi :

- a. Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (*Gallopig Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebesar 2,45% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,45	1,03	-142,00%
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,72	0,45	-227,00%

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,03%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 2,45% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2019. Dengan demikian inflasi Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 0,45% pada Tahun 2020.

7.2.1.7. Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Sektor PDRB Seri 2010			
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.629,15	30.182.532,8	33.179.707,3
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	23.018,14	25.153.032,7	28.081.432,2
	a. Tanaman Pangan	2.438,39	2.689.762,2	2.674.788,1
	b. Tanaman Hortikultura	662,58	797.351,2	694.445,7
	c. Tanaman Perkebunan	16.823,40	18.098.808,8	21.247.584,7
	d. Peternakan	2.289,38	2.638.396,1	2.558.314,2
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	804,39	928.714,5	906.299,5
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.342,90	1.420.153,6	1.484.341,5
	3. Perikanan	3.268,11	3.609.346,5	3.613.933,7
	B. Pertambangan dan Penggalian	16.480,27	16.408.011,1	12.715.217,8
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	796,86	864.808,6	561.839,8
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	11.681,34	11.016.182,3	7.047.548,8
	3. Pertambangan Bijih Logam	2.758,82	3.200.485,0	3.770.107,4
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.243,26	1.326.535,2	1.335.721,9
	C. Industri Pengolahan	21.777,54	22.476.766,4	24.287.778,6
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	17.776,15	18.282.802,7	20.191.636,9
	3. Pengolahan Tembakau	-	-	-
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	23,12	25.403,3	21.887,9

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	849,13	824.852,5	872.158,8
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	96,97	111.767,8	110.220,4
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1.459,69	1.645.794,5	1.705.932,5
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	744,70	710.979,7	602.664,4
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	257,86	261.498,2	233.930,2
	11. Industri Logam Dasar	-	-	-
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	49,50	51.682,5	48.805,3
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	17,86	18.077,9	15.817,5
	14. Industri Alat Angkutan	126,83	139.848,3	129.534,3
	15. Industri Furnitur	334,31	356.867,5	312.876,8
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	41,41	47.191,4	42.313,7
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	112,34	126.859,8	152.979,8
	1. Ketenagalistrikan	107,73	121.819,6	147.980,0
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	4,61	5.040,3	4.999,8
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	129,24	142.027,8	152.088,4
	F. Konstruksi	13.507,57	15.016.218,5	13.419.296,6
	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.866,48	19.872.047,8	20.071.289,6
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	687,90	749.322,9	659.849,8
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	17.178,58	19.122.724,9	19.411.439,8
	H. Transportasi dan Pergudangan	9.936,83	11.364.272,1	11.017.551,1
	1. Angkutan Rel	-	-	-
	2. Angkutan Darat	3.984,52	4.614.804,0	4.652.531,2
	3. Angkutan Laut	2.435,48	2.772.053,4	2.848.036,7
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	2.249,20	2.525.326,1	2.490.069,1
	5. Angkutan Udara	547,68	635.164,6	220.607,3
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	719,95	816.924,0	806.306,7
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.608,04	2.904.051,0	2.826.380,4
	1. Penyediaan Akomodasi	320,83	373.283,3	276.806,6
	2. Penyediaan Makan Minum	2.287,21	2.530.767,7	2.549.573,8
	J. Informasi dan Komunikasi	1.376,22	1.514.723,7	1.653.617,1
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.409,83	4.793.553,2	5.271.629,9
	1. Jasa Perantara Keuangan	2.476,59	2.654.659,4	3.014.867,3
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	1.178,50	1.295.722,4	1.389.478,8
	3. Jasa Keuangan Lainnya	746,93	834.076,9	857.791,2
	4. Jasa Penunjang Keuangan	7,82	9.094,5	9.492,6
	L. Real Estate	3.117,26	3.351.403,3	3.417.783,9
	M,N. Jasa Perusahaan	55,25	61.002,3	53.763,5
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.898,99	9.792.527,7	11.153.877,9
	P. Jasa Pendidikan	6.570,73	7.289.805,4	7.858.262,7
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.761,41	3.057.920,9	3.433.738,8
	R,S,T,U. Jasa lainnya	1.481,24	1.647.087,0	1.525.944,9
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	138.718,39	150.000.810,6	152.190.908,3
3	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	137.921,53	149.136.002,0	151.629.068,5
4	PDRB Provinsi	138.718,39	150.283,20	152.190.908,2
5	PDRB Nasional	14.983.364.028,03	16.079.256.744,16	15.786.678.474,95
6	Peringkat Provinsi	4	4	4
7	Peringkat Nasional	21	21	21

7.2.2. Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Target penerimaan dari PAD ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
 - b) Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah menghindari menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - c) Dalam penganggaran rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan secara rasional sebanding dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah akan mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
 - d) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD yang cukup potensial dan perlu mendapat perhatian khusus;
 - e) Penataan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pelayanan Publik yang baik pada Kantor Bersama SAMSAT;
 - f) Peningkatan pelayanan melalui pelayanan Mobil SAMSAT Keliling;
 - g) Penataan dan Pengembangan Sistem Aplikasi SAMSAT;
 - h) Pemberlakuan pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda 4; dan
 - i) Pengenaan PKB untuk kendaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah termasuk TNI/POLRI.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function* bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD TA 2020, secara pasti ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Namun demikian untuk panduan sementara perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Mengingat proses penyusunan RAPBD sudah dimulai sejak bulan April 2019 sedangkan penetapan pagu definitif dana perimbangan TA 2020 oleh pemerintah pusat direncanakan sekitar bulan Oktober 2019, maka pencantuman pagu dana perimbangan dalam penyusunan RAPBD TA 2020 ditetapkan melalui proyeksi anggaran atas dasar alokasi definitif dana perimbangan TA 2019 yang diharapkan naik sebesar 2,82% terutama dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.

- b) Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sama dengan tahun 2019 yang dialokasikan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan PNSD dalam APBD TA 2020, termasuk untuk kenaikan gaji pokok PNSD dan gaji bulan ke-13.
- c) Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di proyeksikan sama dengan tahun 2019 yang diperuntukkan untuk kegiatan kesehatan, reboisasi hutan dan lahan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
- d) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang pada TA 2020 akan menggunakan pagu TA 2019.

b. Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam menghadapi dinamika permasalahan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten/Kota tahun 2020. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar peraturan daerah tentang APBD TA 2020 tepat waktu paling lambat 31 Desember 2020.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu penyusunan APBD TA 2020 mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak langsung.

1) Belanja Tidak Langsung

- a) Belanja Pegawai
 - (1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
 - (2) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU TA 2019 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;
 - (3) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2020;
 - (4) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektiflainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan
 - (5) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah akan menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah TA 2020.

- b) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- c) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.
- d) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - (1) Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (2) Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah*" termasuk didalamnya adalah "*Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah*".
- e) Belanja Subsidi
Pemberian Subsidi hanya diperlukan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
- f) Belanja Hibah
 - (1) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
 - (2) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - (3) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta

kewajiban penerima hibah mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana diterapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

g) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
- (2) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

h) Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada TA 2020, sedangkan pelampauan target TA 2020 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD TA 2020.

i) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Bantuan keuangan yang diterima dari provinsi digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan;
- (2) Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh provinsi untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

j) Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2019 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

2) Belanja Langsung

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2020 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output

yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.

- b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.
- c) Belanja Pegawai
 - (1) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - (2) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
- d) Belanja Barang dan Jasa
 - (1) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2020 dapat menampung obyek belanja dimaksud;
 - (2) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2019. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
 - (3) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2020;
 - (4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
 - (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
 - (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;

- (7) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;
- (8) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
- (9) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
- (10) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

e) Belanja Modal

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

c. **Pembiayaan**

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penetapan nilai penerimaan pembiayaan disesuaikan dengan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (Tahun 2019).

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penetapan nilai pengeluaran pembiayaan yang paling memungkinkan adalah penyertaan modal (investasi) daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah dengan melihat peluang benefit usaha yang dikembangkan oleh perusahaan daerah selama ini.

7.2.3. **Pencapaian Target Kinerja APBD**

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp4.772.120.280.347,21 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp3.400.772.364.031,77, Belanja Modal sebesar Rp1.155.327.868.741,35 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp216.020.047.574,09.

Anggaran Transfer Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp655.846.652.874,63 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp620.554.652.874,63 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp35.292.000.000,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.466.805.961.013,31 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.172.105.602.013,78, realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.108.301.881.143,53, dan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp186.398.477.856,00.

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp564.218.836.044,25 yang terdiri dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp555.738.836.044,25 dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp8.480.000.000,00.

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp4.816.639.952.634,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

Rp1.485.940.751.841,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.322.575.490.793,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp8.123.710.000,00.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.767.014.514.749,24 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.570.137.570.176,27, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.170.347.450.809,00 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp26.529.493.763,97.

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

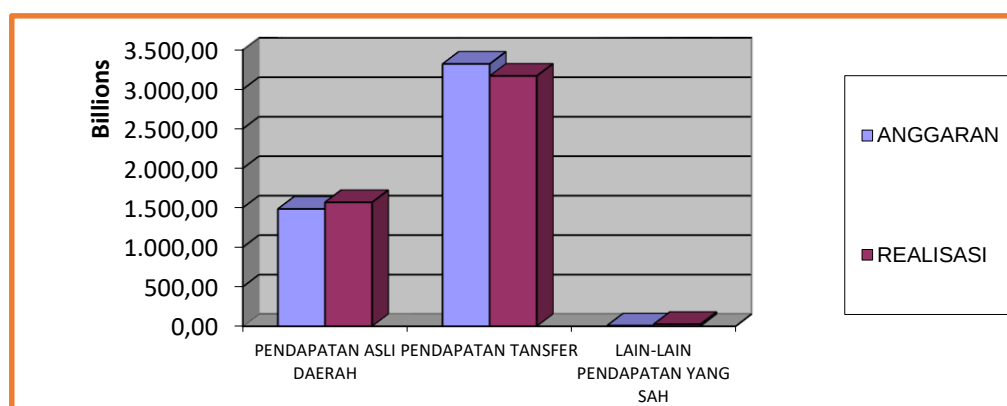
a. Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 telah mencapai hasil yang maksimal. Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp4.816.639.952.634,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp4.767.014.514.749,24 atau 98,97%.

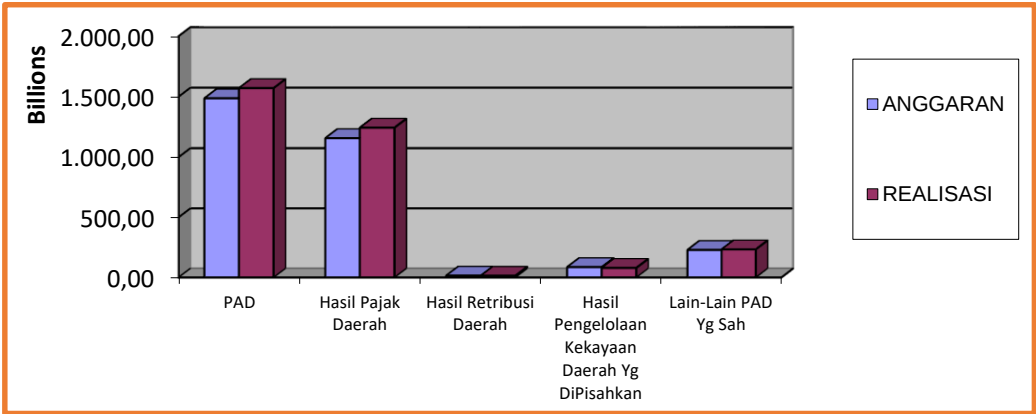
Pencapaian Pendapatan Daerah diantaranya berasal dari:

- Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.485.940.751.841,00, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp1.570.137.570.176,27 (105,67%) atau melebihi capaian target sebesar Rp84.196.818.335,27 (5,66%);
- Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp3.322.575.490.793,00, realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp3.170.347.450.809,00 (95,42%) atau tidak diserap sebesar Rp152.228.039.984,00 (4,58%); dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp8.123.710.000,00, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp26.529.493.763,97 (326,57%) atau melebihi capaian target sebesar Rp18.405.783.763,97 (226,57%).

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD



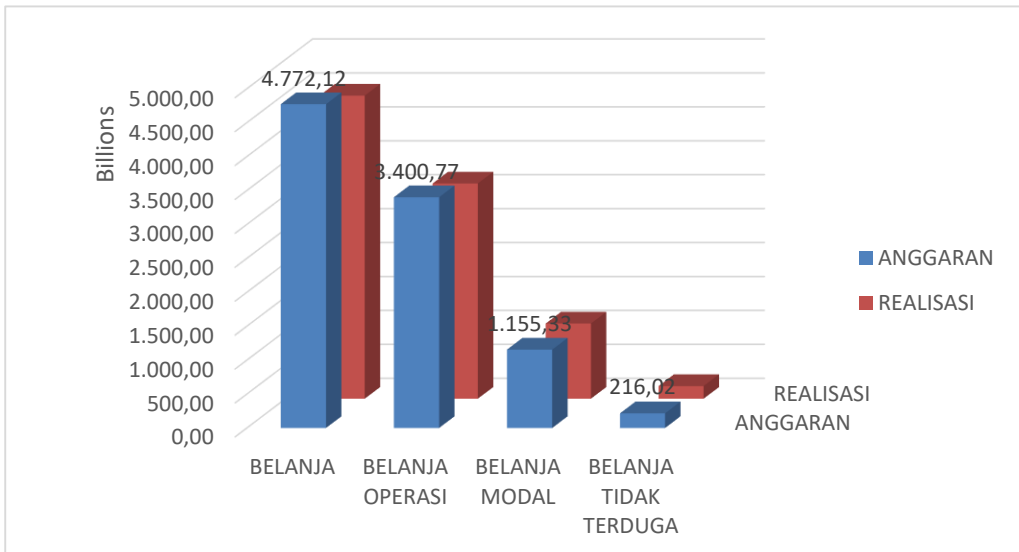
Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD



b. Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp4.772.120.280.347,21. Capaian realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggran 2020 sebesar Rp4.466.805.961.013,31 atau 93,60%. Belanja Daerah bersumber dari: a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp3.400.772.364.031,77, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp3.172.105.602.013,78 (93,28%) atau tidak diserap sebesar Rp228.666.762.017,99 (6,72%); b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.155.327.868.741,35, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp1.108.301.881.143,53 (95,93%) atau tidak diserap sebesar Rp47.025.987.597,82 (4,07%); dan c) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp216.020.047.574,09 realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp186.398.477.856,00 (86,29%) atau tidak diserap sebesar Rp29.621.569.718,09 (13,71%).

Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



c. Transfer

Transfer Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp655.846.652.874,63 Capaian kinerja Realisasi Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp564.218.836.044,25 (86,03%) atau tidak diserap sebesar Rp91.627.816.830,38 (13,97%). Transfer Tahun Anggaran 2020 bersumber dari:

a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp620.554.652.874,63, realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp555.738.836.044,25 (89,56%) atau tidak terserap sebesar Rp64.815.816.830,38 (10,44%); dan b) Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp35.292.000.000,00, realisasi Transfer Bantuan Keuangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.480.000.000,00 (24,03%) atau tidak terserap sebesar Rp26.812.000.000,00 (75,97%).

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.767.014.514.749,24, Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.466.805.961.013,31 dan Realisasi Tranfer sebesar Rp564.218.836.044,25 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami defisit sebesar Rp264.010.282.308,32 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

d. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 yang tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp611.326.980.587,84, dengan demikian total realisasi Pembiayaan sisi Penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp610.945.412.699,44 atau 99,94%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran tidak dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2020. Sehingga Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp610.945.412.699,44 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp611.326.980.587,84.

Dari data realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan maka posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp346.935.130.391,12.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 11. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	4.816.639.952.634,00	4.767.014.514.749,24	98,97	4.990.195.455.014,80
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.485.940.751.841,00	1.570.137.570.176,27	105,67	1.776.231.952.739,76
4.2	Pendapatan Transfer	3.322.575.490.793,00	3.170.347.450.809,00	95,42	3.191.205.289.485,97
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.123.710.000,00	26.529.493.763,97	326,57	22.758.212.789,09
5	Belanja	4.772.120.280.347,21	4.466.805.961.013,31	93,60	4.312.954.965.435,96
5.1	Belanja Operasi	3.400.772.364.031,77	3.172.105.602.013,78	93,28	3.014.997.333.250,40
5.2	Belanja Modal	1.155.327.868.741,35	1.108.301.881.143,53	95,93	1.293.574.792.335,57
5.3	Belanja Tak Terduga	216.020.047.574,09	186.398.477.856,00	86,29	4.382.839.850,00
6	Transfer	655.846.652.874,63	564.218.836.044,25	86,03	751.187.658.351,98
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	620.554.652.874,63	555.738.836.044,25	89,56	714.590.110.368,98
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	35.292.000.000,00	8.480.000.000,00	24,03	36.597.547.983,00
	Surplus / (Defisit)	(611.326.980.587,84)	(264.010.282.308,32)	43,19	(73.947.168.773,15)
7	Pembiayaan				
7.1	Penerimaan Pembiayaan	611.326.980.587,84	610.945.412.699,44	99,94	690.274.149.360,98
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	611.326.980.587,84	610.945.412.699,44	99,94	685.274.149.360,98

	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	346.935.130.391,12	0,00	611.326.980.587,84
--	--	------	--------------------	------	--------------------

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
Kebijakan Umum bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam Tahun 2020 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kendala dan permasalahan tersebut telah diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam anggaran dan belanja daerah (APBD). Beberapa faktor permasalahan pendapatan daerah diantaranya:

1. Belum maksimalnya sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, dimana penerimaan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah secara umum masih relatif di bawah target minimal 95% disebabkan belum optimalnya pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha oleh Perangkat Daerah disebabkan adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
2. Kesadaran wajib pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan.
3. Luas wilayah kerja menyebabkan penyusunan *database* objek dan subjek pajak sebagai dasar untuk menetapkan potensi riil belum optimal.
4. Mobilitas untuk menjangkau pelosok belum memadai. Intensitas dan kualitas koordinasi horizontal maupun vertikal serta kerjasama pemungutan belum maksimal.
5. Tertib administrasi pungutan dan kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan.
6. Kerjasama pemungutan masih belum maksimal.
7. Kegiatan operasional terpadu masih belum maksimal.
8. Belum maksimalnya pembenahan, pemberdayaan serta revitalisasi perusahaan daerah/BUMD.

b. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Beberapa hal yang masih menjadi masalah utama dalam anggaran belanja daerah, diantaranya:

1. Kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan belum maksimal diakibatkan oleh realokasi anggaran Pemerintah untuk penanganan COVID-19.
2. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar belum memadai.
3. Kemampuan identifikasi indikator pendanaan program kegiatan yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan belum memadai.
4. *Focusing* anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan kinerja belum optimal.

c. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan

1. Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan
 - a) Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator Opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

- b) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84;
 - c) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 75;
 - d) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai BB dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai BB.
2. Fungsi Hukum dan Keamanan
- a) Adanya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat;
 - b) Tidak konsistennya aparatur dalam implementasi penegakan peraturan daerah;
 - c) Rendahnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran di masyarakat;
 - d) Heterogenitas dan mobilitas masyarakat menyebabkan tingginya kerawanan keamanan dan ketertiban; dan
 - e) Menurunnya etika politik, budaya demokrasi, dan meningkatnya jiwa kedaerahan pada sisi lain menimbulkan degradasi nasionalisme masyarakat.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia

1. Fungsi Pendidikan
- a) Masih adanya sebagian warga masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan prestasi, kreativitas siswa, prasarana dan sarana pendidikan serta kualitas pengelola sekolah;
 - b) Terdapatnya guru yang belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta belum semua sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum;
 - c) Penuntasan wajar Dikdas (sembilan tahun) yang belum optimal;
 - d) Sarana peningkatan kualitas pembelajaran menggunakan sistem daring masih kurang maksimal; dan
 - e) Masih ditemukannya sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan.
2. Fungsi Kesehatan
- a) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya dan pelayanan kesehatan;
 - b) Masih adanya angka kesakitan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
 - c) Terbatasnya tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional;
 - d) Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan dan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; dan
 - e) Ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
3. Fungsi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- a) Belum optimalnya penerapan UMR bagi buruh di perusahaan swasta;
 - b) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c) Validasi data kependudukan belum maksimal;
 - d) Tingginya angkatan kerja yang belum tersalurkan; dan
 - e) Belum tersedianya balai latihan kerja yang representatif.
4. Fungsi Sosial Kemasyarakatan
- a) Menurunnya pemahaman program Keluarga Berencana yang berimbas pada tingginya jumlah keluarga miskin;
 - b) Terbatasnya akses untuk peningkatan kesejahteraan;
 - c) Terbatasnya akses pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan; dan

- d) Banyaknya kasus dan kurangnya partisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan napza.
- 5. Fungsi Agama dan Moralitas
 - a) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - b) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana keagamaan.

e. Bidang Infrastruktur

- 1. Fungsi Perhubungan (Darat dan Laut)
 - a) Meningkatnya jumlah kendaraan umum sehingga memerlukan penambahan jaringan jalan yang terpadu dengan prasarana utilitas yang baik dan pergantian antar mode angkutan;
 - b) Rendahnya partisipasi warga dalam penyediaan lahan untuk pembuatan prasarana jalan umum;
 - c) Masih kurangnya penerangan jalan umum;
 - d) Masih terbatasnya akses jalan menuju desa terpencil; dan
 - e) Belum tersedia pelabuhan laut skala regional.
- 2. Fungsi Permukiman dan Prasarana Wilayah
 - a) Belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan persampahan kota;
 - b) Minimnya sarana air bersih untuk perumahan;
 - c) Kondisi dan prasarana lingkungan perumahan yang kurang memadai terutama di wilayah pesisir;
 - d) Keberadaan perumahan/permukiman baru belum tertata dengan baik; dan
 - e) Munculnya permukiman yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

f. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- 1. Fungsi Pertanian, Perkebunan dan Kelautan
 - a) Pertanian
 - 1) Kurangnya optimalisasi lahan pertanian ditandai dengan banyaknya lahan tidur;
 - 2) Kebutuhan pencetakan sawah meningkat;
 - 3) Sarana irigasi teknis belum tersedia dengan baik;
 - 4) Kurangnya akses jalan usaha tani;
 - 5) Belum optimalnya penerapan intensifikasi dan diversifikasi pertanian sesuai potensi daerah; dan
 - 6) Belum meratanya kemampuan petani dalam penerapan teknologi tepat guna serta masih lemahnya kelembagaan petani.
 - b) Perkebunan
 - 1) Adanya konflik penguasaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat petani kebun;
 - 2) Alih fungsi hutan industri menjadi perkebunan rakyat belum terkelola dengan baik;
 - 3) Kurangnya akses jalan usaha tani;
 - 4) Upaya peningkatan jenis komoditi unggulan belum optimal; dan
 - 5) Masih rendahnya kualitas pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.
 - c) Kelautan
 - 1) Rendahnya kreativitas/pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengelola hasil produksi perikanan;
 - 2) Tingginya tingkat kerusakan hutan mangrove akibat alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan;
 - 3) Teknologi penangkapan ikan bersifat sederhana;
 - 4) Adanya konflik penggunaan kawasan pesisir/laut antara masyarakat nelayan dengan pihak industri; dan

- 5) Menurunnya kualitas perairan akibat tingginya pencemaran.
2. Fungsi Pariwisata
 - a) Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan;
 - b) Belum optimalnya promosi kepariwisataan;
 - c) Belum adanya konsep kepariwisataan terpadu; dan
 - d) Kurangnya minat masyarakat dalam mengelola dan melestarikan keragaman budaya.
3. Fungsi Migas dan Energi
 - a) Ketersediaan energi listrik masih sangat kurang; dan
 - b) Optimalisasi penggunaan potensi energi batubara untuk menunjang kebutuhan energi bagi masyarakat belum dilakukan.
4. Fungsi Perdagangan, Industri dan Koperasi
 - a) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta belum adanya komoditi unggulan yang bertumpu pada UKM dan industri kecil dengan memanfaatkan peluang pasar dalam maupun luar negeri;
 - b) Masih rendahnya manajemen usaha perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c) Rendahnya kinerja dan akses modal serta animo masyarakat terhadap koperasi; dan
 - d) Masih kurangnya kejelasan informasi potensi dan prosedur investasi.
5. Fungsi Lingkungan Hidup
 - a) Meningkatnya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumberdaya alam;
 - b) Belum semua kawasan memiliki rencana tata ruang, kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c) Rendahnya kesadaran pelaku usaha/perusahaan untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - d) Maraknya penambangan minerba yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

7.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 3) Neraca;

- 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Tahun 2020, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Sekretariat Daerah c.q. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mencakup 39 Perangkat Daerah. Daftar Perangkat Daerah tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 12. Daftar Perangkat Daerah Tahun 2020

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
1.	1 . 01 . 1	Dinas Pendidikan
2.	1 . 02 . 1	Dinas Kesehatan
3.	1 . 02 . 2	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)
4.	1 . 02 . 3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)
5.	1 . 02 . 4	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
6.	1 . 03 . 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	1 . 04 . 1	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	1 . 05 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1 . 05 . 2	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	1 . 05 . 3	Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran
11.	1 . 06 . 1	Dinas Sosial
12.	2 . 01 . 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	2 . 02 . 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.	2 . 03 . 1	Dinas Ketahanan Pangan
15.	2 . 05 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
16.	2 . 06 . 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17.	2 . 07 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	2 . 09 . 1	Dinas Perhubungan
19.	2 . 10 . 1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
20.	2 . 11 . 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21.	2 . 12 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	2 . 13 . 1	Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	2 . 16 . 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	2 . 17 . 1	Dinas Perpustakaan dan Arsip
25.	3 . 01 . 1	Dinas Kelautan dan Perikanan
26.	3 . 03 . 1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
27.	3 . 03 . 2	Dinas Perkebunan
28.	3 . 04 . 1	Dinas Kehutanan
29.	3 . 05 . 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia
30.	3 . 06 . 1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31.	4 . 01 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
32.	4 . 02 . 1	Badan Keuangan Daerah
33.	4 . 03 . 1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
34.	4 . 04 . 1	Badan Pendapatan Daerah
35.	4 . 06 . 1	Badan Kepegawaian Daerah
36.	4 . 07 . 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37.	4 . 08 . 1	Sekretariat Daerah
	4 . 06 . 1 . 1	~ Biro Pemerintahan
	4 . 06 . 1 . 2	~ Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	4 . 06 . 1 . 3	~ Biro Hukum
	4 . 06 . 1 . 4	~ Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4 . 06 . 1 . 5	~ Biro Administrasi Pembangunan
	4 . 06 . 1 . 6	~ Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 . 06 . 1 . 7	~ Biro Organisasi
	4 . 06 . 1 . 8	~ Biro Umum
	4 . 06 . 1 . 9	~ Biro Administrasi Pimpinan
38.	4 . 06 . 2	Sekretariat DPRD
39.	4 . 06 . 3	Badan Penghubung
40.	4 . 06 . 4	DPRD
41.	4 . 06 . 5	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
42.	4 . 07 . 5	Inspektorat Provinsi

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

6.4.2.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.4.2.3. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

7.4.2.3.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 13. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

7.4.2.3.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

7.4.2.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.4. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7.4.2.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD.

7.4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.4.2.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan

dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan

- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

7.5.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.816.639.952.634,00	4.767.014.514.749,24

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp4.816.639.952.634,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.767.014.514.749,24 atau 98,97% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.570.137.570.176,27, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.170.347.450.809,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp26.529.493.763,97.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.990.195.455.014,80, atau 4,47% dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp223.180.940.265,56. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 14. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2020 dan TA 2019

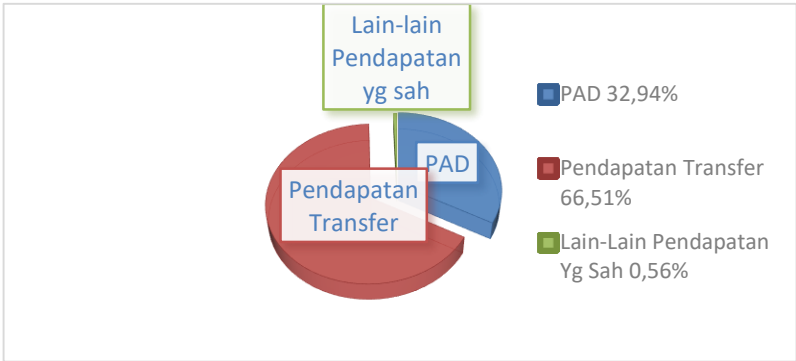
No.	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	1.485.940.751.841,00	1.570.137.570.176,27	105,67	1.776.231.952.739,76	(206.094.382.563,49)
2	Pendapatan Transfer	3.322.575.490.793,00	3.170.347.450.809,00	95,42	3.191.205.289.485,95	(20.857.838.676,95)
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	8.123.710.000,00	26.529.493.763,97	326,57	22.758.212.789,09	3.771.280.974,88

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

	Jumlah	4.816.639.952.634,00	4.767.014.514.749,24	98,97	4.990.195.455.014,80	(223.180.940.265,56)
--	--------	----------------------	----------------------	-------	----------------------	----------------------

Realisasi tersebut termasuk PAD dari BLUD sebesar Rp195.563.859.434,21 atau 126,73% berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 (dalam persentase) dapat dilihat pada Grafik berikut.

Gambar 4. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020



7.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.485.940.751.841,00	1.570.137.570.176,27

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp1.485.940.751.841,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp1.570.137.570.176,27, atau 105,67%. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp206.094.382.563,49 atau 11,60% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Pendapatan Asli Daerah TA 2020 dan TA 2019

No	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.156.285.867.687,00	1.243.223.219.389,33	107,52	1.438.977.522.676,40	(195.754.303.287,07)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	15.063.134.000,00	14.374.692.453,00	95,43	41.568.852.809,00	(27.194.160.356,00)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.840.500.000,00	79.366.317.748,00	92,46	78.920.997.801,00	445.319.947,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	228.751.250.154,00	233.173.340.585,94	101,93	216.764.579.453,36	16.408.761.132,58
	Jumlah	1.485.940.751.841,00	1.570.137.570.176,27	105,67	1.776.231.952.739,76	(206.094.382.563,49)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah per SKPD sebagai berikut.

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Asli Daerah per Perangkat Daerah

Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Dinas Pendidikan	35.000.000,00	4.500.000,00	12,86
Dinas Kesehatan	1.675.000.000,00	1.822.215.841,00	108,79
RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)	20.000.000,00	30.238.000,00	151,19
RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)	154.313.560.154,00	195.563.859.434,21	126,73
Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya	1.778.200.000,00	3.113.645.085,00	175,10
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.350.000.000,00	1.467.939.960,00	62,47
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	31.500.000,00	31.600.000,00	100,32
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	993.500.000,00	743.815.480,00	74,87
Dinas Ketahanan Pangan	19.500.000,00	9.750.000,00	50,00
Dinas Perhubungan	311.500.000,00	145.051.200,00	46,57
Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00	11.301.000,00	75,34
Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	5.500.000,00	6.000.000,00	109,09

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Dinas Pemuda dan Olahraga	85.000.000,00	85.500.000,00	100,59
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	65.000.000,00	26.593.500,00	40,91
Dinas Kelautan dan Perikanan	247.000.000,00	247.102.000,00	100,04
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	344.750.000,00	80.545.560,00	23,36
Dinas Perkebunan	476.544.000,00	583.880.055,00	122,52
Dinas Kehutanan	310.000.000,00	712.485.340,00	229,83
Dinas Energi Sumber Daya Mineral	2.272.386.000,00	2.501.303.200,00	110,07
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	298.500.000,00	175.253.100,00	58,71
Badan Perencanaan Daerah, Litbang dan Statistik	75.000.000,00	65.500.000,00	87,33
Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.475.500.000,00	1.564.632.332,00	63,20
PPKD	109.477.690.000,00	101.946.259.739,73	93,11
Badan Pendapatan Daerah	1.206.415.867.687,00	1.258.202.379.349,33	104,29
Badan Kepegawaian Daerah	102.000.000,00	106.700.000,00	104,61
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	507.620.000,00	555.220.000,00	109,38
Biro Umum	254.634.000,00	191.500.000,00	75,21
Badan Penghubung Pemprov. Kalteng di Jakarta	960.000.000,00	142.800.000,00	14,88
Jumlah	1.485.940.751.841,00	1.570.137.570.176,27	105,67

Rincian per objek pendapatan dijelaskan dalam subbab berikut.

7.5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp1.243.223.219.389,33 atau 107,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.156.285.867.687,00, dengan demikian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 melampaui target sebesar Rp86.937.351.702,33. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp195.754.303.287,07 atau 13,60% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.438.977.522.676,40.

Penyebab Penurunan Pendapatan Pajak Daerah disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 sehinga adanya ketakutan masyarakat untuk berkumpul/berkerumun sehinga terjadi penurunan pembayaran pajak tepat waktu, adanya penundaan untuk membayar pajak dimasa pandemi COVID-19, terdapatnya penghapusan denda pajak yang dapat meringankan beban pembayaran pajak. Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 17. Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	312.623.404.000,00	352.684.256.759,00	112,81	363.626.594.922,00	(10.942.338.163,00)
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	277.800.564.000,00	285.528.733.913,00	102,78	381.771.382.413,00	(96.242.648.500,00)
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	400.390.000.000,00	417.170.636.646,53	104,19	551.253.814.411,00	(134.083.177.764,47)
4.	Pajak Air Permukaan – LRA	1.400.000.000,00	1.445.969.233,80	103,28	1.346.503.506,40	99.465.727,40
5.	Pajak Rokok - LRA	164.071.899.687,00	186.393.622.837,00	113,60	140.979.227.424,00	45.414.395.413,00
	Jumlah	1.156.285.867.687,00	1.243.223.219.389,33	107,52	1.438.977.522.676,40	(195.754.303.287,07)

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut:

7.5.2.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp352.684.256.759,00 atau 112,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp312.623.404.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.942.338.163,00 atau 3,01% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp363.626.594.922,00. Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan PKB Tahun Anggaran 2020 dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB:

- a) Penagihan secara *door to door* untuk kendaraan bermotor (KBm);
- b) Pemberian penghapusan sanksi administrasi PKB;
- c) Razia gabungan pengesahan STNK bersama dengan Dirlantas Polda Kalimantan Tengah;
- d) Perpanjangan jam pelayanan Samsat pada bulan Desember 2020;
- e) Razia Bersama atas KBm Belum Daftar Ulang (BDU) bekerja sama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Tengah;
- f) Penyampaian surat himbauan, teguran dan panggilan secara atas KBm Belum Daftar Ulang (BDU) terutama kendaraan mewah dan kendaraan operasional badan usaha.

7.5.2.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp285.528.733.913,00 atau 102,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp277.800.564.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp96.242.648.500,00 atau 25,21% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp381.771.382.413,00.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan BBN-KB dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan BBN-KB :

- a) *Update* data KBm atas Kendaraan Baru dan mutasi KBm antar daerah;
- b) Pemberian penghapusan sanksi administrasi BBN-KB;
- c) Penagihan *door to door* untuk KBm;
- d) Perpanjangan jam pelayanan Samsat pada bulan Desember 2020.

7.5.2.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp417.170.636.646,53 atau 104,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp400.390.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp134.083.177.764,47 atau 24,32% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp551.253.814.411,00.

7.5.2.1.1.1.4. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.445.969.233,80 atau 103,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.400.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp99.465.727,40 atau 7,38% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.346.503.506,40.

7.5.2.1.1.1.5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Objek pajak rokok merupakan konsumsi rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perUndang-Undangan di bidang cukai.

Realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp186.393.622.837,00 atau 113,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp164.071.899.687,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp45.414.395.413,00 atau 32,21% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2019 sebesar Rp140.979.227.424,00.

7.5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp15.063.134.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp14.374.692.453,00 atau 95,43%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai target sebesar Rp688.441.547,00 atau 4,79%. Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp41.568.852.809,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp27.194.160.356,00 atau 65,41%. Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 18. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pelayanan Kesehatan	2.583.200.000,00	3.775.001.726,00	146,14	2.688.142.642,00	1.086.859.084,00
2	Penggantian Biaya Cetak Peta	2.424.986.000,00	2.554.350.000,00	105,33	2.754.875.000,00	(200.525.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	26.148.933.000,00	(26.148.933.000,00)
4	Pemakaian Kekayaan Daerah	6.958.724.000,00	6.156.924.892,00	88,48	8.041.195.922,00	(1.884.271.030,00)
5	Restribusi Terminal	50.000.000,00	67.230.000,00	134,46	88.890.000,00	(21.660.000,00)

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

No.	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
6	Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	451.020.000,00	153.625.000,00	34,06	350.450.000,00	(196.825.000,00)
7	Tempat Rekreasi dan Olah raga	696.000.000,00	274.937.500,00	39,50	491.784.500,00	(216.847.000,00)
8	Penjualan Produksi Usaha Daerah	938.704.000,00	644.795.055,00	68,69	719.296.180,00	(74.501.125,00)
9	Izin Trayek	31.500.000,00	34.450.000,00	109,37	32.300.000,00	2.150.000,00
10	Izin Perikanan	29.000.000,00	900.000,00	3,10	0,00	900.000,00
11	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	900.000.000,00	712.478.280,00	79,16	252.985.565,00	459.492.715,00
	Jumlah	15.063.134.000,00	14.374.692.453,00	95,43	41.568.852.809,00	(27.194.160.356,00)

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

7.5.2.1.1.2.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Retribusi pelayanan kesehatan tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp2.583.200.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai Rp3.775.001.726,00 atau 146,14%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan melebihi target sebesar Rp1.191.801.726,00 atau 46,13%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2.688.142.642,00 terlihat penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.086.859.084,00 atau 40,43%.

7.5.2.1.1.2.2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp2.424.986.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp2.554.350.000,00 atau 105,33% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta melebihi capai target sebesar Rp129.364.000,00 atau 5,33%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2.754.875.000,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp200.525.000,00 atau 7,27%.

7.5.2.1.1.2.3. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi pelayanan pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian restribusi. Sedangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 tercatat capaian pendapatan sebesar Rp26.148.933.000,00.

7.5.2.1.1.2.4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp6.958.724.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp6.156.924.892,00 atau 88,48% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp801.799.108,00 atau 11,52%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp8.041.195.922,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.884.271.030,00 atau 23,43%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian laboratorium, pemakaian ruangan.

7.5.2.1.1.2.5. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian.

Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp67.230.000,00 atau 134,46% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp17.230.000,00 atau sebesar 34,46%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp88.890.000,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp21.660.000,00 atau 24,36%.

7.5.2.1.1.2.6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan retribusi atas pelayanan ruangan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp451.020.000,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp153.625.000,00 atau 34,06%, dengan demikian realisasi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tidak mencapai target sebesar Rp297.395.000,00 atau 65,93%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp350.450.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar Rp196.825.000,00 atau 56,16%.

7.5.2.1.1.2.7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp696.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp274.937.500,00 atau 39,50% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp421.062.500,00 atau 60,49%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan, gedung olahraga, kolam renang, serta pemakaian stadion olahraga. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp491.784.500,00 maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp216.847.000,00 atau 44,09%.

7.5.2.1.1.2.8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp938.704.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp644.795.055,00 atau 68,69% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini mengalami penurunan dari target sebesar Rp293.908.945,00 atau 31,31%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp719.296.180,00, maka penerimaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp74.501.125,00 atau 10,35%.

7.5.2.1.1.2.9. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu. Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp31.500.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp34.450.000,00 atau 109,37%, dengan demikian realisasi izin trayek melebihi dari target sebesar Rp2.950.000,00 atau 9,36%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp32.300.000,00, terlihat mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar Rp2.150.000,00 atau 6,65%.

7.5.2.1.1.2.10. Retribusi Izin Perikanan

Retribusi Izin Perikanan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp29.000.000,00, namun dalam realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp900.000,00 atau 3,10%, dengan demikian realisasi retribusi izin perikanan tidak mencapai target sebesar Rp28.100.000,00 atau 96,89%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi retribusi izin perikanan Tahun Anggaran 2019 yang tidak terealisasi, sehingga terlihat mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar Rp900.000,00 atau 100,00%.

7.5.2.1.1.2.11. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp712.478.280,00 atau 79,16%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp187.521.720,00 atau 20,84%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp252.985.565,00, retribusi ini di tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp459.492.715,00 atau 181,62%.

7.5.2.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp85.840.500.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp79.366.317.748,00 atau 92,46%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut tidak mencapai target sebesar Rp6.474.182.252,00 atau 7,54%. Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun

Anggaran 2020 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp78.920.997.801,00, terlihat pendapatan di tahun anggaran 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp445.319.947,00 atau 0,56%. Realisasi tersebut diperoleh dari pembagian deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD berupa penyertaan pada PT Bank Pembangunan Kalteng.

7.5.2.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah ditargetkan dalam APBD sebesar Rp228.751.250.154,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp233.173.340.585,94 atau 101,93%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD melebihi capaian target sebesar Rp4.422.090.431,94 atau 1,93%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp216.764.579.453,36 terlihat pendapatan di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp16.408.761.132,58 atau 7,57%. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ini digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 19. Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	800.500.000,00	328.993.400,00	41,10	886.182.450,00	(557.189.050,00)
2	Penerimaan Jasa Giro	13.104.000.000,00	3.420.746.984,00	26,10	7.572.799.610,40	(4.152.052.626,40)
3	Penerimaan Bunga Deposito	10.433.090.000,00	19.157.459.929,49	183,62	37.000.372.575,24	(17.842.912.645,75)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	100.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak - LRA	50.000.000.000,00	14.667.115.960,00	29,33	21.088.843.104,00	(6.421.727.144,00)
8	Pendapatan BLUD	154.313.560.154,00	195.563.859.434,21	126,73	150.216.381.713,72	45.347.477.720,49
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	35.164.878,24	100,00	0,00	35.164.878,24
	Jumlah	228.751.250.154,00	233.173.340.585,94	101,93	216.764.579.453,36	16.408.761.132,58

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut:

7.5.2.1.1.4.1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp800.500.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp328.993.400,00 atau 41,10%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp471.506.600,00 atau 58,90%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp886.182.450,00, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan di Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp557.189.050,00 atau 62,87%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2020 diperoleh dari upaya antara lain:

- a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi Hasil Penjualan Peralatan/ Mesin;
- b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti gedung dan bangunan.

7.5.2.1.1.4.2. Penerimaan Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp13.104.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai

Rp3.420.746.984,00 atau 26,10%, dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp9.683.253.016,00 atau 73,89%. Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.420.746.984,00 terdiri dari:

- a. Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp3.067.830.528,00;
- b. Jasa Giro Bendahara - L R A sebesar Rp352.916.456,00.
- c. Jasa Giro Bendahara BOS – LRA sebesar Rp0,00

Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp7.572.799.610,40, terlihat realisasi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.152.052.626,40 atau 54,83%.

7.5.2.1.1.4.3. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2020 ditargetkan Rp10.433.090.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp19.157.459.929,49 atau 183,62%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga Deposito melebihi target sebesar Rp8.724.369.929,49 atau 83,62%. Pendapatan bunga tersebut merupakan pemanfaatan kas menganggur (*idle cash*) dalam rangka *cash management* melalui mekanisme *deposito on call* yang didepositokan pada hari Jumat dan dicairkan pada hari Senin minggu berikutnya. Apabila realisasi Pendapatan Bunga Deposito tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp37.000.372.575,24, terlihat realisasi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp17.842.912.645,75 atau 48,22%.

7.5.2.1.1.4.4. Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)

Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2020 ditargetkan Rp100.100.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 tidak ada realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, realisasi penerimaan TGR tidak mencapai target sebesar Rp100.100.000,00. Realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2019, tidak ada realisasi penerimaan sehingga realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.4.5. Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp50.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp14.667.115.960,00 atau 29,33%, dengan demikian realisasi Tahun Anggaran 2020 tidak mencapai target sebesar Rp35.332.884.040,00 atau 70,67%. Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2020 tersebut terdiri atas perolehan:

- a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp14.105.439.000,00;
- b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp561.676.960,00.

Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp21.088.843.104,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp6.421.727.144,00 atau 30,45%.

7.5.2.1.1.4.6. Pendapatan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2010, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil

kinerja. Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp154.313.560.154,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 195.563.859.434,21 atau 126,73%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2020 melampaui dari target sebesar Rp41.250.299.280,21 atau 26,73%. Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan realisasi BLUD Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp150.216.381.713,72, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp45.347.477.720,49 atau 30,19%.

7.5.2.1.2. **Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	3.322.575.490.793,00	3.170.347.450.809,00

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp3.322.575.490.793,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp3.170.347.450.809,00 atau 95,42%. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Rekapitulasi Pendapatan Transfer

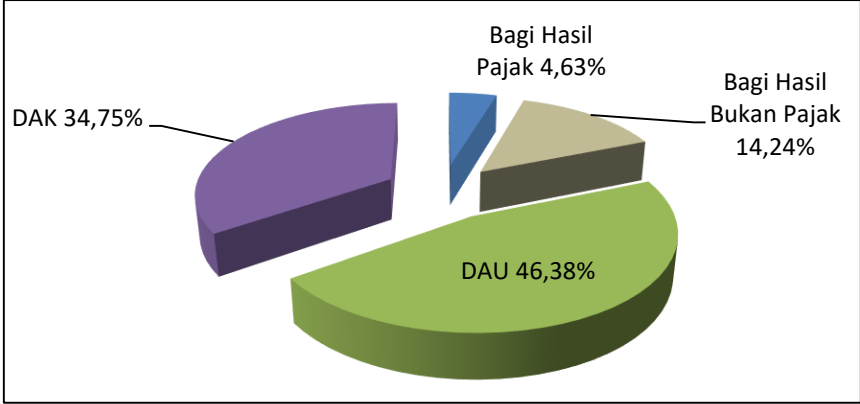
URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
PENDAPATAN TRANSFER	3.322.575.490.793,00	3.170.347.450.809,00	95,42	3.191.205.289.485,95
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.255.923.105.793,00	3.103.450.065.809,00	95,32	3.173.404.284.485,95
Bagi Hasil Pajak	177.524.624.282,00	143.899.478.029,00	81,06	121.270.799.919,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	532.437.188.787,00	441.819.113.594,00	82,98	486.695.632.798,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.442.656.367.000,00	1.439.305.729.000,00	99,77	1.603.623.745.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.103.304.925.724,00	1.078.425.745.186,00	97,75	961.814.106.768,95
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya	63.222.385.000,00	63.222.385.000,00	100,00	13.636.005.000,00
Dana Penyesuaian	63.222.385.000,00	63.222.385.000,00	100,00	13.636.005.000,00
Bantuan Keuangan	3.430.000.000,00	3.675.000.000,00	107,14	4.165.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.	3.185.000.000,00	3.430.000.000,00	107,69	3.675.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	490.000.000,00

7.5.2.1.2.1. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.103.450.065.809,00 atau 95,32% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.255.923.105.793,00. Realisasi pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Komposisi realisasi pendapatan transfer (dalam persentase) Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 5. Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020



7.5.2.1.2.1.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp177.524.624.282,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 mencapai Rp143.899.478.029,00 atau 81,06%, dengan demikian tahun 2020 pendapatan bagi hasil pajak tidak mencapai target sebesar Rp33.625.146.253,00 atau 18,94%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2019 yang tercatat Rp121.270.799.919,00, penerimaan bagi hasil pajak tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp22.628.678.110,00 atau 18,66%. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak diperoleh dari:

- a. Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan tahun 2020 sebesar Rp8.572.859.824,00;
- b. Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan sebesar Rp29.967.690.663,00;
- c. Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan sebesar Rp22.496.419.673,00;
- d. Bagi hasil dari pph pasal 25 dan pasal 29 wp orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21 sebesar Rp82.798.824.468,00;
- e. Bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp63.683.401,00.

Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan realisasi pendapatan bagi hasil pajak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Rekapitulasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	41.383.136.317,00	8.572.859.824,00	20,72	22.472.765.279,00	(13.899.905.455,00)
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	46.956.762.666,00	29.967.690.663,00	63,82	48.435.877.036,00	(18.468.186.373,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	11.181.154.833,00	22.496.419.673,00	201,20	10.015.310.881,00	12.481.108.792,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri - LRA	77.928.692.885,00	82.798.824.468,00	106,25	38.322.136.800,00	44.476.687.668,00
5	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau - LRA	74.877.581,00	63.683.401,00	85,05	2.024.709.923,00	(1.961.026.522,00)
	Jumlah	177.524.624.282,00	143.899.478.029,00	81,06	121.270.799.919,00	22.628.678.110,00

7.5.2.1.2.1.2. **Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp532.437.188.787,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 mencapai Rp441.819.113.594,00 atau 82,98%, dengan demikian tahun 2020 pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam mengalami penurunan dari target sebesar Rp90.618.075.193,00 atau 17,01%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam tahun 2019 yang tercatat Rp486.695.632.798,00, maka penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp44.876.519.204,00 atau 9,22%. Realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam diperoleh dari:

- a. Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan tahun anggaran 2020 sebesar Rp0,00;
- b. Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan tahun anggaran 2020 sebesar Rp7.714.946.031,00;
- c. Bagi hasil dari dana reboisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp133.191.534.412,00;
- d. Bagi hasil dari iuran tetap (land-rent) tahun anggaran 2020 sebesar Rp15.981.535.931,00;
- e. Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) tahun anggaran 2020 sebesar Rp284.775.832.220,00;
- f. Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi tahun anggaran 2020 sebesar Rp7.770.800,00;
- g. Bagi hasil dari pertambangan gas bumi tahun anggaran 2020 sebesar Rp147.494.200,00.

Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam pada tabel sebagai berikut:

Tabel 22. Rekapitulasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	1.356.262.696,00	0,00	0,00	4.764.046.800,00	(4.764.046.800,00)
2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	35.113.294.938,00	7.714.946.031,00	21,97	20.358.648.600,00	(12.643.702.569,00)
3	Bagi Hasil dana Reboisasi	243.705.740.073,00	133.191.534.412,00	54,65	308.523.365.424,00	(175.331.831.012,00)
4	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	16.177.961.729,00	15.981.535.931,00	98,79	13.230.431.178,00	2.751.104.753,00
5	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	235.906.266.351,00	284.775.832.220,00	120,72	139.620.182.146,00	145.155.650.074,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	8.365.000,00	7.770.800,00	92,90	28.977.850,00	(21.207.050,00)
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	169.298.000,00	147.494.200,00	87,12	169.980.800,00	(22.486.600,00)
	Jumlah	532.437.188.787,00	441.819.113.594,00	82,98	486.695.632.798,00	(44.876.519.204,00)

7.5.2.1.2.1.3. **Pendapatan Dana Alokasi Umum**

Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp1.442.656.367.000,00. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp1.439.305.729.000,00 atau 99,77%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp1.603.623.745.000,00, maka pendapatan dana

alokasi umum (DAU) tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp164.318.016.000,00 atau 10,24%.

7.5.2.1.2.1.4. Pendapatan Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Dana Alokasi Khusus tahun Anggaran 2020 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp1.103.304.925.724,00. Realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp1.078.425.745.186,00 atau 97,75%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp961.814.106.768,95, maka pendapatan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp116.611.638.417,05 atau 12,12%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- a. DAK Bidang Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp37.778.000.000,00;
- b. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp6.502.791.031,00;
- c. DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp33.262.719.719,00;
- d. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp3.014.265.200,00;
- e. DAK Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp0,00;
- f. DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp192.555.000,00;
- g. DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp0,00;
- h. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp236.179.548.397,00;
- i. DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp0,00;
- j. DAK Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp2.202.330.440,00;
- k. DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp0,00;
- l. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp604.173.450.000,00;
- m. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp14.305.218.724,00;
- n. DAK Non Fisik Koperasi UKM Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp2.263.905.774,00;
- o. DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp314.232.709,00;
- p. DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp131.762.555.000,00;
- q. DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp3.358.500.000,00;
- r. DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp0,00
- s. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Budaya Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp3.015.673.192,00; dan
- t. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp100.000.000,00.

7.5.2.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun anggaran 2020 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp63.222.385.000,00 yang diperuntukan untuk Dana Insentif Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp63.222.385.000,00 atau 100,00%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp13.636.005.000,00, hal ini berarti Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp49.586.380.000,00 atau 363,64%.

7.5.2.1.2.3. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp3.675.000.000,00 atau 107,14% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp3.430.000.000,00. Hal ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp490.000.000,00 atau 11,76% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp4.165.000.000,00. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah ke Kabupaten Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp3.430.000.000,00 dapat dilihat pada tabel 23, sedangkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp245.000.000,00 yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah daerah Kota Palangka Raya.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah/Kabupaten dapat ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2020 kepada 13 Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/4/2020 tentang Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Dalam Rangka Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2020 antara lain:

1. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
2. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
3. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
4. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
5. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
6. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Seruyan Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
7. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
8. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
9. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Sukamara Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
10. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Lamandau Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
11. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
12. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp490.000.000,00;
13. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Katingan Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp. 245.000.000,00;

14. Penerimaan dari Pemerintah Kota Palangka Raya Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00.

Tabel 23. Rekapitulasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No.	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	735.000.000,00
4	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
5	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
6	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
7	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
9	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
10	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
11	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
12	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas	245.000.000,00	490.000.000,00	200,00	245.000.000,00
13	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten katingan	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
14	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	490.000.000,00
	Jumlah	3.430.000.000,00	3.675.000.000,00	107,14	4.165.000.000,00

7.5.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	8.123.710.000,00	26.529.493.763,97

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 yang ditargetkan dalam APBD sebesar Rp8.123.710.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp26.529.493.763,97 atau 326,57%, dengan demikian tahun 2020 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pencapaiannya melampaui dari target sebesar Rp18.405.783.763,97 atau 226,57%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2019 yang tercatat Rp22.758.212.789,09, maka Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp3.771.280.974,88 atau 16,57%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari: a) Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.608.344.996,00; dan b) Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.921.148.767,97.

7.5.2.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp8.123.710.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp5.608.344.996,00 atau 69,04%, dengan demikian realisasi pendapatan

hibah di tahun 2020 tidak mencapai target sebesar Rp2.515.365.004,00 atau 30,96%. Apabila Realisasi Pendapatan Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp7.911.643.179,13, sehinga terlihat realisasi tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.303.298.183,13 atau 29,11%.

Pendapatan hibah yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pada tahun 2020 yang semula ditargetkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp450.000.000,00 sehinga sampai akhir tahun anggaran 2020 tidak direalisasikan. Pendapatan hibah yang bersumber dari pendapatan sumbangan pihak ketiga pada tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp7.673.710.000,00, realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp5.608.344.996,00 atau 73,09% dengan rincian sebagai berikut: a) Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor direalisasikan sebesar Rp4.410.345.000,00; dan b) Sumbangan dari PT. Jasa Raharja direalisasikan sebesar Rp1.197.999.996,00. Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan realisasi pendapatan hibah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 24. Rekapitulasi Pendapatan Hibah

No.	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	(450.000.000,00)
2	Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor – LRA	6.608.460.000,00	4.410.345.000,00	66,74	6.285.643.179,13	(1.875.298.179,13)
3	Sumbangan dari PT. Jasa Raharja – LRA	1.065.250.000,00	1.197.999.996,00	112,46	1.176.000.000,00	21.999.996,00
	Jumlah	8.123.710.000,00	5.608.344.996,00	69,04	7.911.643.179,13	(2.303.298.183,13)

7.5.2.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2020 tidak ditargetkan dalam APBD sehinga target sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2020 Pendapatan Lainnya direalisasikan sebesar Rp20.921.148.767,97, apabila realisasi Pendapatan Lainnya tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp14.846.569.609,96, sehingga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp6.074.579.158,01 atau 40,92%.

Pendapatan lainnya tersebut termasuk dalam akun Pendapatan sumbangan pihak ketiga pada pendapatan lainnya sebesar Rp16.834.427.015,09 merupakan akun untuk mencatat sumbangan dari pihak ketiga seperti sumbangan *dealer* kendaraan bermotor, PT Jasa Raharja, sumbangan dari pihak ketiga lainnya. Akun pendapatan lainnya mencatat pengembalian belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3.600.069.034,72, pendapatan lainnya atas denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp345.326.529,96, pendapatan lainnya atas pendapatan jasa giro BOS sebesar Rp12.282.188,40, pendapatan lainnya atas pendapatan bunga BOS sebesar Rp3.091.715,80, pendapatan lainnya atas pengembalian dana BOS tahun sebelumnya sebesar Rp1.344.434,00, dan pendapatan lainnya atas dan BOS tahun sebelumnya sebesar Rp124.607.850,00.

Tabel 25. Rekapitulasi Pendapatan Lainnya

No.	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	16.834.427.015,09	100	2.030.765.260,41	14.803.661.754,68
2	Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya	0,00	3.600.069.034,72	100	12.469.285.458,11	(8.869.216.423,39)
3	Denda Keterlambatan Pekerjaan	0,00	345.326.529,96	100	346.518.891,44	(1.192.361,48)
4	Pendapatan Jasa Giro BOS	0,00	12.282.188,40	100	0,00	12.282.188,40

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

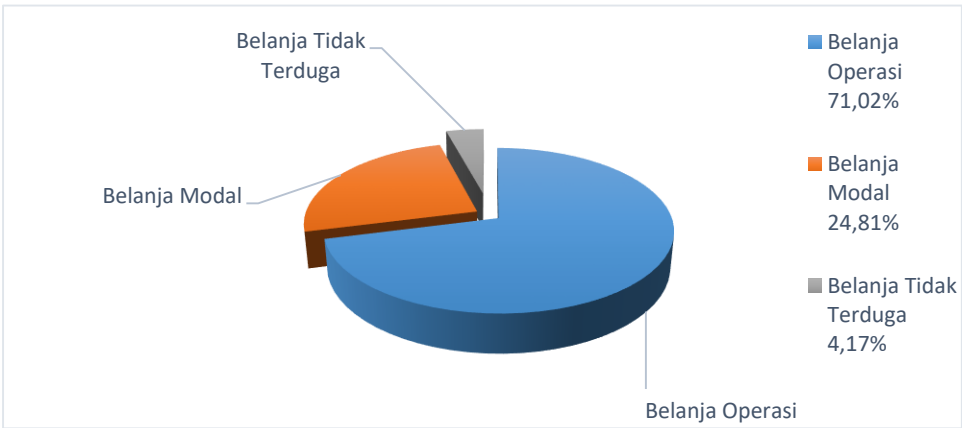
No.	Uraian	TA 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5	Pendapatan Bunga BOS	0,00	3.091.715,80	100	0,00	3.091.715,80
6	Pengembalian Dana Bos Tahun Sebelumnya	0,00	1.344.434,00	100	0,00	1.344.434,00
7	Dana Bos Tahun Sebelumnya	0,00	124.607.850,00	100	0,00	124.607.850,00
	Jumlah	0,00	20.921.148.767,97	100	14.846.569.609,96	6.074.579.158,01

7.5.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.772.120.280.347,21	4.466.805.961.013,31

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.466.805.961.013,31 atau 93,60% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp4.772.120.280.347,21. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 meningkat dari belanja daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp153.850.995.577,34 atau 3,57%. Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp3.172.105.602.013,78, Belanja Modal sebesar Rp1.108.301.881.143,53 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp186.398.477.856,00. Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

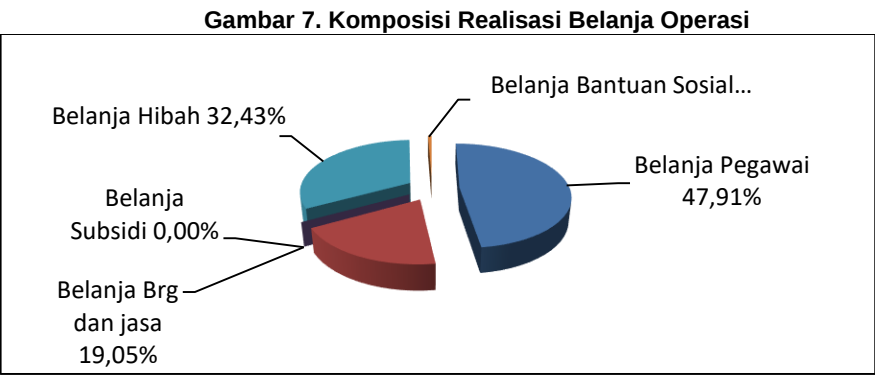
Gambar 6. Komposisi Belanja



7.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	3.400.772.364.031,77	3.172.105.602.013,78

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Rp3.400.772.364.031,77. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp3.172.105.602.013,78 atau 93,28%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp228.666.762.017,99 atau 6,72%. Realisasi Belanja Operasi pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020 meningkat dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp157.108.268.763,38 atau 5,21%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2020 disajikan pada gambar berikut.



7.5.2.2.1.1. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.657.231.739.285,92. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.519.642.134.846,00 atau 91,70%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp137.589.604.439,92 atau 8,30%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 26. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2020

No.	Uraian	TA 2020		%	Realisasi TA 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Gaji dan Tunjangan	735.774.428.942,42	675.804.063.903,00	91,85	666.930.218.735,00	8.873.845.168,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	537.985.601.810,00	496.281.445.247,00	92,25	464.723.880.340,00	31.557.564.907,00
3.	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.460.000.000,00	10.190.000.000,00	97,42	10.410.000.000,00	(220.000.000,00)
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	34.704.314.794,00	22.902.396.988,00	65,99	30.720.044.769,00	(7.817.647.781,00)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.633.571.215,00	832.407.780,00	31,61	130.053.607,00	702.354.173,00
6	Honorarium PNS	145.661.981.450,50	133.334.446.425,00	91,54	117.837.662.507,00	15.496.783.918,00
7	Honorarium Non Pegawai	10.400.000,00	8.900.000,00	85,58	230.280.000,00	(221.380.000,00)
8	Honorarium Non PNS	190.001.441.074,00	180.288.474.503,00	94,89	150.025.330.043,46	30.263.144.459,54
	Jumlah	1.657.231.739.285,92	1.519.642.134.846,00	91,70	1.441.007.470.001,46	78.634.664.844,54

Sedangkan realiasi Belanja Pegawai per Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut.

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

Tabel 27. Belanja Pegawai per Perangkat Daerah TA 2020

Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Badan Kepegawaian Daerah	8.983.482.000,00	8.032.580.047,00	89,41
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.609.063.856,00	8.995.753.725,00	45,88
Badan Keuangan dan Aset Daerah	67.004.812.002,00	59.515.354.605,00	88,82
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	10.417.168.696,00	8.892.501.385,00	85,36
Badan Pendapatan Daerah	60.574.195.075,00	46.226.479.589,00	76,31
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.149.058.127,00	10.175.114.159,00	77,38
Badan Penghubung	3.532.214.129,00	3.066.191.227,00	86,81
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.552.362.731,00	11.300.070.305,00	90,02
Biro Kesejahteraan Rakyat	1.148.320.000,00	1.096.123.030,00	95,45
Biro Pembangunan	710.410.000,00	676.960.000,00	95,29
Biro Perekonomian	447.590.150,00	429.147.070,00	95,88
Biro Hukum	1.182.092.500,00	1.182.092.500,00	100,00
Biro Organisasi	543.965.000,00	541.416.060,00	99,53
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.712.015.000,00	1.681.265.000,00	98,20
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.287.165.000,00	1.280.810.000,00	99,51
Biro Administrasi Pimpinan	507.654.000,00	478.167.255,00	94,19
Biro Umum	61.065.809.402,00	55.462.033.079,00	90,82
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	16.909.333.868,00	15.656.619.490,00	92,59
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.993.969.957,00	13.068.430.030,00	93,39
Dinas Kehutanan	77.429.943.165,00	65.868.242.074,00	85,07
Dinas Kelautan dan Perikanan	14.737.064.227,00	13.333.647.339,00	90,48
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.083.919.939,00	4.328.947.417,00	85,15
Dinas Kesehatan	30.066.706.355,00	24.597.093.191,00	81,81
Dinas Ketahanan Pangan	7.793.329.627,00	6.592.943.381,00	84,60
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	11.898.197.085,00	9.630.158.143,00	80,94
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.089.988.052,00	6.965.886.460,00	86,11
Dinas Lingkungan Hidup	8.303.279.932,00	6.780.854.469,00	81,66
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.742.763.994,42	35.666.263.927,00	92,06
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.939.758.281,00	10.103.729.459,00	92,36
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.051.525.580,00	7.899.107.060,00	87,27
Dinas Pemuda dan Olahraga	9.914.083.264,00	8.634.994.606,00	87,10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.299.342.567,00	8.811.899.423,00	85,56
Dinas Pendidikan	692.179.572.652,00	664.461.921.884,00	96,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	14.140.357.346,00	11.928.618.979,00	84,36
Dinas Perhubungan	9.754.325.181,00	7.794.971.080,00	79,91
Dinas Perkebunan	15.333.751.428,00	13.493.024.083,00	88,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	10.999.729.917,00	9.750.474.968,00	88,64
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.463.168.259,00	7.601.753.642,00	89,82
Dinas Sosial	18.957.290.355,00	16.685.322.157,00	88,02
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	31.103.264.410,00	27.914.318.581,00	89,75
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.142.199.276,00	17.455.345.539,00	86,66
DPRD	29.800.004.872,00	28.159.409.788,00	94,49
Inspektorat	13.067.002.393,00	12.034.356.592,00	92,10
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	249.926.190,00	199.919.388,00	79,99
RSJ Kalawa Atei	18.475.112.573,50	13.825.052.516,00	74,83
RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	146.123.720.821,00	134.256.817.376,00	91,88
RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	58.882.628.200,00	67.486.978.892,00	114,61
Satuan Polisi Pamong Praja	20.212.291.605,00	18.999.760.903,00	94,00
Sekretariat DPRD	11.666.810.246,00	10.623.212.973,00	91,05
Jumlah	1.657.231.739.285,92	1.519.642.134.846,00	91,70

7.5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp658.285.638.237,47. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp604.276.917.767,53 atau 91,80%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp54.008.720.469,94 atau 8,20%. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 lebih rendah sebesar Rp203.791.858.675,45 atau 25,22% dibandingkan dari realisasi Tahun

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp808.068.776.442,98. Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran Perangkat Daerah, sebagai berikut.

Tabel 28. Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah TA 2020

Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Badan Kepegawaian Daerah	2.196.063.349,00	1.915.195.053,00	87,21
Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.166.135.970,14	10.159.439.260,51	90,98
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	6.118.075.252,00	5.512.172.140,00	90,10
Badan Pendapatan Daerah	15.593.614.329,68	15.009.228.274,00	96,25
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.012.848.092,00	3.820.111.879,27	95,20
Badan Penghubung	2.908.542.964,00	2.599.018.000,00	89,36
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.500.056.452,25	4.824.562.730,00	87,72
Biro Kesejahteraan Rakyat	4.193.558.743,72	4.168.341.351,00	99,40
Biro Administrasi Pembangunan	2.783.341.064,50	2.701.303.900,00	97,05
Biro Perekonomian	982.240.360,00	968.415.553,00	98,59
Biro Hukum	1.367.254.219,00	1.350.159.759,00	98,75
Biro Organisasi	605.218.932,25	598.783.541,00	98,94
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.187.841.691,00	2.717.198.125,00	85,24
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	783.439.375,00	775.008.321,00	98,92
Biro Administrasi Pimpinan	13.680.783.112,50	12.486.657.414,00	91,27
Biro Umum	39.980.581.299,75	35.211.053.264,95	88,07
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.705.272.062,00	2.573.338.623,00	95,12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.696.548.766,00	4.146.455.001,00	88,29
Dinas Kehutanan	59.132.863.054,00	31.567.139.524,40	53,38
Dinas Kelautan dan Perikanan	5.653.063.965,00	5.300.016.793,00	93,75
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.345.204.153,50	1.291.273.445,00	95,99
Dinas Kesehatan	47.908.985.768,25	42.763.063.770,00	89,26
Dinas Ketahanan Pangan	1.645.734.465,00	1.443.629.186,64	87,72
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	8.199.311.515,00	7.810.910.205,00	95,26
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.338.355.080,50	4.020.585.466,00	92,68
Dinas Lingkungan Hidup	1.584.729.623,00	1.530.844.957,00	96,60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.986.739.123,83	38.235.120.661,01	93,29
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.243.100.503,25	4.928.750.584,25	94,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.712.288.789,05	1.603.377.144,00	93,64
Dinas Pemuda dan Olahraga	1.467.813.078,00	1.382.788.279,00	94,21
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.285.556.313,00	2.185.925.125,00	95,64
Dinas Pendidikan	127.135.466.131,90	125.091.245.346,02	98,39
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.414.449.106,00	2.961.552.932,00	86,74
Dinas Perhubungan	2.578.140.865,61	2.536.363.120,00	98,38
Dinas Perkebunan	2.797.557.968,00	2.504.073.676,00	89,51
Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.611.240.230,00	1.478.823.644,00	91,78
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.836.257.479,00	4.691.458.164,00	97,01
Dinas Sosial	9.402.367.460,00	8.824.391.894,00	93,85
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.801.980.841,00	4.551.267.675,00	78,44
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.678.382.502,75	1.598.217.908,00	95,22
Inspektorat	7.980.220.759,86	7.897.372.084,25	98,96
RSJ Kalawa Atei	6.706.259.981,00	5.742.716.578,00	85,63
RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	49.021.419.749,00	46.574.846.025,00	95,01
RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	87.736.641.454,00	94.147.985.754,00	107,31
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.525.078.486,95	2.197.955.031,00	87,05
Sekretariat DPRD	38.925.602.914,98	35.845.543.313,23	92,09
Satuan Polisi Pamong Praja	2.169.410.841,25	2.033.237.293,00	93,72
Jumlah	658.285.638.237,47	604.276.917.767,53	91,80

Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 29. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2020

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	37.753.217.893,40	34.746.525.997,83	92,04
Belanja Bahan/Material	34.248.212.504,00	32.686.809.974,00	95,44
Belanja Barang Dana BOS	95.707.390.000,00	100.782.635.231,02	105,30
Belanja Cetak dan Penggandaan	13.904.425.677,00	12.762.090.852,86	91,78
Belanja Jasa Kantor	113.066.413.416,62	86.748.158.584,25	76,72
Belanja Jasa Konsultansi	7.650.482.000,00	7.291.463.780,00	95,31
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.091.783.499,00	998.826.699,00	91,49
Belanja Makanan dan Minuman	23.125.735.731,00	20.121.710.387,00	87,01
Belanja Operasional BLUD	100.736.641.454,00	107.141.890.981,00	106,36
Belanja Operasional SDM PKH (Program Keluarga Harapan)	882.200.000,00	860.500.000,00	97,54
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	426.346.000,00	416.203.000,00	97,62
Belanja Pakaian Kerja	1.459.670.000,00	1.400.022.240,00	95,91
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.775.068.000,00	3.705.313.825,00	98,15
Belanja Pemeliharaan	33.122.508.990,65	32.497.439.646,22	98,11
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.019.044.823,00	12.944.770.252,40	71,84
Belanja Perjalanan Dinas	140.270.235.585,80	120.510.568.133,97	85,91
Belanja Premi Asuransi	20.919.718.861,00	19.596.283.253,98	93,67
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.186.905.500,00	1.966.253.000,00	89,91
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.539.260.000,00	6.024.395.864,00	79,91
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.378.302,00	1.075.056.065,00	44,79
Jumlah	658.285.638.237,47	604.276.917.767,53	91,80

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran 1.

Obyek Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas tidak termasuk Belanja Barang-Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga serta Belanja Barang - Belanja Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang direklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7.5.2.2.1.3. **Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi Belanja Subsidi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp1.122.859.000,00, sehingga terlihat realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.122.859.000,00 atau 100%.

7.5.2.2.1.4. **Belanja Hibah**

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.028.723.379.193,25 atau 96,72% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.063.602.486.508,38 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp34.879.107.315,13 atau 3,28%. Apabila realisasi Belanja Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp746.052.446.211,96, sehingga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp282.670.932.981,29 atau 37,89%, dengan rincian realisasi Belanja Hibah yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 30. Realisasi Belanja Hibah TA 2020

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	14.361.685.125,00	12.969.026.750,00	90,30
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	515.216.017.834,38	503.260.703.457,38	97,68
Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota....	0,00	466.211.790.000,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

Belanja Hibah Dana BOS ke SD	306.750.840.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOS ke SMP	154.755.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOS ke SMA	13.900.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOS ke SMK	12.000.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Kepada Pihak Ketiga	46.618.443.549,00	46.281.858.985,87	99,28
Jumlah	1.063.602.486.508,38	1.028.723.379.193,25	96,72

7.5.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.463.170.207,00 atau 89,89% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp21.652.500.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.189.329.793,00 atau 10,11%. Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp18.745.781.594,00, sehinga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp717.388.613,00 atau 3,83%, dengan rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 31. Rincian Obyek Belanja Bantuan Sosial TA 2020

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat	512.500.000,00	511.875.000,00	99,88
Belanja Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan	10.000.000.000,00	9.286.000.000,00	92,86
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	11.140.000.000,00	9.665.295.207,00	86,76
Jumlah	21.652.500.000,00	19.463.170.207,00	89,89

7.5.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.155.327.868.741,35	1.108.301.881.143,53

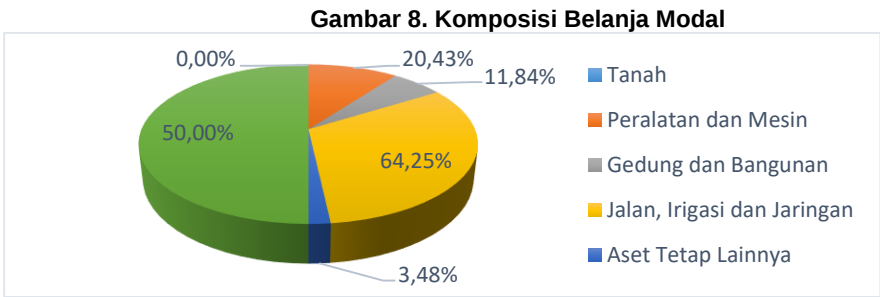
Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.155.327.868.741,35. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.108.301.881.143,53 atau 95,93%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp47.025.987.597,82 atau 4,07%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp1.293.574.792.335,57, sehinga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp185.272.911.192,04 atau 14,32%, realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 32. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi
Tanah	195.000.000,00	50.638.019,00	25,97	0,00
Peralatan dan Mesin	252.334.619.113,75	226.420.242.082,00	89,73	20,43
Gedung dan Bangunan	136.569.775.190,60	131.198.367.274,03	96,07	11,84

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi
Jalan, Irigasi dan Jaringan	713.022.785.177,00	711.922.419.210,51	99,85	64,24
Aset Tetap Lainnya	53.015.689.260,00	38.522.674.557,99	72,66	3,48
Aset Lainnya	190.000.000,00	187.540.000,00	98,71	0,02
Jumlah	1.155.327.868.741,35	1.108.301.881.143,53	95,93	100,00



7.5.2.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp195.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.638.019,00 atau 25,97%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal tanah yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp144.361.981,00 atau 74,03%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp4.149.872.800,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.099.234.781,00 atau 98,78%. Rincian obyek belanja modal tanah sebagai berikut.

Tabel 33. Rincian Obyek Belanja Modal Tanah TA 2020

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	150.000.000,00	10.856.200,00	7,24
Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	45.000.000,00	39.781.819,00	88,40
Jumlah	195.000.000,00	50.638.019,00	25,97

Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD sebagai berikut.

Tabel 34. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD TA 2020

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	150.000.000,00	10.856.200,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	45.000.000,00	39.781.819,00
Jumlah	195.000.000,00	50.638.019,00

7.5.2.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp252.334.619.113,75. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp226.420.242.082,00 atau 89,73%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp25.914.377.031,75 atau 10,27%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp193.455.529.421,60, sehinga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp32.964.712.660,40 atau 17,04%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 35. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengadaan Alat Pengangkat	385.000.000,00	344.958.000,00	89,60
Pengadaan Electric Generating Set	479.000.000,00	457.220.000,00	95,45
Pengadaan Pompa	2.459.282.500,00	2.421.970.100,00	98,48
Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	296.400.000,00	263.055.000,00	88,75
Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.631.215.000,00	1.719.840.000,00	37,14
Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.758.800.000,00	1.750.579.000,00	99,53
Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	503.105.000,00	481.000.000,00	95,61
Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	21.665.000.000,00	15.829.800.000,00	73,07
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.789.200.000,00	2.322.000.000,00	83,25
Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	1.567.300.000,00	1.544.570.000,00	98,55
Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	89.733.788,00	85.133.788,00	94,87
Pengadaan Alat Kalibrasi	497.591.885,00	495.029.485,00	99,49
Pengadaan Alat Ukur Lainnya	195.500.000,00	188.992.000,00	96,67
Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	15.741.000,00	15.641.000,00	99,36
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	11.000.000,00	10.600.000,00	96,36
Pengadaan Alat Penyimpanan	29.450.000,00	28.625.800,00	97,20
Pengadaan Alat Laboratorium	1.242.626.050,00	986.663.768,00	79,40
Pengadaan Mesin Ketik	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	68.085.000,00	61.493.000,00	90,32
Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	29.720.000,00	25.575.000,00	86,05
Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.879.118.000,00	2.141.763.500,00	113,98
Pengadaan Meubelair	4.692.625.200,00	4.380.574.200,00	93,35
Pengadaan Alat Pembersih	417.348.000,00	412.333.550,00	98,80
Pengadaan Alat Pendingin	2.463.928.800,00	2.379.715.500,00	96,58
Pengadaan Alat Dapur	350.094.000,00	260.535.000,00	74,42
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.564.847.000,00	3.600.281.310,00	100,99
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	6.818.000.000,00	5.813.006.000,00	85,26
Pengadaan Personal Komputer	85.769.547.025,75	77.030.389.661,00	89,81
Pengadaan Peralatan Personal Komputer	906.352.600,00	805.178.346,00	88,84
Pengadaan Meja Kerja Pejabat	169.500.000,00	168.722.500,00	99,54
Pengadaan Meja Rapat Pejabat	147.500.000,00	147.125.000,00	99,75
Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	89.600.000,00	87.469.000,00	97,62
Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	13.750.000,00	13.475.000,00	98,00
Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	28.300.000,00	28.250.000,00	99,82
Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.038.990.000,00	3.873.215.270,00	95,90
Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	254.835.000,00	243.900.000,00	95,71
Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	94.000.000,00	93.649.990,00	99,63
Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	53.640.000,00	53.600.000,00	99,93
Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	165.000.000,00	120.000.000,00	72,73
Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	411.580.000,00	398.275.900,00	96,77
Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.533.829.600,00	3.421.760.500,00	96,83
Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	15.000.000,00	0,00	0,00
Pengadaan Alat Farmasi	63.000.000,00	62.800.000,00	99,68
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	11.064.509.882,00	10.879.594.483,00	98,33
Pengadaan Mortuary	95.500.000,00	93.789.771,00	98,21
Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	319.800.000,00	252.620.000,00	78,99
Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	7.411.155.013,00	6.713.705.167,00	90,59
Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	100.000.000,00	43.395.000,00	43,40
Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	7.916.663.950,00	7.854.848.600,00	99,22
Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi	200.000.000,00	197.000.000,00	98,50
Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	617.000.000,00	605.554.000,00	98,14
Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	5.040.000.000,00	4.949.000.000,00	98,19
Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	720.000.000,00	688.000.000,00	95,56
Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	63.839.979.720,00	59.230.363.393,00	92,78
Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	42.700.000,00	41.250.000,00	96,60
Pengadaan Alat Keamanan	1.500.000,00	0,00	0,00
Pengadaan Alat Bantu Kemanan	308.675.100,00	299.355.500,00	96,98
Jumlah	252.334.619.113,75	226.420.242.082,00	89,73

Sedangkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut.

Tabel 36. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2020

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Badan Kepegawaian Daerah	101.150.000,00	101.150.000,00	100,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	953.611.038,00	918.092.888,00	96,28

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	4.132.415.000,00	4.115.172.600,00	99,58
Badan Pendapatan Daerah	1.072.393.000,00	984.819.000,00	91,83
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	342.403.900,00	338.339.050,00	98,81
Badan Penghubung	673.000.000,00	666.448.000,00	99,03
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	173.000.000,00	173.000.000,00	100,00
Biro Administrasi Pimpinan	200.000.000,00	199.600.000,00	99,80
Biro Umum	12.430.008.800,00	8.803.779.420,00	70,83
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	62.000.000,00	61.902.500,00	99,84
Dinas Kehutanan	34.491.400.000,00	26.982.575.000,00	78,23
Dinas Kelautan dan Perikanan	306.521.000,00	298.784.500,00	97,48
Dinas Kesehatan	9.454.652.848,00	9.212.291.860,00	97,44
Dinas Ketahanan Pangan	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	492.350.000,00	491.390.000,00	99,81
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	58.800.000,00	57.409.300,00	97,63
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	948.541.000,00	929.396.600,00	97,98
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.500.000,00	21.612.000,00	88,21
Dinas Pemuda dan Olahraga	16.500.000,00	16.400.000,00	99,39
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.000.000,00	84.654.000,00	99,59
Dinas Pendidikan	154.252.010.445,75	140.903.439.115,00	91,35
Dinas Perhubungan	179.619.000,00	179.400.000,00	99,88
Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.782.500,00	1.782.500,00	100,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	317.500.000,00	316.510.000,00	99,69
Dinas Sosial	793.655.000,00	712.643.000,00	89,79
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	260.500.000,00	257.204.000,00	98,73
Inspektorat	553.471.000,00	552.548.000,00	99,83
RSJ Kalawa Atei	885.909.000,00	807.340.021,00	91,13
RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	18.713.835.082,00	18.122.303.201,00	96,84
RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	7.694.290.500,00	7.490.149.527,00	97,35
Satuan Polisi Pamong Praja	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
Sekretariat DPRD	2.653.700.000,00	2.610.006.000,00	98,35
Jumlah	252.334.619.113,75	226.420.242.082,00	89,73

7.5.2.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2020 sebesar Rp131.198.367.274,03 atau 96,07% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp136.569.775.190,60. Hal ini berarti realisasi belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2020 mengalami penurunan dari tahun anggaran 2019 sebesar Rp88.762.880.443,41 atau 40,35%. Belanja modal bangunan dan gedung terdiri dari :

Tabel 37. Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	13.050.895.964,60	9.393.008.081,99	71,97
Pengadaan Bangunan Gudang	210.000.000,00	209.728.000,00	99,87
Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	2.323.315.118,00	2.114.325.800,00	91,00
Pengadaan Bangunan Kesehatan	260.000.000,00	256.828.000,00	98,78
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	988.425.408,00	702.000.000,00	71,02
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	117.018.636.700,00	116.068.615.850,00	99,19
Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00	98.004.500,00	98,00
Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandar	369.000.000,00	368.192.042,04	99,78
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	314.184.000,00	299.146.000,00	95,21
Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	98.800.000,00	98.780.000,00	99,98
Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	532.930.000,00	514.986.000,00	96,63
Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	350.768.000,00	123.583.000,00	35,23
Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	952.820.000,00	951.170.000,00	99,83
Jumlah	136.569.775.190,60	131.198.367.274,03	96,07

Sedangkan realisasi Belanja Modal per SKPD sebagai berikut.

Tabel 38. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2020

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Badan Kepegawaian Daerah	37.050.000,00	36.444.200,00	98,36
Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.340.680.408,00	2.231.211.680,39	95,32
Badan Pendapatan Daerah	224.777.075,00	224.359.128,00	99,81
Biro Umum	965.068.000,00	447.432.500,00	46,36
Dinas Kehutanan	9.045.372,60	9.045.372,60	100,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	326.280.000,00	306.192.000,00	93,84
Dinas Kesehatan	5.686.757.400,00	5.474.000.000,00	96,26
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.333.115.201,00	2.323.042.701,00	99,57
Dinas Pendidikan	117.198.636.700,00	116.248.515.850,00	99,19
Dinas Perhubungan	1.321.820.000,00	1.319.362.042,04	99,81
Dinas Perpustakaan dan Arsip	80.000.000,00	79.000.000,00	98,75
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.334.429.916,00	0,00	0,00
Inspektorat	210.000.000,00	209.728.000,00	99,87
RSJ Kalawa Atei	1.702.315.118,00	1.506.673.300,00	88,51
RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	677.000.000,00	660.580.500,00	97,57
Sekretariat DPRD	122.800.000,00	122.780.000,00	99,98
Jumlah	136.569.775.190,60	131.198.367.274,03	96,07

7.5.2.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp713.022.785.177,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp711.922.419.210,51 atau 99,85%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan tahun anggaran 2019 tercatat sebesar Rp841.913.017.817,98, sehingga terlihat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp129.990.598.607,47 atau 15,44%. Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan tersebut diantaranya :

Tabel 39. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengadaan Jalan	573.948.608.281,00	573.489.735.233,00	99,92
Pengadaan Jembatan	129.733.774.596,00	129.682.009.596,00	99,96
Pengadaan Bangunan Air Rawa	6.592.761.550,00	6.155.803.581,51	93,37
Pengadaan Bangunan Air	910.441.750,00	851.710.500,00	93,55
Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.520.096.000,00	1.463.452.000,00	96,27
Pengadaan Jaringan Listrik	317.103.000,00	279.708.300,00	88,21
Jumlah	713.022.785.177,00	711.922.419.210,51	99,85

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD sebagai berikut.

Tabel 40. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD TA 2020

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Badan Pendapatan Daerah	170.000.000,00	169.030.300,00	99,43
Dinas Pendidikan	198.686.750,00	198.500.000,00	99,91
Dinas Kehutanan	72.103.000,00	36.078.000,00	50,04
Inspektorat	75.000.000,00	74.600.000,00	99,47
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.209.085.000,00	1.136.902.500,00	94,03
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	711.297.910.427,00	710.307.308.410,51	99,86
Jumlah	713.022.785.177,00	711.922.419.210,51	99,85

7.5.2.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp53.015.689.260,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp38.522.674.557,99 atau 72,66%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran

2019 tercatat sebesar Rp33.901.359.578,55, sehingga terlihat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp4.621.314.979,44 atau 13,63%. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut diantaranya :

Tabel 41. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	26.867.390.000,00	12.531.814.540,00	46,64
Pengadaan Buku Laporan	173.000.000,00	169.895.000,00	98,21
Pengadaan Tanaman Hias	113.020.000,00	108.688.000,00	96,17
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	25.862.279.260,00	25.712.277.017,99	99,42
Jumlah	53.015.689.260,00	38.522.674.557,99	72,66

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD sebagai berikut.

Tabel 42. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD TA 2020

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	9.600.000,00	80,00
Dinas Pendidikan	48.343.162.200,00	34.007.586.740,00	70,35
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.583.507.060,00	3.438.771.317,99	95,96
Inspektorat	789.800.000,00	784.533.500,00	99,33
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173.000.000,00	169.895.000,00	98,21
Biro Umum	101.020.000,00	99.088.000,00	98,09
Jumlah	53.015.689.260,00	38.522.674.557,99	72,66

7.5.2.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2020 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp190.000.000,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp187.540.000,00 atau 98,71%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp193.765.000,00, sehingga terlihat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.225.000,00 atau 3,21%.

7.5.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	216.020.047.574,09	186.398.477.856,00

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid 19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk korban Terdampak Banjir di kabupaten. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp216.020.047.574,09. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp186.398.477.856,00 atau 86,29% sehingga sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp29.621.569.718,09 atau 13,71%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp4.382.839.850,00 sehingga terlihat realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp182.015.638.006,00 atau 4152,92%.

7.5.2.3. Transfer

Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	655.846.652.874,63	564.218.836.044,25

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer. Transfer adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp655.846.652.874,63. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp564.218.836.044,25 atau 86,03%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp91.627.816.830,38 atau 13,97%. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp751.187.658.351,98, sehingga terlihat realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp186.968.822.307,73 atau 24,88%. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020 diantaranya sebagai berikut.

7.5.2.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	620.554.652.874,63	555.738.836.044,25

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp620.554.652.874,63 yang direalisasikan sebesar Rp555.738.836.044,25 atau 89,56%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp158.851.274.324,73 atau 22,22% dibandingkan dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp714.590.110.368,98. Adapun realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada akun Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp555.738.836.044,25 atau 89,56% diberikan kepada:

Tabel 43. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2020

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Kota Palangka Raya	74.217.728.892,31
2.	Kabupaten Barito Utara	45.236.933.782,11
3.	Kabupaten Barito Selatan	30.248.150.579,04
4.	Kabupaten Kapuas	47.050.036.231,48
5.	Kabupaten Kotawaringin Timur	89.753.831.949,98
6.	Kabupaten Kotawaringin Barat	64.243.460.228,07
7.	Kabupaten Murung Raya	32.586.710.941,87
8.	Kabupaten Barito Timur	23.731.249.294,56
9.	Kabupaten Katingan	29.884.994.312,90
10.	Kabupaten Gunung Mas	25.993.613.452,77
11.	Kabupaten Seruyan	27.694.345.789,12
12.	Kabupaten Sukamara	18.313.290.645,20
13.	Kabupaten Lamandau	22.269.402.565,39
14.	Kabupaten Pulang Pisau	24.515.087.379,45
Jumlah		555.738.836.044,25

7.5.2.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	35.292.000.000,00	8.480.000.000,00

Transfer bantuan keuangan tahun 2020 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp35.292.000.000,00. Realisasi bantuan keuangan Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp8.480.000.000,00 atau 24,03%. Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp28.117.547.983,00 atau 76,82% dibandingkan dari realisasi tahun 2019 tercatat sebesar Rp36.597.547.983,00.

7.5.2.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00, sampai dengan akhir tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp900.000.000,00 atau 85,71%. sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp150.000.000,00 atau 14,28%. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp25.900.000.000,00, sehingga terlihat realisasi transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 96,52%. Realisasi tersebut bersumber dari Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota diantaranya adalah:

7.5.2.3.2.1.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi

Transfer bantuan keuangan ke provinsi pada tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan dalam APBD.

7.5.2.3.2.1.2. Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota

Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 telah direalisasikan sebesar Rp900.000.000,00 atau 85,71%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp150.000.000,00 atau 14,28%. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp25.900.000.000,00, sehingga terlihat realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 96,52%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota tersebut terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan Dalam Rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) sebesar Rp900.000.000,00 atau 85,71%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp150.000.000,00;
- b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam rangka Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp150.000.000,00;
- c. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam rangka Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp150.000.000,00;
- d. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rangka Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp150.000.000,00;
- e. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam rangka Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp150.000.000,00; dan
- f. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp150.000.000,00.

7.5.2.3.2.2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah, untuk Tahun Anggaran 2019 terealisasikan sebesar Rp1.377.047.983,00 yang peruntukannya untuk partai politik.

7.5.2.3.2.3. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke pemerintahan desa Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp34.242.000.000,00 terdiri dari Transfer Bantuan

Keuangan kepada Pemerintah desa/Kelurahan (lomba Desa/Kelurahan) sebesar Rp7.750.000.000,00 dan insentif Damang, Sekretaris Damang dan Mantir sebesar Rp26.492.000.000,00, sampai dengan akhir tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp7.580.000.000,00 atau 22,14%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp26.662.000.000,00 atau 77,86%. Dibandingkan dengan realisasi Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemeritahan Desa Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp9.320.500.000,00, sehingga terlihat Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemeritahan Desa Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.740.500.000,00 atau 18,67%. Adapun realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemeritahan Desa Tahun Anggaran 2020 dirinci sebagai berikut.

Tabel 44 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemerintah Desa/Kelurahan (Lomba Desa/Kelurahan)	7.750.000.000,00	2.100.000.000,00	27,10
2.	Insentif Damang, Sekretaris Damang dan Mantir Ub Januari sd Desember 2020	26.492.000.000,00	5.480.000.000,00	20,69
	Jumlah	34.242.000.000,00	7.580.000.000,00	22,14

7.5.2.4. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(611.326.980.587,84)	(264.010.282.308,32)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp264.010.282.308,32 atau 43,19% sedangkan pada APBD 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar Rp73.947.168.773,15.

7.5.2.5. Pembiayaan

Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	611.326.980.587,84	610.945.412.699,44

Realisasi pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp610.945.412.699,44 atau 99,94% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp611.326.980.587,84. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.2.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp610.945.412.699,44 atau 99,94% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp611.326.980.587,84. Nilai tersebut diperoleh dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp611.326.980.587,84 dan dikurangi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp381.567.888,40.

7.5.2.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal/investasi pemerintah daerah pada BUMD pada Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	346.935.130.391,12

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat SiLPA sebesar Rp346.935.130.391,12. Rincian pembentuk SiLPA tahun 2020

berasal dari Pelampauan Pendapatan sebesar Rp4.767.014.514.749,24, realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp4.466.805.961.013,31, realisasi transfer dibawah pagu sebesar Rp564.218.836.044,25, dan realisasi penerimaan pembiayaan diatas pagu sebesar Rp610.945.412.699,44, dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu sebesar Rp0,00 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 45. SiLPA

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelampauan Pendapatan	4.816.639.952.634,00	4.767.014.514.749,24
2.	Realisasi belanja di bawah pagu	4.772.120.280.347,21	4.466.805.961.013,31
3.	Realisasi Transfer di Bawah Pagu	655.846.652.874,63	564.218.836.044,25
4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan diatas Pagu	611.326.980.587,84	610.945.412.699,44
5.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	346.935.130.391,12

Selain realisasi pendapatan dari APBD sebesar Rp4.767.014.514.749,24 dan realisasi belanja dari APBD sebesar Rp4.466.805.961.013,31. Pemerintah provinsi mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp278.816.829.000,00, realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp259.055.379.140,00 atau 92,91%.

7.5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan SAL

7.5.3.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	611.326.980.587,84	698.702.677.095,42

Saldo Anggaran Lebih Awal Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2020 sebesar Rp611.326.980.587,84.

7.5.3.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	610.945.412.699,44	690.274.149.360,98

Merupakan SAL yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Tahun 2020 Penggunaan SAL sebesar Rp610.945.412.699,44. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp79.328.736.661,54 atau 11,49%.

7.5.3.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	346.935.130.391,12	611.326.980.587,84

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp347.316.698.279,52 berasal dari sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp346.935.130.391,12 ditambah dengan sisa Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp611.326.980.587,84 dikurangi dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp610.945.412.699,44.

7.5.3.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	(381.567.888,40)	28.245.320,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi SiLPA yang merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp429.865,00, RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) sebesar (Rp112.371.000,00), dan PPKD sebesar (Rp269.626.753,40) sehingga jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya yang tercatat di Tahun 2020 sebesar (Rp381.567.888,40), sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini.

Table 46. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

SKPD	Uraian	2020 (Rp)
Dinas Pendidikan	Koreksi saldo awal (CTA) berupa penambahan saldo kas di Bendahara BOS disebabkan kesalahan pencatatan pada tahun sebelumnya	410.140,00
	Koreksi saldo awal (CTA) berupa pengurangan saldo kas di Bendahara BOS disebabkan kesalahan pencatatan pada tahun sebelumnya	(275,00)
	Koreksi saldo awal (CTA) berupa penambahan saldo kas di Bendahara BOS disebabkan kesalahan pencatatan pada tahun sebelumnya (SMK 2 Bulik Timur)	20.000,00
RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	Koreksi pengembalian dana yang salah masuk dari Dinas Kesehatan Pulang Pisau, yang seharusnya masuk ke RSUD Pulang Pisau	(112.371.000,00)
PPKD	Koreksi kesalahan tahun sebelumnya	(269.626.753,40)
Jumlah		(381.567.888,40)

7.5.3.5. Lain-lain

Lain-lain	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
-----------	--------------------------	--------------------------

	0,00	(8.456.773.054,44)
--	------	--------------------

Lain-lain merupakan koreksi SILPA yang bukan merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya.

7.5.3.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	346.935.130.391,12	611.326.980.587,84

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2020 sebesar Rp346.935.130.391,12 turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp264.391.850.196,71 atau 43,24%.

7.5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2020 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2020.

7.5.4.1. Aset

Aset	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	11.033.816.316.776,89	11.697.945.573.177,84

Saldo Aset per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp11.033.816.316.776,89 dan Rp11.697.945.573.177,84 atau terdapat penurunan sebesar 5,68%.

7.5.4.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	911.615.100.626,66	1.092.246.201.178,32

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp911.615.100.626,66 dan Rp1.092.246.201.178,32.

7.5.4.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	276.735.299.340,20	538.378.995.565,51

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp281.924.183.120,06 berada pada kas di rekening kas umum daerah di PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor 0100-001-000005278-7 yang karena perubahan pada sistem Bank Pembangunan Kalimantan Tengah disesuaikan menjadi Nomor 100-010-100-5004. Menurut Rekonsiliasi Bank Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat selisih antara Saldo Kas Umum Daerah per 31 Desember 2020 menurut Buku dengan Rekening Giro Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat saldo Kas Umum Daerah tersebut sebagai Kas di Kas Daerah sebesar Rp276.735.299.340,20 dan Kas Yang Dibatasi Penggunaanya sebesar Rp5.188.883.779,86.

7.5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara Penerimaan pada SKPD.

7.5.4.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	0,00	590.256.332,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp590.256.332,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara pengeluaran pada SKPD.

7.5.4.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	60.362.374.642,53	33.930.446.733,32

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp60.362.374.642,53 dan Rp33.930.446.733,32.

7.5.4.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	3.844.736.884,53	32.863.217.775,75

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.844.736.884,53 dengan rincian sebagai berikut :

Table 47. Kas di Bendahara BOS		
NO	NAMA SEKOLAH	31 Desember 2020 (Rp)
1	SLB NEGERI 1 BUNTOK	95.661,00
2	SLBN 1 MUARA TEWEH	99.430,00
3	SLB NEGERI 2 SELAT	26.696.934,00
4	SLBN 1 PALANGKA RAYA	46.230,00
5	SLB NEGERI 1 PANGKALAN BUN	100.000,00
6	SLB NEGERI 2 PANGKALAN BUN	1.999.750,00
7	SLBN PURUKCAHU	465.134,00
8	SMAN 1 DUSUN TENGAH	33.620.000,00
9	SMAN 2 PAJU EPAT	2.700.000,00
10	SMAN 1 PAJU EPAT	11.120.000,00
11	SMAN 4 MUARA TEWEH	24.450.000,00
12	SMAN 1 TEWAH	968.687,00
13	SMAN 1 RUNGAN	6.980.000,00
14	SMAN 1 MANUHING	769.700,00
15	SMA NEGERI 1 MIHING RAYA	34.397,00
16	SMAN 1 MIRI MANASA	58.969,00
17	SMAN 1 KAPUAS HILIR	450.000,00
18	SMAN 1 PULAU PETAK	18.478.000,00
19	SMAN 1 MANTANGAI	210.519.400,00
20	SMAN 2 TIMPAH	13.000.000,00
21	SMAN 2 KATINGAN KUALA	141.575.700,00
22	SMAN 1 TASIK PAYAWAN	590.000,00
23	SMAN 1 KATINGAN HILIR	10.168.000,00
24	SMAN 2 KATINGAN HILIR	9.585.000,00
25	SMAN 1 PULAU MALAN	171.300,00
26	SMAN 1 KATINGAN HULU	1.350.000,00
27	SMAN 1 PETAK MALAI	72.279.600,00
28	SMAN 1 PALANGKA RAYA	107.537.364,00
29	SMAN 6 PALANGKA RAYA	2.480.959,00
30	SMAN 4 PALANGKA RAYA	11.613.026,00
31	SMAN 10 PALANGKA RAYA	2.530,00
32	SMAN 1 KOTAWARINGIN LAMA	18.722.776,00
33	SMAN 3 PANGKALAN BUN	9.336.900,00
34	SMAN 1 KUMAI	45.196.925,00
35	SMAN 1 SAMPIT	27.080.626,00
36	SMAN 3 SAMPIT	77.447.744,73
37	SMAN 1 ANTANG KALANG	17.320.000,00
38	SMAN 2 LAMANDAU	72.000.000,00
39	SMAN 2 MURUNG	270.000,00
40	SMAN 3 MURUNG	720.000,00
41	SMAN 5 TANAH SIANG	84.150.000,00
42	SMAN 2 TANAH SIANG	26.100.000,00
43	SMAN 3 TANAH SIANG	60.000.000,00
44	SMAN 1 KAHAYAN KUALA	611.306,00
45	SMAN 1 KAHAYAN HILIR	1.135.300,00
46	SMAN 1 DANAU SELULUK	72.400,00
47	SMAN 1 SUKAMARA	4.153.385,00

NO	NAMA SEKOLAH	31 Desember 2020 (Rp)
48	SMKN 1 BUNTOK	40.019.172,00
49	SMKN 2 TAMIANG LAYANG	10.080.000,00
50	SMKN 1 PAKU	176.257,80
51	SMKN 1 RUNGAN HULU	20.000,00
52	SMKN 3 KUALA KAPUAS	199.318.498,00
53	SMKN 1 KAPUAS MURUNG	98.000,00
54	SMKN 1 MANDAU TALAWANG	20.000,00
55	SMKN 1 SANAMAN MANTIKEI	162.240.000,00
56	SMKN 1 KATINGAN KUALA	4.865.000,00
57	SMKN 1 PALANGKA RAYA	340.000.000,00
58	SMKN 3 PALANGKA RAYA	88.118.953,00
59	SMKN 1 PANGKALAN BUN	127.667.200,00
60	SMKN 1 PANGKALAN BANTENG	130.160.000,00
61	SMKN 2 SAMPIT	504.363.108,00
62	SMKN 3 SAMPIT	388.400.000,00
63	SMKN 4 SAMPIT	146.138.233,00
64	SMKN 1 BUKIT SANTUAI	344,00
65	SMKN 1 MENTAYA HULU	500.000,00
66	SMKN 1 ANTANG KALANG	343.000,00
67	SMKN 1 PULAU HANAUT	79.680.000,00
68	SMKN 1 CEMPAGA	226.166.200,00
69	SMKN 1 SEMATU JAYA	60.000.000,00
70	SMKN 2 BULIK TIMUR	140.000,00
71	SMKN 1 BATANG KAWA	20.000,00
72	SMKN 1 KAHAYAN HILIR	90.538.450,00
73	SMKN 1 SEBANGAU KUALA	57.920.000,00
74	SMKN 1 HANAU	11.721.335,00
75	SMKN 1 SUKAMARA	21.000.000,00
76	SMKN 1 KOTAWARINGIN LAMA	700.000,00
	Jumlah	3.844.736.884,53

7.5.4.1.1.6. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	5.188.883.779,86	5.294.437.427,86

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.188.883.779,86 dan Rp5.294.437.427,86. Terdiri dari:

Tabel 48. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Koreksi atas kesalahan posting STS oleh PT. Bank Kalteng	0,00	105.553.648,00
Sisa Dana Bos Kurang Salur	5.173.840.000,00	5.173.840.000,00
Jasa Giro dari rekening bukan milik Pemprov	5.775.364,00	5.775.364,00
Pengembalian bunga SD dan SMP	6.409.913,96	6.409.913,96
Pengembalian sisa dana Bos SD dan SMP	2.858.501,90	2.858.501,90
Jumlah	5.188.883.779,86	5.294.437.427,86

7.5.4.1.1.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	804.681.906,00	108.984.109,00

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp804.681.906,00 terdiri dari Dinas Pendidikan Rp7.002.876,00 berupa kas yang berada di sekolah selain dana BOS; RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) Rp846.162,00 berupa utang PFK atas BPJS Ketenagakerjaan yang telah disetorkan pada tanggal 30 Maret 2021; Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Rp777.413.990,00 berupa sisa dana BTT penanganan COVID-19 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 22 Juni 2021; dan Biro Administrasi Pimpinan Rp19.418.878,00 berupa sisa dana BTT penanganan COVID-19 yang telah disetorkan pada tanggal 17 Juni 2021.

7.5.4.1.1.8 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
--------------------	-----------------------	-----------------------

	50.255.029.479,49	81.077.842.806,00
--	-------------------	-------------------

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp50.255.029.479,49 dan Rp81.077.842.806,00 terdiri dari:

Tabel 49. Rekapitulasi Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Piutang Pajak	33.448.455.527,49	47.160.066.218,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	621.241.348,00	937.726.965,00
Piutang Lain lain PAD yang sah	15.589.020.024,00	32.138.737.043,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	490.000.000,00	735.000.000,00
Piutang Pendapatan Lainnya	106.312.580,00	106.312.580,00
Jumlah	50.255.029.479,49	81.077.842.806,00

7.5.4.1.1.8.1. Piutang Pajak

Merupakan Piutang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah berupa Pajak Alat-alat Berat/Besar perusahaan sebesar Rp95.159.000,00 dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp33.353.296.527,49, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 50. Rincian Pajak Alat-alat Berat/Besar perusahaan

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
PT Bebe Trijaya Barutama	95.159.000,00	105.159.000,00
PT Artha Ariesta Anthaloka	0,00	149.875.000,00
Jumlah	95.159.000,00	255.034.000,00

Sedangkan rincian Piutang PBBKB sebagai berikut.

Tabel 51. Rincian Piutang PBBKB

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Pertamina	26.929.868.832,00	34.299.261.790,00
AKR	786.085.310,00	2.106.745.817,00
Petro Andalan Nusantara	1.850.003.284,00	3.092.437.327,00
Pertamina Patra Niaga	1.973.638.180,00	3.356.923.726,00
Global Arta Borneo	9.642.750,00	923.031.940,00
Petro Putra Perkasa	73.302.282,00	98.934.750,00
Elnusa Petrofin	28.889.875,00	84.978.877,00
Sinar Alam Duta Perdana II	364.063.958,00	887.009.099,00
Pro Energi Indonesia	186.490.878,00	29.282.852,00
Titu Perkasa Energi	0,00	23.215.800,00
Jagad Nusantara Energy	21.098.250,00	97.089.937,00
Andifa Perkasa Energi	16.464.000,00	19.535.250,00
Samudera Etam Energi	21.825.000,00	30.263.000,00
Ganani Indonesia	13.580.888,00	26.694.000,00
Apexindo Pacific	0,00	378.621.014,00
Ocean Indo Energy	113.931.421,49	192.481.500,00
Kalimantan Sumber Energy	6.255.323,00	76.278.750,00
Resha Rabby Lestari	163.332.848,00	58.244.321,00
Sanmaru Indo Energi	0,00	11.340.000,00
Global Borneo Energy	667.485.820,00	1.112.662.468,00
Masinton Abadi Sentosa	18.344.625,00	0,00
Indo Lautan Energi	108.993.003,00	0,00
Jumlah	33.353.296.527,49	46.905.032.218,00

7.5.4.1.1.8.2 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Piutang Layanan Kesehatan dari Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei sebesar Rp279.480.368,00 dan Piutang Sewa Rumah Dinas Golongan II dan III sebesar Rp341.760.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52. Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
RSUD dr.Doris Sylvanus	0,00	2.570.400,00
RSJ Kalawa Atei	279.480.368,00	646.355.881,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.094.592,00	36.986.592,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.260.000,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	22.896.000,00	10.908.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	223.178.028,00	208.940.052,00
Dinas Kehutanan	48.332.360,00	31.966.040,00
Biro Umum	18.000.000,00	0,00
Jumlah	621.241.348,00	937.726.965,00

7.5.4.1.1.8.3. Piutang Lain lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Retribusi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan RSUD Doris Sylvanus (BLUD) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53. Rincian Piutang Lain – lain PAD yang Sah

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
RSUD dr.Doris Sylvanus (BLUD)	15.516.519.849,00	32.017.842.068,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.200,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	72.474.975,00	120.894.975,00
Jumlah	15.589.020.024,00	32.138.737.043,00

7.5.4.1.1.8.4. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp490.000.000,00 dan Rp735.000.000,00. Piutang transfer tersebut merupakan Piutang Transfer Transponder Kabupaten pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp490.000.000,00 terdiri dari :

- a. Pembayaran piutang pendanaan bersama transponder dari kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 sebesar Rp245.000.000,00; dan
- b. Pembayaran piutang pendanaan bersama transponder dari kabupaten Kapuas Tahun 2019 sebesar Rp245.000.000,00.

Tabel 54. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Pemkab Pulang Pisau	245.000.000,00	245.000.000,00
Pemkab Kapuas	245.000.000,00	245.000.000,00
Pemkab Murung Raya	0,00	245.000.000,00
Jumlah	490.000.000,00	735.000.000,00

7.5.4.1.1.8.5. Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp106.312.580,00 dan Rp106.312.580,00. Piutang pendapatan lainnya tersebut merupakan Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Tahun 2019 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp106.312.580,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 55. Rincian Piutang Pendapatan Lainnya

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Badan Keuangan dan Aset Daerah:		
Ny. ARONA SOFIA	820.000,00	820.000,00
EMELI TINDUH TUMON, BA	1.680.000,00	1.680.000,00
ASTINUS Y. ANGGEN, SH	1.155.000,00	1.155.000,00
H. S. A. FAWZY ZAIN B, BA	18.460.000,00	18.460.000,00
Ny. EMMY DJURNALIS (Janda Alm. DJURNALIS)	10.500.000,00	10.500.000,00
MARIANI BAWAN	987.000,00	987.000,00
KOMARUDIN	760.000,00	760.000,00
TUKIMAN	950.000,00	950.000,00
Y A P E T	1.100.000,00	1.100.000,00
AGAU TERSON	1.325.000,00	1.325.000,00
UHING	1.035.000,00	1.035.000,00

HARUM Y. SALEH	820.000,00	820.000,00
SUDARTO	907.970,00	907.970,00
Drs. YETRO Y. BAKRIE	1.274.000,00	1.274.000,00
UPING	462.060,00	462.060,00
SUYADI, SH	1.127.000,00	1.127.000,00
Drs. M. AMIN SUHAIMI	1.400.000,00	1.400.000,00
MONHERY E. LUDHIN	663.000,00	663.000,00
ADI DHARSONO, BSc	735.000,00	735.000,00
ABDUL MUKTI	731.000,00	731.000,00
K A D I S	1.197.000,00	1.197.000,00
SUHARIYADI	1.170.000,00	1.170.000,00
H. MASNIAH	580.200,00	580.200,00
IPIN, SH	1.700.000,00	1.700.000,00
ENDAH DWI WACHYUNI, SH	0,00	0,00
YUSWADIE	720.195,00	720.195,00
AN. YUNATAN	2.836.800,00	2.836.800,00
AN. SUMARDI	1.604.000,00	1.604.000,00
AN. KARIANI	2.089.100,00	2.089.100,00
AN. BURHANUDIN	2.387.300,00	2.387.300,00
An. NAGAENTAR I. SALOH, BE., SE	8.200.000,00	8.200.000,00
An. LAUTJE K. LAMAN, BA	1.920.000,00	1.920.000,00
BERDI	8.841.000,00	8.841.000,00
Drs. MISRANI INAS	1.483.200,00	1.483.200,00
EDDY POLO A.T.DESE	3.666.800,00	3.666.800,00
BAMBANG DARYADIE, SE	3.749.200,00	3.749.200,00
Drs. J.J KOETIN	17.275.755,00	17.275.755,00
Jumlah	106.312.580,00	106.312.580,00

7.5.4.1.1.9. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	466.166.718,00	764.274.818,00

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp466.166.718,00 dan Rp764.274.818,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

7.5.4.1.1.9.1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 sebesar Rp324.395.947,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp622.504.047,00 merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas yang jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

- 1) Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap II berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 012/310/BP tanggal 24 Desember 1998;
- 2) Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap III berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 346 Tahun 2013 tanggal 23 September 2002;
- 3) Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap IV berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/275/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
- 4) Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap V berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/706/2014 tanggal 12 Desember 2014.

7.5.4.1.1.9.2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang tercatat per 31 Desember 2020 sebesar Rp141.770.771,00 yang terdapat pada PPKD sebesar Rp137.238.535,00 dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tercatat sebesar Rp4.532.236,00.

Tabel 56. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	SKPD	Kasus	31 Des 2020 (Rp)	Keterangan
1	PPKD	Sisa UP	85.580.000,00	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan bukan bendahara Berdasarkan LHP Khusus

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

		Pajak belum disetor ke Kas Negara	51.658.535,00	Inpespektorat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/56/LHP-K/2016/INSP Tanggal 11 Agustus 2016.
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Ganti Uang Tunjangan Anak 2018 dan 2019	4.532.236,00	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas Ganti Uang Tunjangan Anak 2018 dan 2019
Jumlah			141.770.771,00	

7.5.4.1.1.10. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	(10.573.621.951,49)	(18.666.526.190,79)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp10.573.621.951,49) dan (Rp18.666.526.190,79), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 57. Rekapitulasi Penyisihan Piutang

No	Jenis Piutang	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(176.282.382,64)	(489.559.161,09)
	- Badan Pendapatan Daerah	(176.282.382,64)	(489.559.161,09)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(233.224.929,53)	(200.147.687,00)
	- RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	(0,00)	(12.852,00)
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(26.577.192,00)	(24.746.592,00)
	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(358.050,00)	(0,00)
	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(17.315.325,00)	(545.400,00)
	- Dinas Kehutanan	(13.327.668,00)	(6.485.244,00)
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(166.646.694,53)	(168.357.599,00)
	- Biro Umum	(9.000.000,00)	(0,00)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(9.599.999.166,72)	(17.236.379.400,10)
	- RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	(9.599.999.166,72)	(17.236.379.400,10)
4.	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(316.032.122,00)	(496.435.604,00)
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(316.032.122,00)	(496.435.604,00)
5.	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	(141.770.770,60)	(137.691.758,60)
	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(4.532.235,60)	(453.223,60)
	- PPKD	(137.238.535,00)	(137.238.535,00)
6.	Penyisihan Piutang Lain-lain Penjualan Kendaraan Dinas	(106.312.580,00)	(106.312.580,00)
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(106.312.580,00)	(106.312.580,00)
Jumlah		(10.573.621.951,49)	(18.666.526.190,79)

7.5.4.1.1.11. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	401.209.837,16	402.231.803,50

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2020 yang belum menjadi beban pada periode TA 2020 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp401.209.837,16 dan Rp402.231.803,50.

Tabel 58. Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Beban Jasa Dibayar Dimuka	388.383.999,16	398.438.910,50
2	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	12.825.838,00	3.792.893,00
	Jumlah	401.209.837,16	402.231.803,50

Rincian per SKPD disajikan dalam Lampiran 2.

7.5.4.1.1.12. Persediaan

Persediaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	524.130.339.990,38	417.502.039.998,17

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp524.130.339.990,38 dan Rp417.502.039.998,17, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 59. Rekapitulasi Persediaan

No.	Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	138.401.953,00	96.687.825,00
2	Alat Listrik dan Elektronik	4.200.000,00	15.230.000,00
3	Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.098.000,00	4.098.000,00
4	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	450.292.450,00	15.021.250,00
5	Bahan Habis Pakai Lainnya	2.532.834.125,29	6.781.300,00
6	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	112.860.000,00
7	Obat-obatan	43.284.668.940,40	28.295.475.926,70
8	Bahan Kimia	0,00	0,00
9	Bahan Makanan Pokok	67.831.700,00	10.652.800,00
10	Perlengkapan Laboratorium	2.074.846.244,92	705.584.032,68
11	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	0,00
12	Alat Rumah Tangga	31.224.000,00	31.224.000,00
13	Persediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00
14	Barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga	471.412.199.313,25	382.976.336.650,99
15	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	228.778.036,52	4.216.761.200,80
16	Cetak	1.285.978.497,00	1.015.327.012,00
17	Pengadaan	0,00	0,00
18	Persediaan Pakaian Kerja Lapangan	2.491.936.730,00	0,00
19	Persediaan Bahan Material Lainnya	126.050.000,00	0,00
20	Jumlah	524.130.339.990,38	417.502.039.998,17

Rincian persediaan per jenis dan per SKPD sebagai berikut.

Tabel 60. Persediaan per Jenis dan per SKPD

Jenis Persediaan	SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Persediaan Bahan Pakai Habis	Badan Kepegawaian Daerah	1.459.400,00	1.033.600,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	1.544.486.025,29	1.793.000,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	943.800,00	1.298.200,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Badan Penghubung	1.665.000,00	12.134.800,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Biro Umum	27.175.500,00	10.158.000,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.493.000,00	4.292.500,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.965.100,00	6.875.000,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Kesehatan	13.702.250,00	22.432.250,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	398.000,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.569.600,00	5.695.650,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	14.600.400,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	975.000,00	2.894.800,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.690.600,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Pendidikan	4.877.653,00	7.221.650,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.025.000,00	560.000,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

Jenis Persediaan	SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Perkebunan	0,00	0,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Perpustakaan dan Arsip	350.000,00	0,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Sosial	114.925.250,00	3.619.425,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	962.500,00	1.109.200,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Inspektorat	14.370.700,00	17.651.500,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	RSJ Kalawa Atei	5.800.000,00	0,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	708.610.850,00	13.833.500,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	108.856.900,00	6.781.300,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Sekretariat DPRD	16.625.000,00	1.745.000,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	Dinas Kehutanan	544.988.000,00	0,00
Jumlah Persediaan Bahan Pakai Habis		3.126.826.528,29	137.818.375,00
Persediaan Bahan/Material	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	218.240.375,00	0,00
Persediaan Bahan/Material	Dinas Kehutanan	31.224.000,00	31.224.000,00
Persediaan Bahan/Material	Dinas Kesehatan	17.745.894.632,92	10.006.900.642,18
Persediaan Bahan/Material	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	177.550.000,00	0,00
Persediaan Bahan/Material	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
Persediaan Bahan/Material	Dinas Perkebunan	0,00	112.860.000,00
Persediaan Bahan/Material	RSJ Kalawa Atei	1.101.727.774,37	516.508.034,20
Persediaan Bahan/Material	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	23.294.228.877,03	18.475.564.583,00
Persediaan Bahan/Material	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	5.496.529.120,00	0,00
Persediaan Bahan/Material	Sekretariat DPRD	11.162.836,00	12.739.500,00
Jumlah Persediaan Bahan/Material		48.076.557.615,32	29.155.796.759,38
Persediaan Barang Lainnya	Dinas Kehutanan	0,00	3.455.157.800,00
Persediaan Barang Lainnya	Dinas Kesehatan	617.398.000,00	831.903.372,64
Persediaan Barang Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	81.235.036,52	761.603.400,80
Persediaan Barang Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Persediaan Barang Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	448.828.128.571,95	364.085.498.564,95
Persediaan Barang Lainnya	Dinas Pendidikan	21.966.672.741,30	18.058.934.713,40
Persediaan Barang Lainnya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00
Persediaan Barang Lainnya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	147.543.000,00	0,00
Jumlah Persediaan Barang Lainnya		471.640.977.349,77	387.193.097.851,79
Persediaan Cetak dan Penggandaan	Badan Pendapatan Daerah	1.269.850.997,00	966.507.012,00
Persediaan Cetak dan Penggandaan	Badan Penghubung	0,00	1.395.000,00
Persediaan Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	0,00	35.350.000,00
Persediaan Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.840.000,00	8.850.000,00
Persediaan Cetak dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00
Persediaan Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	512.500,00	3.225.000,00
Persediaan Cetak dan Penggandaan	Biro Umum	13.775.000,00	0,00
Jumlah Persediaan Cetak dan Penggandaan		1.285.978.497,00	1.015.327.012,00
Total		524.130.339.990,38	417.502.039.998,17

7.5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	740.853.312.655,11	730.815.719.069,25

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp740.853.312.655,11 dan Rp730.815.719.069,25.

7.5.4.1.2.1. Investasi Permanen

Investasi Permanen	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	740.853.312.655,11	730.815.719.069,25

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp740.853.312.655,11 dan Rp730.815.719.069,25 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah pada tiga BUMD di wilayah Kalimantan Tengah.

7.5.4.1.2.1.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 61. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	PD Banama Tingang Makmur	1.012.569.108,00	1.012.569.108,00
2.	PT Bank Pembangunan Kalteng	685.413.994.186,94	676.548.262.868,11
3.	PT Jamkrida	54.426.749.360,17	53.254.887.093,14
	Jumlah	740.853.312.655,11	730.815.719.069,25

Penyertaan Modal per 31 Desember 2020 terdiri atas:

- a. PD Banama Tingang Makmur merupakan perusahaan daerah yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994. Kepemilikan atas perusahaan 100% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pencatatan penyertaan modal dalam Neraca berdasarkan metode ekuitas. Laporan Keuangan PD Banama Tingang Makmur Tahun Buku 2019 (*Unaudited*) menyajikan nilai ekuitas bersih perusahaan sebesar Rp1.012.569.108,00 sehingga Nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.012.569.108,00 (100% x Rp1.012.569.108,00). Penyertaan Modal pada PD Banama Tingang Makmur belum didukung dengan bukti kepemilikan dalam bentuk lembar saham.
- b. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari perusahaan daerah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyetorkan modalnya ke Bank Kalteng s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp 400.000.000.000,00 atau 100 % dari jumlah penyertaan modal daerah menurut Perda Nomor 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp.400.000.000.000.
 Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah sebesar 42,55 % dari total modal yang sudah disetor oleh pemegang saham (Rp400.000.000.000,00/Rp940.130.000.000,00). Dengan kepemilikan sebesar 42,55% Pemerintah Provinsi mencatat Investasi Penyertaan Modal pada Bank Kalteng dengan metode ekuitas.
 Hasil Rekalkulasi Nilai Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Buku 2019 diperoleh nilai Investasi Rp676.548.262.868,11. Laba bersih PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Buku 2019 adalah sebesar Rp207.373.990.723,00 sehingga Bagian Laba Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebesar Rp88.232.049.066,83 (42,55% x Rp207.373.990.723,00).
 Deviden yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp79.366.317.748,00, sehingga Nilai Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah sebesar

Rp685.413.994.186,94 (Rp676.548.262.868,11+ Rp88.232.049.066,83 - Rp79.366.317.748,00).

Atas Penyertaan Modal pada Bank Kalteng telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan Investasi berupa lembar saham sebanyak 4.001 lembar dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000.000,00 yang terdiri dari Surat Saham Nomor A.53.184 s.d. A57.184.

- c. PT Jamkrida Kalimantan Tengah didirikan berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 dan Perda Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2013, serta Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 2 April 2014 Pendirian PT oleh Notaris Ellys Nathalina, SH,MH.

Pemerintah Provinsi telah menyetorkan modalnya ke PT Jamkrida sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp 49.500.000.000,00.

Persentase Kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada PT Jamkrida tercatat sebesar 57,22% dari total modal yang sudah disetor oleh pemegang saham (Rp49.500.000.000,00 / Rp86.510.000.000,00). Dengan kepemilikan sebesar 57,22%, Pemerintah Provinsi mencatat investasi per 31 Desember 2019 dengan metode ekuitas.

Hasil Rekalkulasi Nilai Investasi pada PT Jamkrida Tahun Buku 2019 diperoleh nilai Investasi Rp53.254.887.093,13. Laba bersih PT Jamkrida Tahun Buku 2019 adalah sebesar Rp2.048.036.459,00 sehingga Bagian Laba Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.171.862.267,03 (57,22% x Rp2.048.036.459,00).

Deviden yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp0,00, sehingga Nilai Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada PT Jamkrida Tahun 2020 adalah sebesar Rp54.426.749.360,16 (Rp53.254.887.093,13 + Rp0,00 + Rp1.171.862.267,03).

Atas Penyertaan Modal pada PT Jamkrida telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan Investasi berupa lembar saham sebanyak 4.950 lembar dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000.000,00 yang terdiri dari:

- Surat Kolektif saham Nomor 01/16/01 untuk Saham Seri Nomor 00001 s.d. 02500 (2.500 lembar);
- Surat Kolektif saham Nomor 01/16/02 untuk Saham Seri Nomor 02702 s.d. 05151 (2.450 lembar).

7.5.4.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	8.839.803.503.816,18	8.512.184.608.681,85

Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.839.803.503.816,18 dan Rp8.512.184.608.681,84 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel 62. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

Nama Akun	Saldo 31 Des 2019	Mutasi 2020		Saldo 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Tanah	1.944.646.878.890,03	3.529.806.759,00	5.468.876.059,00	1.942.707.809.590,03
Peralatan dan Mesin	1.182.638.189.144,70	436.840.932.077,76	198.004.263.173,65	1.421.474.858.048,81
Gedung dan Bangunan	2.167.446.753.821,88	308.318.881.395,93	176.678.608.846,25	2.299.087.026.371,56
Jalan, Jaringan dan Instalasi	6.053.598.799.821,72	2.154.250.338.846,00	928.947.667.484,93	7.278.901.471.182,79
Aset Tetap Lainnya	144.706.303.647,59	85.411.856.276,50	62.426.872.878,37	167.691.287.045,72
Konstruksi dalam Pengerjaan	930.414.053.053,34	115.706.387.252,00	692.858.815.318,58	353.261.624.986,76
Akumulasi Penyusutan	(3.911.266.369.697,41)	(844.233.597.763,37)	(132.179.394.051,29)	(4.623.320.573.409,49)
Jumlah	8.512.184.608.681,85	2.259.824.604.843,82	1.932.205.709.709,49	8.839.803.503.816,18

7.5.4.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	1.942.707.809.590,03	1.944.646.878.890,03

Aset tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.942.707.809.590,03 dan Rp1.944.646.878.890,03 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 63. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		1.944.646.878.890,03
Penambahan:		3.529.806.759,00
-	Realisasi Belanja Modal TA. 2020	50.638.019,00
-	Penerimaan Hibah Barang	45.000.000,00
-	Penerimaan Hibah Barang - P3D Susulan dari Kabupaten Barito Selatan	255.956.000,00
-	Mutasi dari OPD lain	2.207.250.000,00
-	Kurang catat saldo awal tahun	490.154.700,00
-	Koreksi Ekuitas Menambah Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	480.808.040,00
Pengurangan:		5.468.876.059,00
-	Penghapusan karena penjualan	2.730.180.000,00
-	Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	39.781.819,00
-	Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	10.856.200,00
-	Mutasi ke OPD Lain (Pengalihan Status)	2.207.250.000,00
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	480.808.040,00
Saldo Akhir		1.942.707.809.590,03

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada Lampiran 3. Aset Tetap Tanah per SKPD sebagai berikut.

Tabel 64. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 per SKPD

SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan	112.797.454.957,55	112.541.498.957,55
Dinas Kesehatan	5.097.077.628,00	5.218.977.628,00
RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	12.340.000.000,00	12.340.000.000,00
RSJ Kalawa Atei	163.070.000,00	163.070.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.454.154.884.123,00	1.454.154.884.123,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.932.800.000,00	2.932.800.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	685.000.000,00	685.000.000,00
Dinas Sosial	5.120.399.993,00	5.120.399.993,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.119.796.000,00	14.747.676.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	82.000.000,00	82.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.730.000.000,00	2.730.000.000,00
Dinas Perhubungan	4.549.657.200,00	4.549.657.200,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	300.000.000,00	300.000.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.636.870.002,00	2.765.620.002,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	788.000.000,00	788.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	3.997.500.000,00	3.997.500.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.837.500.000,00	4.887.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.340.500.000,00	1.340.500.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	18.502.000.040,00	18.502.000.040,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	16.344.608.084,00	16.292.778.084,00
Dinas Perkebunan	12.176.336.000,00	12.176.336.000,00
Dinas Kehutanan	21.960.927.200,00	21.665.102.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.506.000.000,00	3.506.000.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.688.500.000,00	1.842.100.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.412.500.000,00	6.412.500.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	167.083.637.862,48	168.672.937.862,48
Badan Pendapatan Daerah	2.826.340.500,00	2.826.340.500,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.695.200.000,00	4.880.200.000,00
Biro Umum	42.929.500.000,00	42.915.500.000,00
Sekretariat DPRD	9.902.000.000,00	9.916.000.000,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Badan Penghubung	4.290.000.000,00	4.290.000.000,00
Inspektorat	1.313.750.000,00	0,00
JUMLAH	1.942.707.809.590,03	1.944.646.878.890,03

7.5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	1.421.474.858.048,81	1.182.638.189.144,70

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.421.474.858.048,81 dan Rp1.182.638.189.144,70, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 65. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.182.638.189.144,70
Penambahan	436.840.932.077,76
- Realisasi Belanja Modal TA.2020	226.420.242.082,00
- Penerimaan Hibah Barang	2.343.228.657,14
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	213.138.000,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	2.705.503.165,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	21.877.935.062,19
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	1.626.241.470,00
- Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	6.718.522.620,31
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi	19.075.000,00
- Kurang Catat Saldo Awal	2.345.465.055,10
- Koreksi ekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	132.645.793.947,95
- Koreksiekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	39.925.787.018,07
Pengurangan	198.004.263.173,65
- Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	2.480.001.144,67
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	10.961.095.735,30
- Reklasifikasi ke ExtracomTabel (Beban Lain-lain)	1.089.185.584,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	269.754.000,00
- Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan	60.506.100,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	205.954.300,00
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	3.084.195.129,00
- Mutasi ke OPD Lain (pengalihan status)	6.718.522.620,31
- Setoran karena temuan	537.273.454,55
- Lebih Catat Saldo Awal	26.194.139,80
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	132.645.793.947,95
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	39.925.787.018,07
Saldo Akhir	1.421.474.858.048,81

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran 4.

Tabel 66. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 per SKPD

SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan	379.351.035.801,34	247.340.364.703,17
Dinas Kesehatan	48.363.146.533,00	39.037.318.523,00
RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	224.589.855.833,67	207.259.044.623,96
RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	24.657.233.220,46	15.117.946.978,46
RSJ Kalawa Atei	11.963.716.068,50	11.191.606.047,50
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54.842.910.010,56	54.557.245.236,17
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.162.037.725,61	7.215.686.900,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.798.182.083,00	2.790.047.083,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.436.517.206,00	4.436.517.206,00
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	43.133.451.962,00	39.722.365.962,00
Dinas Sosial	8.548.524.238,02	7.850.183.238,02
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.364.053.135,00	5.364.053.135,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.480.737.863,00	2.500.907.013,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Dinas Ketahanan Pangan	4.714.645.101,00	4.707.745.101,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.896.067.494,13	6.851.067.494,13
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.380.374.265,24	2.361.374.265,24
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.205.737.184,82	4.205.737.184,82
Dinas Perhubungan	29.276.770.627,84	7.469.288.885,65
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	21.956.229.824,22	21.432.339.824,22
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.417.834.246,00	5.360.424.946,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.902.292.589,15	7.809.338.589,15
Dinas Pemuda dan Olahraga	6.168.638.831,37	5.374.941.831,37
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.286.393.034,84	6.136.573.034,84
Dinas Perpustakaan dan Arsip	7.131.949.235,00	7.130.166.735,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	21.822.623.755,00	21.523.139.255,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	41.272.110.324,00	41.014.906.324,00
Dinas Perkebunan	12.951.765.492,11	12.920.265.492,11
Dinas Kehutanan	109.885.511.352,38	81.071.063.437,08
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.744.789.868,99	11.682.887.368,99
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17.091.321.353,58	17.091.321.353,58
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	15.714.365.266,00	15.528.103.266,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	42.882.800.922,51	40.350.849.077,87
Badan Pendapatan Daerah	28.650.166.781,82	27.410.434.875,49
Badan Kepegawaian Daerah	7.184.126.903,02	7.564.423.673,68
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.134.157.497,00	14.834.897.447,00
Biro Pemerintahan	2.433.349.132,00	2.404.118.132,00
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	4.026.811.234,67	4.026.811.234,67
Biro Hukum	1.409.628.010,00	1.678.226.954,00
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.276.172.129,00	1.276.172.129,00
Biro Administrasi Pembangunan	1.651.044.384,00	4.553.738.575,27
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.801.886.075,22	2.174.899.121,00
Biro Organisasi	1.125.886.239,00	1.125.886.239,00
Biro Umum	103.579.697.458,99	99.142.583.892,32
Biro Protokol dan Komunikasi Publik	3.545.379.420,00	3.345.779.420,00
Sekretariat DPRD	35.279.156.582,47	33.302.476.299,32
Badan Penghubung	10.225.682.831,12	9.560.536.031,12
Inspektorat	6.758.090.922,16	5.832.385.005,50
JUMLAH	1.421.474.858.048,81	1.182.638.189.144,70

7.5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	2.299.087.026.371,56	2.167.446.753.821,88

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp2.299.087.026.371,56 dan Rp2.167.446.753.821,88, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 67. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	2.167.446.753.821,88
Penambahan:	308.318.881.395,93
- Realisasi Belanja Modal TA. 2020	131.198.367.274,03
- Penerimaan Hibah Barang	1.806.833.622,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak terduga	114.901.000,00
- Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin	269.754.000,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	18.240.750,00
- Reklasifikasi dari Aset lain-lain	9.880.000,00
- Reklasifikasi dari KDP	578.094.750,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi	22.435.105.700,00
- Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	6.359.568.360,00
- Kurang catat saldo awal tahun	5.231.627.000,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	136.467.649.539,90
- Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	3.828.859.400,00
Pengurangan:	176.678.608.846,25
- Penjualan	821.000.000,00
- Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa	823.889.700,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin	21.877.935.062,19
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tidak Berwujud	251.432.500,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

Uraian		Nilai (Rp)
-	Reklasifikasi ke KDP	437.392.075,00
-	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Beban lain-lain)	35.726.000,00
-	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	9.950.000,00
-	Reklasifikasi menjadi Persediaan	66.190.000,00
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	1.448.454.201,00
-	Mutasi antar OPD (Pengalihan Status)	6.359.568.360,00
-	Setoran pengembalian	276.519.264,30
-	Lebih catat tahun sebelumnya (doubel jurnal)	3.974.042.743,80
-	Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	136.467.649.539,96
-	Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	3.828.859.400,00
Saldo Akhir		2.299.087.026.371,56

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 68. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 per SKPD

SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan	947.473.210.480,18	807.825.740.782,18
Dinas Kesehatan	54.278.644.313,01	47.238.865.213,01
RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	154.486.541.106,55	154.486.541.106,55
RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	531.895.000,00	531.895.000,00
RSJ Kalawa Atei	25.041.303.731,51	23.471.030.431,57
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	139.248.884.916,70	138.374.296.416,70
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.353.438.309,50	4.353.438.309,50
Satuan Polisi Pamong Praja	1.868.319.672,00	1.868.319.672,00
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	15.071.617.115,00	15.071.617.115,00
Dinas Sosial	44.891.264.858,68	44.891.264.858,68
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.322.570.083,00	7.591.170.083,00
Dinas Ketahanan Pangan	6.915.974.435,71	6.923.996.726,01
Dinas Lingkungan Hidup	4.917.994.502,02	4.962.994.502,02
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.213.169.669,07	1.213.169.669,07
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.779.691.667,40	4.779.691.667,40
Dinas Perhubungan	58.911.409.438,42	79.151.817.388,57
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	9.835.848.178,55	9.835.848.178,55
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.922.082.543,00	8.950.082.543,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.813.246.252,79	9.813.246.252,79
Dinas Pemuda dan Olahraga	90.397.731.557,66	90.303.045.401,46
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	34.250.995.146,55	34.250.995.146,55
Dinas Perpustakaan dan Arsip	12.182.037.496,00	12.182.037.496,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	71.781.819.744,16	71.485.577.744,16
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	34.422.640.188,00	34.422.640.188,00
Dinas Perkebunan	20.030.826.086,00	20.062.326.086,00
Dinas Kehutanan	52.773.017.327,85	52.763.971.955,25
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.056.027.997,55	9.056.027.997,55
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	22.341.185.156,00	22.439.185.156,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	21.568.154.643,00	21.578.154.643,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	120.612.350.137,13	118.851.238.456,74
Badan Pendapatan Daerah	76.481.957.807,64	76.227.991.004,64
Badan Kepegawaian Daerah	8.049.941.002,00	8.049.941.002,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37.692.529.953,28	37.692.529.953,28
Biro Pemerintahan	4.718.768.851,00	4.738.748.851,00
Biro Umum	131.724.344.994,67	130.970.500.374,67
Sekretariat DPRD	29.884.625.251,98	30.992.911.191,98
Badan Penghubung	15.448.067.408,00	15.448.067.408,00
Inspektorat	5.792.899.350,00	4.595.837.850,00
JUMLAH	2.299.087.026.371,56	2.167.446.753.821,88

7.5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	7.278.901.471.182,79	6.053.598.799.821,72

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp7.278.901.471.182,79 dan Rp6.053.598.799.821,72, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 69. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2020		6.053.598.799.821,72
Penambahan:		2.154.250.338.846,00
-	Realisasi Belanja Modal TA.2020	711.922.419.210,51
-	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	535.460.056,65
-	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan (dari KDP)	684.267.499.969,00
-	Reklasifikasi Aset Tetap Jarijar dari Dana Bos (Reklas dari Peralatan dan mesin)	60.506.100,00
-	Mutasi dari OPD lain	334.726.222,73
-	Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	7.516.107,00
-	Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	757.086.132.580,11
-	Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	36.078.600,00
Pengurangan:		928.947.667.484,93
-	Reklasifikasi menjadi Persediaan	59.146.416.555,00
-	Reklasifikasi ke KDP	112.344.313.527,00
-	Mutasi ke OPD lain	334.726.222,73
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	757.086.132.580,20
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	36.078.600,00
Saldo Akhir		7.278.901.471.182,79

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 6.

Tabel 70. Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 per SKPD

SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan	9.529.772.911,54	9.263.250.704,54
Dinas Kesehatan	4.814.380.750,00	4.814.380.750,00
RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	13.162.136.052,00	13.162.136.052,00
RSJ Kalawa Atei	1.721.724.500,00	1.721.724.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.069.966.863.952,81	5.846.353.205.598,74
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.759.587.166,00	1.759.587.166,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	367.198.160,00	367.198.160,00
Satuan Polisi Pamong Praja	335.100.000,00	335.100.000,00
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	5.940.174.509,00	5.940.174.509,00
Dinas Sosial	4.239.576.319,91	4.239.576.319,91
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	174.895.000,00	174.895.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	844.588.500,00	844.588.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	20.156.200,00	20.156.200,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	299.500.000,00	299.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	233.567.500,00	233.567.500,00
Dinas Perhubungan	37.934.665.325,74	37.934.665.325,74
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	3.169.154.200,00	3.169.154.200,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.181.978.000,00	1.181.978.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	199.280.000,00	199.280.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	11.688.768.457,73	11.688.768.457,73
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	590.425.613,47	590.425.613,47
Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.585.133.330,00	1.585.133.330,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	32.424.223.073,00	31.287.320.573,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	7.783.201.078,00	7.783.201.078,00
Dinas Perkebunan	1.212.842.854,00	1.212.842.854,00
Dinas Kehutanan	3.941.694.930,00	3.905.616.930,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	40.284.432.213,00	40.284.432.213,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.965.242.471,96	2.965.242.471,96
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	185.468.400,00	185.468.400,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	135.491.300,00	135.491.300,00
Badan Pendapatan Daerah	1.319.682.406,00	1.144.772.106,00
Badan Kepegawaian Daerah	1.182.421.660,00	1.182.421.660,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.070.090.465,00	2.070.090.465,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	334.726.222,73
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	334.726.222,73	0,00
Biro Umum	12.132.645.785,90	12.132.645.785,90
Sekretariat DPRD	1.515.532.000,00	1.515.532.000,00
Badan Penghubung	1.215.199.875,00	1.215.199.875,00
Inspektorat	439.950.000,00	365.350.000,00
JUMLAH	7.278.901.471.182,79	6.053.598.799.821,72

7.5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	167.691.287.045,72	144.706.303.647,59

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp167.691.287.045,72 dan Rp144.706.303.647,59 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71. Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		144.706.303.647,59
Penambahan:		85.411.856.276,50
-	Realisasi Belanja Modal TA.2020	38.522.674.557,99
-	Penerimaan Hibah Barang	557.311.900,14
-	Perolehan Aset dari Hutang	205.954.300,00
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	39.781.819,00
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.448.454.201,00
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	7.910.773.700,00
-	Reklasifikasi dari Beban Hibah	198.120.000,00
-	Kurang catat saldo awal tahun	948.925.090,00
-	Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi Simda	20.173.329.060,96
-	Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	15.406.531.647,41
Pengurangan:		62.426.872.878,37
-	Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	99.088.000,00
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	22.435.105.700,00
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan Mesin	1.626.241.470,00
-	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	71.038.000,00
-	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	2.602.339.000,00
-	Pembayaran Utang Aset Kontrak Rehap Bangunan Mushola Kantor Dinas Koperasi & UKM TA 2018(dari BM)	13.200.000,00
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi SIMDA	20.173.329.060,96
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	15.406.531.647,41
Saldo Akhir		167.691.287.045,72

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 7.

Tabel 72. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 per SKPD

SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan	87.184.098.667,06	73.525.574.926,92
Dinas Kesehatan	119.838.690,00	119.838.690,00
RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	277.546.850,00	277.546.850,00
RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	2.708.140.000,00	2.708.140.000,00
RSJ Kalawa Atei	1.052.100.774,39	1.052.100.774,39
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.727.629.051,00	19.871.883.150,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.063.463.520,00	13.063.463.520,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61.839.200,00	61.839.200,00
Satuan Polisi Pamong Praja	24.750.000,00	24.750.000,00
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam	9.600.000,00	
Dinas Sosial	35.569.500,00	35.569.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	375.378.750,00	375.378.750,00
Dinas Lingkungan Hidup	214.807.000,00	214.807.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	394.092.239,00	373.310.420,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	147.475.000,00	147.475.000,00
Dinas Perhubungan	529.268.400,00	529.268.400,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	416.825.000,00	425.125.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	4.014.649.563,66	4.791.946.563,66
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.493.496.326,00	4.643.316.326,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	13.129.642.215,45	13.129.642.215,45
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.653.844.348,00	2.663.844.348,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.960.438.302,99	521.666.985,00
Dinas Perkebunan	189.441.000,00	189.441.000,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Dinas Kehutanan	74.328.500,00	74.328.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19.342.900,00	19.342.900,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	98.631.104,67	98.631.104,67
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	339.712.150,00	339.712.150,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.458.331.950,00	1.260.211.950,00
Badan Pendapatan Daerah	35.194.500,00	35.194.500,00
Badan Kepegawaian Daerah	293.006.000,00	295.174.880,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	668.803.943,50	732.538.943,50
Biro Pemerintahan	30.000.000,00	30.000.000,00
Biro Hukum	272.152.000,00	272.152.000,00
Biro Organisasi	21.246.500,00	21.246.500,00
Biro Umum	1.425.474.400,00	1.425.474.400,00
Sekretariat DPRD	11.814.000,00	22.252.500,00
Badan Penghubung	17.420.000,00	17.420.000,00
Inspektorat	1.141.894.700,00	1.316.694.700,00
JUMLAH	167.691.287.045,72	144.706.303.647,59

7.5.4.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	353.261.624.986,76	930.414.053.053,34

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp353.261.624.986,76 dan Rp930.414.053.053,34, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 73. Mutasi Aset KDP

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	930.414.053.053,34
Penambahan:	115.706.387.252,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2020	48.780.000,00
- Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	2.875.901.650,00
- Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	112.781.705.602,00
Pengurangan:	692.858.815.318,58
- Surat Tanda Setoran (Pengembalian)	75.346.899,58
- Reklasifikasi Ke Aset Tetap	32.010.000,00
- Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	692.724.358.419,00
- Penghapusan	27.100.000,00
Saldo Akhir	353.261.624.986,76

Tabel 74. Aset Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 per SKPD

SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan	37.357.500,00	37.357.500,00
Dinas Kesehatan	0,00	287.980.000,00
RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	1.557.710.000,00	1.488.575.000,00
RSJ Kalawa Atei	355.974.500,00	419.574.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.679.692.177,00	692.631.870.669,00
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	436.234.017,00	436.234.017,00
Dinas Sosial	184.815.500,00	184.815.500,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.855.328.557,00	1.855.328.557,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.434.980,00	6.434.980,00
Dinas Perhubungan	48.780.000,00	32.010.000,00
Dinas Kounikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0,00	0,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	185.038.070.324,34	185.038.070.324,34
Dinas Kehutanan	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	108.300.000,00	29.300.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.571.142.500,00	1.571.142.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	186.800.000,00	186.800.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	98.000.000,00	98.000.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	765.075.000,00	749.375.000,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	174.777.075,00	200.384.750,00
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	27.100.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	477.138.000,00	477.138.000,00
Biro Umum	44.581.214.856,42	44.656.561.756,00
Sekretariat DPRD	98.780.000,00	0,00
JUMLAH	353.261.624.986,76	930.414.053.053,34

7.5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	(4.623.320.573.409,49)	(3.911.266.369.697,41)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp4.623.320.573.409,49) dan (Rp3.911.266.369.697,41), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 75. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2019	Mutasi 2020		31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(697.044.245.160,25)	(265.169.487.447,59)	(98.434.302.855,18)	(863.779.429.752,66)
Gedung dan Bangunan	(445.389.797.698,12)	(57.373.888.113,44)	(26.198.445.147,11)	(476.565.240.664,45)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	(2.769.688.704.305,04)	(520.830.533.235,34)	(7.543.334.548,00)	(3.282.975.902.992,38)
Aset Tetap Lainnya	856.377.466,00	(859.688.967,00)	(3.311.501,00)	0,00
Jumlah	(3.911.266.369.697,41)	(844.233.597.763,37)	(132.179.394.051,29)	(4.623.320.573.409,49)

7.5.4.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp863.779.429.752,66) dan (Rp697.044.245.160,25), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 76. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(697.044.245.160,25)
Penambahan:	(265.169.487.447,59)
- Beban Penyusutan Tahun 2020	(165.877.708.178,28)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	(718.999.155,00)
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	(77.809.812.121,27)
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(14.917.812.446,29)
- Kurang catat saldo awal	(4.441.483,00)
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	(5.840.714.063,75)
Pengurangan:	98.434.302.855,18
- Terdapat Aset Tetap yang Dihibahkan Tahun Berjalan	359.171.624,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	75.187.466.941,32
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	15.929.597.603,40
- Lebih catat saldo awal	4.441.483,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	5.840.714.063,75
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	1.112.911.139,71
Saldo Per 31 Desember 2020	(863.779.429.752,66)

7.5.4.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp476.565.240.664,45) dan (Rp445.389.797.698,12), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 77. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(445.389.797.698,12)
Penambahan:		(57.373.888.113,44)
-	Beban Penyusutan Tahun 2020	(46.081.837.452,00)
-	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	(376.934.228,00)
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	(5.765.530.183,44)
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(809.941.355,00)
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	(4.339.644.895,00)
Pengurangan:		26.198.445.147,11
-	Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan	821.000.000,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat mapping 108	19.952.841.282,11
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	1.084.958.970,00
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	4.339.644.895,00
Saldo Per 31 Desember 2020		(476.565.240.664,45)

7.5.4.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp3.282.975.902.992,38) dan (Rp2.769.688.704.305,04), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 78. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(2.769.688.704.305,04)
Penambahan:		(520.830.533.235,34)
-	Beban Penyusutan Tahun 2020	(513.348.021.356,00)
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	(201.125.381,00)
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	(7.176.124.360,34)
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(104.144.683,00)
-	Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset (Ekstra ke Intra)	(1.117.455,00)
Pengurangan:		7.543.334.548,00
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	201.125.381,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan	7.238.064.484,00
-	Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	104.144.683,00
Saldo Per 31 Desember 2020		(3.282.975.902.992,38)

7.5.4.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp856.377.466,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 79. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		856.377.466,00
Penambahan:		(859.688.967,00)
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(859.688.967,00)
Pengurangan:		3.311.501,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat	3.311.500,00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	1,00
Saldo Per 31 Desember 2020		0,00

7.5.4.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	541.544.399.678,94	1.362.699.044.248,42

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp541.544.399.678,94 dan Rp1.362.699.044.248,42. Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Tagihan TGR, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

7.5.4.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	10.135.189,00	4.563.389,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp10.135.189,00 merupakan tagihan penjualan angsuran Rumah Dinas per 31 Desember 2020 yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari:

- Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap II berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 012/310/BP tanggal 24 Desember 1998;
- Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap III berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 346 Tahun 2013 tanggal 23 September 2002;
- Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap IV berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/275/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap V berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/706/2014 tanggal 12 Desember 2014.

7.5.4.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	546.107.524,00	626.107.524,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sama, masing-masing sebesar Rp546.107.524,00, dan Rp626.107.524,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Kasus	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Keterangan
1	SEKRETARIAT DPRD	kerugian daerah a.n saudara Anang Achmad	546.107.524,00	626.107.524,00	Berdasarkan Keputusan BPK No.01.TP.02-2018/VIII/2018
		Jumlah	546.107.524,00	626.107.524,00	

Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Aset Lainnya berupa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Namun Tagihan TGR ini tidak dicatat di Neraca sehingga hanya diungkapkan di CaLK karena belum didukung dengan Surat Ketetapan Pembebanan ataupun Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Berdasarkan pemantauan kerugian daerah BPK per 31 Desember 2018 nilai Tagihan TGR sebesar Rp626.107.524,00. Rincian pemantauan tersebut tersaji pada Lampiran 8.

Terdapat juga Tagihan atas Kelebihan Pembayaran BPO - TKI pada Anggota DPRD TA 2006 yang tidak dapat dicatat di Neraca karena belum didukung dengan Surat Ketetapan Pembebanan ataupun SKTJM. Saldo Tagihan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.100.574.250,00. Tagihan ini dalam kondisi macet.

Rincian Tagihan Kelebihan Pembayaran BPO - TKI dapat dilihat pada Lampiran 9.

7.5.4.1.4.3. Aset Tak Berwujud (Netto)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	56.613.606.636,28	65.222.410.793,43

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 80. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2019 (Rp)	Mutasi 2020		31 Des 2020 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	113.729.589.811,99	3.155.041.000,00	0,00	116.884.630.811,99
Akumulasi Amortisasi ATB	(48.507.179.018,56)	(16.554.093.806,93)	(4.790.248.649,78)	(60.271.024.175,71)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	65.222.410.793,43	(13.399.052.806,93)	(4.790.248.649,78)	56.613.606.636,28

7.5.4.1.4.3.1 Aset Tak Berwujud (Bruto)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan tahun 2019 masing-masing sebesar Rp116.884.630.811,99 dan Rp113.729.589.811,99. Atas saldo per 31 Desember 2020 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 81. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	113.729.589.811,99
Penambahan:	3.155.041.000,00
- Belanja TA 2020	187.540.000,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	2.290.640.000,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	251.432.500,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	71.038.000,00
- Kurang Catat Saldo Awal	200.000,00
- Penerimaan Hibah Barang	254.190.500,00
Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir	116.884.630.811,99

Rincian mutasi dapat dilihat pada Lampiran 10.

Aset Tak berwujud per 31 Desember 2020 tersebut terdiri dari :

Tabel 82. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Goodwill	0,00	2.537.540.878,00
Paten	0,00	50.204.500,00
Software	12.568.718.893,80	9.296.147.515,80
Kajian	104.315.911.918,19	101.845.696.918,19
Jumlah	116.884.630.811,99	113.729.589.811,99

7.5.4.1.4.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp60.271.024.175,71) dan (Rp48.507.179.018,56).

Table 83 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(48.507.179.018,56)
Penambahan:	(16.474.093.806,93)
- Beban Amortisasi Tahun 2020	(11.837.023.828,56)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut	(80.000.000,00)

Uraian		Nilai (Rp)
	Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	(1.944.465.447,10)
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(2.580.353.542,10)
	Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	(32.250.989,17)
Pengurangan:		4.710.248.649,78
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	2.129.895.107,68
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	2.580.353.542,10
Saldo Per 31 Desember 2020		(60.271.024.175,71)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2017 sebagai berikut.

Tabel 84. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	SED/DED	10
15	Rahasia Dagang	10
16	Desain Tata Letak	10
17	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
18	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

7.5.4.1.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	484.374.550.329,66	1.296.845.962.541,99

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp680.182.256.919,36 (nilai buku) dan Rp1.296.845.962.541,99 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut

Tabel 85. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Aset Lain-lain	680.182.256.919,36	2.493.895.783.638,18
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(195.807.706.589,70)	(1.197.049.821.096,19)
Aset Lain-lain (Netto)	484.374.550.329,66	1.296.845.962.541,99

Aset lain-lain tersebut mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp484.374.550.329,66 dengan Akumulasi Penyusutan.

7.5.4.2. Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	317.895.513.003,05	284.604.817.751,84

Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp317.895.513.003,05 dan Rp284.604.817.751,84. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

7.5.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	317.895.513.003,05	284.604.817.751,84

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp317.895.513.003,05 dan Rp284.604.817.751,84.

7.5.4.2.1.1. Utang Perhitungan PFK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	846.162,00	160.642.644,40

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp846.162,00 dan Rp160.642.644,40.

Tabel 86. Rincian Utang PFK

Nama Akun	31 Des 2019 (Rp)	Mutasi 2020		31 Des 2020 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Utang PPh 21	40.184.000,00	50.559.333.925,00	50.599.517.925,00	0,00
Utang PPh 22	121.017,00	3.244.586.513,00	3.244.707.530,00	0,00
Utang PPh 23	1.028.338,00	1.342.809.051,00	1.343.837.389,00	0,00
Utang PPh Ps 4 (2)	2.700.000,00	21.058.240.119,00	21.060.940.119,00	0,00
Utang PPN Pusat	7.625.180,00	94.795.546.104,00	94.803.171.284,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai 2%	18.720.835,00	7.869.638.366,00	7.888.359.201,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai 8%	90.263.274,40	37.195.682.774,00	37.285.099.886,40	846.162,00
Jumlah	160.642.644,40	216.013.961.971,00	216.173.880.055,40	846.162,00

a. Utang PPh 21

Saldo utang PPH 21 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp40.184.000,00 dengan rician sebagai berikut :

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		40.184.000,00
Penambahan:		
-	Pemotongan PPh 21 Tahun 2020	50.559.333.925,00
Pengurangan:		
-	Penyetoran PPh 21 Tahun 2020	50.599.517.925,00
-	Penyesuaian	0,00
Saldo Akhir		0,00

a. Utang PPh 22

Saldo utang PPH 22 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp121.017,00 dengan rician sebagai berikut :

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		121.017,00
Penambahan:		
-	Pemotongan PPh 22 Tahun 2020	3.244.586.513,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

Uraian		Nilai (Rp)
Pengurangan:		
-	Penyetoran PPh 22 Tahun 2020	3.244.707.530,00
-	Penyesuaian	0,00
Saldo Akhir		0,00

b. Utang PPh 23

Saldo utang PPh 23 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.028.338,00 dengan rician sebagai berikut :

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		1.028.338,00
Penambahan:		
-	Pemotongan PPh 23 Tahun 2020	1.342.809.051,00
Pengurangan:		
-	Penyetoran PPh 23 Tahun 2020	1.343.837.389,00
-	Penyesuaian	0,00
Saldo Akhir		0,00

d. Utang PPh Ps 4 (2)

Saldo utang PPh Ps 4 (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.700.000,00 dengan rician sebagai berikut :

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		2.700.000,00
Penambahan:		
-	Pemotongan PPh Ps 4 (2) Tahun 2020	21.058.240.119,00
Pengurangan:		
-	Penyetoran PPh Ps 4 (2) Tahun 2020	21.060.940.119,00
-	Penyesuaian	0,00
Saldo Akhir		0,00

e. Utang PPN Pusat

Saldo utang PPN Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.625.180,00 dengan rician sebagai berikut :

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		7.625.180,00
Penambahan:		
-	Pemotongan Utang PPN Pusat Tahun 2020	94.795.546.104,00
Pengurangan:		
-	Penyetoran Utang PPN Pusat Tahun 2020	94.803.171.284,00
	Penyesuaian	0,00
Saldo Akhir		0,00

f. Utang Iuran Wajib Pegawai 2%

Saldo Utang Iuran Wajib Pegawai 2% Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing – masing sebesar Rp0,00 dan Rp18.720.835,00 dengan rician sebagai berikut :

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		18.720.835,00
Penambahan:		
-	Pemotongan Utang Iuran Wajib Pegawai 2% Tahun 2020	7.869.638.366,00
Pengurangan:		
-	Penyetoran Utang Iuran Wajib Pegawai 2% Tahun 2019	7.888.359.201,00
-	Penyesuaian	0,00
Saldo Akhir		0,00

g. Utang Iuran Wajib Pegawai 8%

Saldo Utang Iuran Wajib Pegawai 8% Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp846.162,00 dan Rp90.263.274,40 dengan rician sebagai berikut :

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		90.263.274,40
Penambahan:		
-	Pemotongan Utang Iuran Wajib Pegawai 8%	37.285.099.886,40
Pengurangan:		
-	Penyetoran Utang Iuran Wajib Pegawai 8%	37.195.682.774,00
Saldo Akhir		846.162,00

Saldo Utang Iuran Wajib Pegawai 8% per 31 Desember 2020 sebesar Rp846.162,00 merupakan utang BPJS Ketenagakerjaan RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD).

7.5.4.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	67.516.800,00	124.196.800,00

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp67.516.800,00 yang merupakan Pendapatan sewa pada RSUD dr. Doris Sylvanus sebesar Rp16.800,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp67.500.000,00.

7.5.4.2.1.3. Utang Beban

Utang Beban	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	317.760.447.726,19	284.282.689.154,98

Utang Beban merupakan utang tagihan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp317.760.447.726,19 dengan rincian sebagai berikut.

7.5.4.2.1.3.1. Utang Beban Pegawai

Utang Beban Pegawai merupakan tagihan beban pegawai Tahun 2020 sebesar Rp27.335.101.283,80 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020 yang bersumber dari APBD dan BLUD dengan rincian dari beban pegawai APBD sebesar Rp13.270.261.286,80 dan yang bersumber dari BLUD sebesar Rp14.064.839.997,00

Tabel 87. Rincian Utang Beban Pegawai per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Dinas pendidikan	4.280.739.305,00	9.016.873.860,00
2	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)	14.064.839.997,00	7.225.104.660,00
3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)	132.806.467,00	0,00
4	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya	353.665.330,80	54.587.194,00
5	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	2.942.259,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	974.700,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	460.527,00	0,00
8	Satuan Polis Pamong Praja	6.955.227,00	3.100.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana dan pemadam kebakaran	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas ketahanan pangan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	473.400,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
15	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	627.747,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.248.200,00	5.248.200,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.390.000,00	0,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00
22	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0,00	0,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.735.200,00	0,00
24	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikul Tura dan Pertenakan	0,00	0,00
25	Dinas Perkebunan	786.291,00	0,00
26	Dinas Kehutanan	0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

No	Perangkat Daerah	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
27	Dinas energi dan sumber daya mineral	5.072.386,00	1.632.004,00
28	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	627.202,00	0,00
29	Biro Umum	8.382.551,00	0,00
30	Biro Pemerintahan	0,00	0,00
31	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
32	Biro Hukum	0,00	0,00
33	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0,00	0,00
34	Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
36	Biro Organisasi	0,00	0,00
37	Biro Protokol dan Komunikasi Publik	0,00	0,00
38	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
39	Badan Penghubung	0,00	0,00
40	DPRD	0,00	0,00
41	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00
42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	354.950,00	0,00
43	Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00
44	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00
45	Badan Pendapatan Daerah	8.445.088.884,00	0,00
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
47	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00
48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
49	Inspektorat	4.872.919,00	653.947.200,00
Jumlah		27.335.101.283,80	16.963.435.377,00

7.5.4.2.1.3.2. Utang Beban Barang dan Jasa

Merupakan tagihan beban jasa listrik, air, telepon dan internet pada Perangkat Daerah bulan Desember 2020 yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2020.

Tabel 88. Rincian Utang Beban Barang dan Jasa per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	45.039.162,00	52.559.597,00
2	Dinas Kesehatan	77.015.632,00	58.723.228,00
3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)	316.315.732,00	492.917.862,00
4	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)	17.098.015.204,18	22.844.269.654,00
5	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya	51.715.800,00	355.535.457,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.546.642,00	80.426.208,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.760.454,00	21.063.985,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.984.724,00	13.867.902,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	16.498.844,00	13.921.326,00
10	Dinas Sosial	32.342.359,00	37.779.063,00
11	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	12.894.315,00	15.615.625,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40.045.833,00	40.991.021,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.577.287,00	7.660.627,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	13.330.012,00	12.217.891,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	10.296.759,00	11.670.208,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.909.816,00	15.787.183,00
18	Dinas Perhubungan	18.827.722,00	19.797.235,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	29.941.157,00	18.380.272,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.934.936,00	15.907.001,00
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	23.436.535,00	24.318.827,00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	22.382.826,00	18.272.007,00
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	31.200.013,00	20.072.552,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	29.957.309,00	33.043.425,00
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25.486.620,00	28.224.213,00
26	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	30.934.375,00	23.598.826,00
27	Dinas Perkebunan	20.185.055,00	32.415.971,00
28	Dinas Kehutanan	142.237.826,00	55.277.470,00
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	41.530.088,00	38.646.155,00
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30.883.553,00	33.170.304,00
31	Biro Pemerintahan	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
33	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0,00	0,00
34	Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
36	Biro Organisasi	0,00	0,00
37	Biro Protokol dan Komunikasi Publik	0,00	0,00
38	Biro Hukum	0,00	0,00
39	Biro Umum	310.228.786,00	295.982.870,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

No	Perangkat Daerah	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
40	Sekretariat DPRD	42.936.786,00	47.619.608,00
41	Badan Penghubung Prov. Kalteng di Jakarta	20.024.140,00	25.945.464,00
42	Inspektorat Provinsi	42.177.639,00	32.569.276,00
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	24.222.082,00	34.695.042,00
44	Badan Keuangan dan Aset Daerah	33.107.971,00	39.737.132,00
45	Badan Pendapatan Daerah	109.412.681,00	101.251.813,00
46	Badan Kepegawaian Daerah	21.499.826,00	25.620.726,00
47	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.715.200,00	106.766.700,00
Jumlah		18.919.551.701,18	25.146.319.726,00

7.5.4.2.1.3.3. Utang Beban Hibah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai utang beban Hibah per 31 Desember 2020. Merupakan utang beban yang berasal dari Dana Bos sebesar Rp5.173.840.000,00 Utang beban hibah per 31 Desember 2019 Sebesar Rp5.173.840.000,00

7.5.4.2.1.3.4. Utang Beban Transfer

Utang beban transfer kepada kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/157/2021 tentang Alokasi definitif bagi hasil pajak daerah tahap II kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan tengah Tahun Anggaran 2020 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2021 dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok triwulan IV berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/649/2020 tentang Alokasi Defenitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89. Utang Beban Transfer

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Palangka Raya	40.725.412.860,24	34.277.706.531,41
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Barito Utara	16.209.444.865,18	22.267.119.324,99
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Barito Selatan	12.059.007.951,19	10.849.800.868,71
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kapuas	21.078.225.510,13	14.291.478.415,22
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kotawaringin Timur	46.612.502.859,16	40.301.049.273,66
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kotawaringin Barat	32.637.149.875,29	27.961.432.720,80
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Murung Raya	13.399.365.216,84	14.287.227.124,54
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Barito Timur	10.447.665.280,65	9.813.559.622,11
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Katingan	14.128.261.245,30	11.768.637.329,94
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Mas	12.753.389.315,74	10.228.985.735,45
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Seruyan	13.112.595.356,10	11.032.184.883,39
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sukamara	8.706.359.818,01	7.468.547.206,63
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lamandau	11.048.136.092,32	9.461.756.967,62
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pulang Pisau	11.749.227.371,12	9.147.078.886,91
Jumlah	264.666.743.617,27	233.156.564.891,38

7.5.4.2.1.3.5. Utang Beban Lain-lain

Merupakan Rincian Utang Beban Lain-lain yang terdapat pada Perangkat Daerah RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD).

Tabel 90. Utang Beban Lain-Lain

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	1.263.834.043,00	3.842.529.160,60
PPKD (BTT COVID-19)	401.377.080,00	0,00
Jumlah	1.665.211.123,00	3.842.529.160,60

7.5.4.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)

	66.702.314,86	37.289.152,46
--	----------------------	----------------------

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp66.702.314,86. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada pada PPKD sebesar Rp51.658.535,00, nilai tersebut merupakan dana kekurangan penyetoran pajak pada KPID tahun 2015 berdasarkan LHP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/56/LHP-K/2016 /INSP tanggal 11 Agustus 2016 terhadap bendahara, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 91. Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Perangkat Daerah	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	PPKD	66.702.314,86	15.043.779,86
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	13.200.000,00
3	Dinas Kehutanan	0,00	9.045.372,60
	Jumlah	66.702.314,86	37.289.152,46

7.5.4.3. Ekuitas

7.5.4.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	10.715.920.803.773,84	11.413.340.755.426,00

Saldo Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.715.920.803.773,84.

7.5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.5.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	4.770.346.401.736,74	4.696.909.591.550,09

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 92. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	1.549.394.203.179,62	1.779.970.546.948,00
2	Pendapatan Transfer – LO	3.170.102.450.809,00	2.843.639.329.486,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	50.849.747.748,12	73.299.715.116,09
	Jumlah	4.770.346.401.736,74	4.696.909.591.550,09

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.5.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	1.549.394.203.179,62	1.779.970.546.948,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp1.549.394.203.179,62 dan Rp1.779.970.546.948,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 93. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	1.229.511.608.698,82	1.441.924.917.646,40
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	14.112.078.836,00	41.764.853.641,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	89.403.911.333,86	96.964.547.490,64
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	216.366.604.310,94	199.316.228.169,96
	Jumlah	1.549.394.203.179,62	1.779.970.546.948,00

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	1.229.511.608.698,82	1.441.924.917.646,40

Pajak Daerah merupakan PAD yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010.

Pendapatan pajak pada LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada LO sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2019 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2020. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan LO melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp1.229.511.608.698,82 dan Rp1.441.924.917.646,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Rincian Obyek	2020 (Rp)	2019 (Rp)
PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	2.037.555.000,00	2.177.832.100,00
PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO	21.460.974.100,00	20.839.866.700,00
PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	132.370.342.900,00	127.518.512.100,00
PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	1.934.908.000,00	1.909.985.300,00
PKB - Mobil Bus - Bus - LO	327.816.700,00	323.206.000,00
PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	45.744.773.100,00	46.387.129.550,00
PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	18.799.930.700,00	20.026.019.700,00
PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	38.733.806.860,00	41.955.637.600,00
PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	87.073.355.900,00	96.491.170.600,00
PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	193.621.500,00	171.291.700,00
PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	14.082.850,00	16.691.000,00
PKB - Kendaraan Alat Berat/Besar - LO	3.833.214.149,00	5.809.252.572,00
BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO	289.321.900,00	451.595.900,00
BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO	12.574.300.000,00	14.067.589.900,00
BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO	94.522.943.650,00	111.080.176.900,00
BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO	1.724.186.000,00	2.309.679.000,00
BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO	275.435.000,00	317.300.000,00
BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	35.802.701.400,00	45.460.085.600,00
BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	8.471.094.200,00	14.653.808.400,00
BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	22.386.201.100,00	40.244.548.500,00
BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	107.806.638.237,00	148.975.584.000,00
BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	690.645.000,00	619.108.400,00
BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	800.000,00	250.000,00
BBNKB - Kendaraan Alat Berat/Besar - LO	984.467.426,00	3.591.655.813,00
Pajak Bahan Bakar Premium - LO	34.395.622.100,00	34.592.620.702,00
Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO	39.066.070.604,00	48.755.329.450,00
Pajak Bahan Bakar Solar - LO	94.396.641.112,02	171.979.751.086,00
Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex - LO	1.366.912.246,00	1.006.862.413,00
Pajak Bahan Bakar Bio Solar - LO	121.326.969.837,00	162.097.529.122,00
Pajak Bahan Bakar Pertamina	100.976.263.365,00	110.577.206.129,00
Pajak Bahan Bakar Dex Lite	12.090.421.692,00	19.525.939.195,00
Pajak Air Permukaan - LO	1.445.969.233,80	1.346.503.506,40
Pajak Rokok - LO	186.393.622.837,00	146.645.198.708,00
Jumlah	1.229.511.608.698,82	1.441.924.917.646,40

7.5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	14.112.078.836,00	41.764.853.641,00

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 27 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp14.112.078.836,00 dan Rp41.764.853.641,00. Realisasi pendapatan retribusi menurut jenisnya ada 10 retribusi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rincian Obyek	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Balai Pengobatan - LO	5.382.602,00	0,00
Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda – LO	3.402.743.611,00	3.018.516.654,00
Penyediaan Peta Digital - LO	44.500.000,00	0,00
Penyediaan Peta Tematik - LO	2.470.000.000,00	44.900.000,00
Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO	39.850.000,00	2.618.900.000,00
Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO	0,00	91.075.000,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO	5.720.285.928,00	26.148.933.000,00
Laboratorium – LO	145.241.100,00	7.258.815.542,00
Ruangan -LO	378.822.560,00	186.440.000,00
Tempat Kegiatan Usaha – LO	67.230.000,00	461.567.200,00
Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	153.625.000,00	88.890.000,00
Pelayanan Tempat Pariwisata – LO	19.093.500,00	350.450.000,00
Pelayanan Tempat Olahraga – LO	255.844.000,00	27.468.500,00
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO	644.795.055,00	464.316.000,00
Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	34.450.000,00	719.296.180,00
Pemberian Izin Usaha Perikanan	0,00	32.300.000,00
Retribusi Izin Penangkapan Ikan Tandon - LO	900.000,00	0,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	729.315.480,00	252.985.565,00
Jumlah	14.112.078.836,00	41.764.853.641,00

7.5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	89.403.911.333,86	96.964.547.490,64

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp89.403.911.333,86 dan Rp96.964.547.490,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Setoran Pembagian Deviden TB 2019 Pemprov Kalteng	88.232.049.066,83	78.920.997.801,00
2	Setoran Penerimaan Deviden Dari PT. JAMKRIDA Kalteng Tahun 2019	1.171.862.267,03	18.043.549.689,64
	Jumlah	89.403.911.333,86	96.964.547.490,64

7.5.5.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah -LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	216.366.604.310,94	199.316.228.169,96

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp216.366.604.310,94 dan Rp199.316.228.169,96 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	21.037.100,00	25.253.650,00
2	Jasa Giro Kas Daerah - LO	3.067.830.528,00	7.375.233.782,00
3	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	352.916.456,00	197.311.259,00
4	Pendapatan Bunga Deposito - LO	19.157.459.929,49	37.000.372.575,24
5	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO	14.105.439.000,00	20.204.824.050,00
6	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	561.676.960,00	852.286.900,00

7	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	0,00	31.732.154,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	25.200,00	0,00
9	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	23.141.677.633,00	23.475.717.092,00
	Pendapatan Hibah BLUD - LO	6.338.237.217,00	0,00
10	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO	146.994.999.391,00	108.362.079.167,00
11	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	2.623.140.018,21	1.670.522.565,72
12	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	2.164.878,24	120.894.975,00
	Jumlah	216.366.604.310,94	199.316.228.169,96

7.5.5.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer - LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	3.170.102.450.809,00	2.843.639.329.486,00

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2020 sebesar Rp3.170.102.450.809,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 98. Pendapatan Transfer - LO

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	3.103.450.065.809,00	2.826.573.324.486,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	63.222.385.000,00	13.636.005.000,00
3	Bantuan Keuangan – LO	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00
	Jumlah	3.170.102.450.809,00	2.843.639.329.486,00

7.5.5.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	3.103.450.065.809,00	2.826.573.324.486,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp3.103.450.065.809,00 dan Rp2.826.573.324.486,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 99. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak – LO	143.899.478.029,00	121.270.799.919,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	441.819.113.594,00	486.695.632.798,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.439.305.729.000,00	1.603.623.745.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	1.078.425.745.186,00	614.983.146.769,00
	Jumlah	3.103.450.065.809,00	2.826.573.324.486,00

7.5.5.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	63.222.385.000,00	13.636.005.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebesar Rp63.222.385.000,00 dan Rp13.636.005.000,00 berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp63.222.385.000,00 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 100. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	63.222.385.000,00	13.636.005.000,00
	Jumlah	63.222.385.000,00	13.636.005.000,00

7.5.5.1.2.3. Bantuan Keuangan-LO

Bantuan Keuangan - LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00

Bantuan Keuangan untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp3.430.000.000,00 dan Rp3.430.000.000,00 terdiri dari sebagai berikut.

Tabel 101. Bantuan Keuangan - LO

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya – LO	245.000.000,00	245.000.000,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara – LO	245.000.000,00	245.000.000,00
3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan – LO	245.000.000,00	245.000.000,00
4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur – LO	245.000.000,00	245.000.000,00
5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas – LO	245.000.000,00	245.000.000,00
6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan – LO	245.000.000,00	245.000.000,00
7	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat – LO	245.000.000,00	245.000.000,00
8	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur – LO	245.000.000,00	245.000.000,00
9	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara – LO	245.000.000,00	245.000.000,00
10	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau – LO	245.000.000,00	245.000.000,00
11	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau – LO	245.000.000,00	245.000.000,00
12	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas- LO	245.000.000,00	245.000.000,00
13	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan- LO	245.000.000,00	245.000.000,00
14	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya- LO	245.000.000,00	245.000.000,00
	Jumlah	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00

7.5.5.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan yang Sah – LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	50.849.747.748,12	73.299.715.116,09

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 sebesar Rp50.849.747.748,12 terdiri dari Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp47.027.861.186,28 dan Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp3.821.886.561,84 dengan rincian sebagai berikut.

7.5.5.1.3.1. Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah – LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	47.027.861.186,28	58.448.613.270,13

Pendapatan Hibah-LO untuk tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp47.027.861.186,28 dan Rp58.448.613.270,13 dengan rincian:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp38.892.175.811,00 dan Rp50.382.281.249,00;
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp2.459.975.695,28 dan Rp604.688.842,00;
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp27.283.018,00 dan Rp0,00;
- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp0,00;
- Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp4.410.345.000,00 dan Rp6.285.643.179,13;
- Sumbangan dari PT Jasa Raharja Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp1.197.999.996,00 dan Rp1.176.000.000,00;
- Sumbangan Pihak Ketiga Lainnya Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp25.081.666,00 dan Rp0,00.

Tabel 102. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO

No.	SKPD	Hibah	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Peralatan dan mesin	1.854.612.606,00	9.858.506.486,00
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	410.100.000,00	10.301.057.000,00
		Buku Umum	0,00	200.000.000,00
		Persediaan	0,00	5.652.051.900,00
		Lain-lain	0,00	69.644.000,00
		Software	174.190.500,00	0,00
		Meubelair	43.100.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	Obat-obatan	35.343.902.666,00	18.926.383.378,00
3	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	Obat-obatan	417.045.600,00	0,00
4		Peralatan Personal Komputer	3.956.000,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

No.	SKPD	Hibah	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peralatan Jaringan	2.746.000,00	0,00
		Peralatan Komputer Lainnya	1.897.000,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persediaan	144.762.439,00	0,00
		Kendaraan Bermotor Angkutan barang	0,00	486.750.000,00
		Alat Kantor Lainnya	0,00	147.650.000,00
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	363.000.000,00
		Alat Pemadam Kebakaran	0,00	1.941.500.000,00
6	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Peralatan Personal Komputer	6.881.000,00	0,00
		Peralatan Mini Komputer	2.370.000,00	0,00
7	Biro Administrasi Pembangunan	Alat Komunikasi Radio UHF	391.650.000,00	0,00
8	Inspektorat	Peralatan Personal Komputer	11.700.000,00	0,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Alat-alat Angkut	0,00	395.640.000,00
		Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	132.519.750,00
		Bangunan gedung Kantor Lainnya	0,00	1.111.040.951,00
		Jalan dan Jembatan	0,00	306.194.611,00
		Jaringan	0,00	40.343.173,00
10	PPKD	Dana Hibah	0,00	450.000.000,00
11	Bappedalitbang	Peralatan Komputer	3.262.000,00	0,00
		Software	80.000.000,00	0,00
	Jumlah		38.892.175.811,00	50.382.281.249,00

7.5.5.1.3.2. Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya – LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	3.821.886.561,84	14.851.101.845,96

Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp3.821.886.561,84 dan Rp14.851.101.845,96 yang terdiri dari :

- Pendapatan Lainnya untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp3.821.886.561,84 dan Rp2.030.765.260,41;
- Pengembalian Gaji Tahun Sebelumnya untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp12.473.817.694,11;
- Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp2.649.990.416,29 dan Rp0,00;
- Denda Keterlambatan Pekerjaan untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp345.326.529,96 dan Rp346.518.891,44;
- Pendapatan Jasa Giro BOS untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp12.282.188,40 dan Rp0,00;
- Pendapatan Bunga BOS untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp3.091.715,80 dan Rp0,00;
- Pengembalian Dana Bos Tahun Sebelumnya BOS untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp1.344.434,00 dan Rp0,00;
- Dana Bos Tahun Sebelumnya untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp124.607.850,00 dan Rp0,00.

7.5.5.2. Beban Operasional

Beban Operasional	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	5.361.316.704.898,16	4.653.304.449.908,73

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp5.361.316.704.898,16 dan Rp4.653.304.449.908,73 dengan dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.5.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	1.529.751.691.276,80	1.434.877.485.076,46

Beban Pegawai untuk tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp1.529.751.691.276,80 dan Rp1.434.877.485.076,46. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2020 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2020.

7.5.5.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	171.366.501.968,37	295.142.971.741,84

Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp171.366.501.968,37 dan Rp295.142.971.741,84

7.5.5.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	326.939.884.354,12	225.972.789.287,40

Beban Jasa periode untuk tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp326.939.884.354,12 dan Rp225.972.789.287,40

7.5.5.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	47.725.411.148,62	71.794.620.976,46

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp47.725.411.148,62 dan Rp71.794.620.976,46

7.5.5.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	120.542.125.333,97	246.925.760.894,34

Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp120.542.125.333,97 dan Rp246.925.760.894,34.

7.5.5.2.6. Beban Subsidi

Beban Subsidi	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	0,00	1.122.859.000,00

Beban Subsidi untuk tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp1.122.859.000,00.

7.5.5.2.7. Beban Hibah

Beban Hibah	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	1.784.583.606.457,89	858.520.873.039,32

Beban Hibah untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp1.784.583.606.457,89 dan Rp858.520.873.039,32, beban hibah barang dan uang berupa Beban Hibah Barang kepada Pemerintah sebesar Rp776.214.024.236,60, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp12.821.483.750,00, Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp503.260.703.457,38, Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota sebesar Rp466.211.790.000,00, dan Beban Hibah kepada Pihak Ketiga sebesar Rp26.075.605.013,91, sebagai mana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 103. Beban Hibah

Uraian	2020 (Rp)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	776.214.024.236,60
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	12.821.483.750,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	503.260.703.457,38
Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota....	466.211.790.000,00
Beban Hibah kepada Pihak Ketiga	26.075.605.013,91
Jumlah	1.784.583.606.457,89

7.5.5.2.8. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	22.918.328.007,00	21.121.667.583,20

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp22.918.328.007,00 dan Rp21.121.667.583,20, beban bantuan sosial berupa barang dan uang berupa Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp3.967.032.800,00, Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp9.665.295.207,00, dan Beban Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan sebesar Rp9.286.000.000,00 sebagai mana tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 104. Beban Bantuan Sosial

Uraian	2020 (Rp)
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	3.967.032.800,00
Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	9.665.295.207,00
Beban Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan	9.286.000.000,00
JUMLAH	22.918.328.007,00

7.5.5.2.9. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	760.387.911.898,84	724.256.922.646,05

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 berupa nilai penyusutan Aset Tetap selama 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp760.387.911.898,84. Rincian Beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 105. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	589.433.214,00	821.236.783,00
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	41.825,00	41.825,00
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	769.751.550,00	600.341.615,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	30.824.707.906,67	29.671.493.568,33
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	67.618.258,00	95.972.781,00
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	249.830.381,00	213.122.864,00
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	129.239.004,00	22.889.832,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	247.232.076,00	216.479.482,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	166.408.857,00	217.713.754,00
Beban Penyusutan Alat Ukur	1.423.210.842,24	1.553.536.988,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.228.080.905,00	2.051.819.091,91
Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	14.915.000,00	345.402.636,10
Beban Penyusutan Alat Kantor	9.478.458.943,39	9.801.682.905,04
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	27.135.766.725,35	24.439.658.397,79
Beban Penyusutan Komputer	27.187.515.601,00	23.902.661.871,49
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.039.600.042,24	2.647.596.463,35
Beban Penyusutan Alat Studio	5.473.865.703,39	5.019.817.462,38
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	835.889.568,00	2.191.994.592,71
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	68.722.400,00	54.767.042,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	23.286.216.520,00	21.764.899.203,54
Beban Penyusutan Alat Kesehatan	38.600.142,00	372.951.111,00
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	5.666.261.329,00	4.866.087.388,41
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.957.488.646,00	2.021.806.181,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	167.918.892,00	162.616.760,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	58.077.917,00	57.238.936,00
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10.151.143,00	5.539.477,00
Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	104.746.052,00	110.368.052,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	189.904.800,00	259.996.838,00
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	72.108.054,00	72.135.721,00
Beban Penyusutan Senjata Api	2.950.980,00	2.975.980,00
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	968.856.279,00	102.195.198,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	519.971.362,00	869.554.209,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	16.081.291.689,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Olahraga	1.423.324.925,00	0,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	3.549.682.518,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	1.671.524.728,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	136.611.359,00	0,00
Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi	3.637.235,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian	2.836.809,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi	156.250,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan	19.873.923,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Penolong	1.677.824,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian	13.550.000,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.938.015.845,00	35.034.122.621,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.614.422.712,00	7.139.881.927,01
Beban Penyusutan Bangunan Menara	9.599.992,00	9.599.992,00
Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	6.660.432,00	6.660.432,00
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	269.250.824,00	60.755.924,00
Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	14.849.984,00	218.787.886,00
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	228.822.330,00	236.602.340,00
Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	2.626.953.234,00
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	215.333,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan	468.383.397.388,00	484.365.441.802,27
Beban Penyusutan Jembatan	10.970.216.473,00	16.134.602.170,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	2.750.977.661,00	2.772.130.143,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	222.304.561,00	222.304.561,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	15.858.409.200,00	15.513.034.086,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	11.276.731.304,00	10.657.539.194,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	132.194.374,00	132.194.374,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	820.834.712,00	457.955.096,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	174.002.493,00	177.143.548,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	5.794.122,00	358.322.149,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	242.972.279,00	270.902.527,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	132.795.416,00	95.909.566,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	121.519.988,00	121.519.988,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	175.817.855,00	172.271.015,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	912.572.220,00	934.812.914,00
Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan	6.242.340,00	5.909.006,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	16.285.875,00	11.581.940,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	201.954.147,00	201.954.147,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	702.853.136,00	679.145.236,00
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	216.065.541,00	141.543.112,00
Beban Penyusutan Jaringan Gas	17.524.304,00	17.524.304,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.555.967,00	0,00
Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	619.593,00	0,00
Beban Penyusutan Barang Yang Akan Dihilangkan	23.242.701.491,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	0,00	1.074.000,00
Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	0,00	29.981.167,34
Beban Amortisasi Goodwill	1.250.000,00	195.518.750,00
Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	76.488.750,00	13.899.895,84
Beban Amortisasi Paten	0,00	5.020.450,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	901.580.470,74	10.678.938.138,54
Beban Amortisasi Kajian	10.302.464.800,76	18.790.000,00
Beban Amortisasi Software	555.239.807,06	0,00
Jumlah	760.387.911.898,84	724.256.922.646,05

7.5.5.2.10. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	254.547.897,47	674.417.860,44

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp254.547.897,47 dan Rp674.417.860,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 106. Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	176.282.382,64	489.559.161,09
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	68.953.696,83	101.976.080,00
3	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.045.700,00	82.429.395,75

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

No.	Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	2.266.118,00	453.223,60
	Jumlah	254.547.897,47	674.417.860,44

7.5.5.2.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	1.117.681.784,00	298.865.488,00

Beban Lain-lain untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp1.117.681.784,00 dan Rp298.865.488,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 107. Beban Lain-lain

No.	SKPD	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	711.557.684,00	69.644.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.600.000,00	226.874.000,00
3	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	4.741.300,00	0,00
4	RSJ Kalawa Atei	2.550.000,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.000,00	62.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	26.000,00	26.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	225.000,00
8	Dinas Sosial	14.302.000,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	124.000,00	500.988,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	192.000,00	125.500,00
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	215.000,00	244.000,00
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip	122.000,00	0,00
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	10.856.200,00	0,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	31.000,00
15	Dinas Perkebunan	0,00	806.000,00
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	104.000,00	96.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	56.000,00	31.000,00
18	Biro Umum	368.145.600,00	200.000,00
	Jumlah	1.117.681.784,00	298.865.488,00

7.5.5.2.12. Beban Transfer

Beban Transfer	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	595.729.014.771,08	772.595.216.315,22

Beban Transfer untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp595.729.014.771,08 dan Rp772.595.216.315,22.

7.5.5.2.12.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah untuk tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp587.249.014.771,08 dan Rp735.997.668.332,22.

7.5.5.2.12.2. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp900.000.000,00 dan Rp25.900.000.000,00.

7.5.5.2.12.3. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp1.377.047.983,00.

7.5.5.2.12.4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp7.580.000.000,00 dan Rp9.320.500.000,00.

7.5.5.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	(590.970.303.161,42)	43.605.141.641,36

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 108. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Pendapatan	4.770.346.401.736,74	4.696.909.591.550,09
Beban	5.361.316.704.898,16	4.653.304.449.908,73
Surplus/Defisit dari Operasi	(590.970.303.161,42)	43.605.141.641,36

7.5.5.4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	6.580.054.955,77	179.999.648,15

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp6.580.054.955,77 dan Rp179.999.648,15.

7.5.5.5. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	189.400.000,00	0,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar untuk Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp189.400.000,00 dan Rp0,00.

7.5.5.6. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	4.897.362.600,00	1.486.867.437,68

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp4.897.362.600,00 dan Rp1.486.867.437,68 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 109. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

No.	SKPD	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	0,00	806.100.686,67
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.265.354.124,00	671.404.066,03
3	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	5.352.065,55
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	153.600.000,00	0,00
5	Badan Kepegawaian Daerah	27.100.000,00	4.010.619,43
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	627.880.000,00	0,00
7	Biro Umum	823.428.476,00	0,00
	Jumlah	4.897.362.600,00	1.486.867.437,68

7.5.5.7. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	1.493.292.355,77	(1.306.867.789,53)

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 110. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	6.580.054.955,77	179.999.648,15
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	189.400.000,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	4.897.362.600,00	1.486.867.437,68
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	1.493.292.355,77	(1.306.867.789,53)

7.5.5.8. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	(589.477.010.805,65)	42.298.273.851,83

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp(589.477.010.805,65)

7.5.5.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk tahun 2020 terdiri dari :

7.5.5.9.1. Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa-LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Realisasi Pendapatan Luar Biasa - LO untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.9.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa-LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	127.051.341.320,00	3.590.750.350,00

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban Luar Biasa pada tahun 2020 adalah sebesar Rp127.051.341.320,00.

7.5.5.10. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	(127.051.341.320,00)	(3.590.750.350,00)

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar (Rp127.051.341.320,00) dan (Rp3.590.750.350,00).

7.5.5.11. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	(716.528.352.125,65)	38.707.523.501,83

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp(716.528.352.125,65) dan Rp38.707.523.501,83.

7.5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2020.

7.5.6.1. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	843.962.605.435,21	1.218.741.441.112,42

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan

data Arus Kas per 31 Desember 2020, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp4.766.685.521.349,24 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp3.922.722.915.914,03 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp843.962.605.435,21. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

URAIAN	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	1.243.223.219.389,33	1.438.977.522.676,40
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	14.374.692.453,00	41.568.852.809,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	79.366.317.748,00	78.920.997.801,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	232.844.347.185,94	215.878.397.003,36
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	143.899.478.029,00	121.270.799.919,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	441.819.113.594,00	486.695.632.798,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.439.305.729.000,00	1.603.623.745.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.078.425.745.186,00	961.814.106.768,95
Penerimaan Dana Penyesuaian	63.222.385.000,00	13.636.005.000,00
Bantuan Keuangan – LRA	3.675.000.000,00	4.165.000.000,00
Pendapatan Hibah – LRA	5.608.344.996,00	7.911.643.179,13
Pendapatan Lainnya - LRA	20.921.148.767,97	14.846.569.609,96
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>4.766.684.821.349,24</i>	<i>4.989.309.272.564,80</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.519.642.134.846,00	1.441.007.470.001,46
Belanja Barang dan Jasa	604.276.917.767,53	808.068.776.442,98
Belanja Subsidi	0	1.122.859.000,00
Belanja Hibah	1.028.723.379.193,25	746.052.446.211,96
Belanja Bantuan Sosial	19.463.170.207,00	18.745.781.594,00
Belanja Tak Terduga	186.398.477.856,00	4.382.839.850,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	555.738.836.044,25	714.590.110.368,98
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	900.000.000,00	25.900.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	1.377.047.983,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	7.580.000.000,00	9.320.500.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>3.922.722.915.914,03</i>	<i>3.770.567.831.452,38</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	843.962.605.435,21	1.218.741.441.112,42

7.5.6.2. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	(1.107.972.887.743,53)	(1.297.688.609.885,57)

Arus kas dari aktivitas investasi menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2020 menunjukkan arus kas neto sebesar Rp(1.107.972.887.743,53) Secara rinci nilai rupiah arus kas dari aktivitas investasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

URAIAN	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	3.240.000,00
Penjualan Gedung dan Bangunan	328.993.400,00	882.942.450,00
Jumlah Arus Kas Masuk	328.993.400,00	886.182.450,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Perolehan Tanah	50.638.019,00	4.149.872.800,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	226.420.242.082,00	193.455.529.421,60
Perolehan Gedung dan Bangunan	131.198.367.274,03	219.961.247.717,44
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	711.922.419.210,51	841.913.017.817,98

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

URAIAN	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	38.522.674.557,99	33.901.359.578,55
Perolehan Aset Lainnya	187.540.000,00	193.765.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TR	0,00	5.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.108.301.881.143,53	1.298.574.792.335,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.107.972.887.743,53)	(1.297.688.609.885,57)

7.5.6.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	(114.525.434,00)	(8.319.543.625,04)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Untuk tahun 2020, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp(114.525.434,00) dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	216.684.983.500,00	267.356.780.178,71
Kas BLUD yang masuk ke Kasda	105.553.648,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	216.790.537.148,00	267.356.780.178,71
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	216.793.121.447,00	267.247.796.069,31
Koreksi SILPA	111.941.135,00	8.428.527.734,44
Jumlah Arus Kas Keluar	216.905.062.582,00	275.676.323.803,75
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(114.525.434,00)	(8.319.543.625,04)

7.5.6.4. Kenaikan (Penurunan) Kas

Kenaikan (Penurunan) Kas	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	(264.124.807.742,32)	(87.266.712.398,19)

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat kenaikan kas bersih sebesar Rp(264.124.807.742,32) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang tahun 2020 dan tahun 2019 sebagai berikut.

Arus Kas	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	843.962.605.435,21	1.218.741.411.112,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.107.972.887.743,53)	(1.297.688.609.885,57)
Aktivitas Transitoris	(114.525.434,00)	(8.319.543.625,04)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(264.124.807.742,32)	(87.266.712.398,19)

7.5.6.5. Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	605.871.900.515,58	684.787.393.507,72

Saldo awal Kas Tahun Anggaran 2020 Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya Saldo awal kas di Kas Daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp605.871.900.515,58 dan koreksi kas yang dibatasi penggunaannya yang sebelumnya belum masuk kedalam saldo kas di LAK sebesar Rp5.188.883.779,86 dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	(264.124.807.742,32)	(87.266.712.398,19)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah	605.871.900.515,58	684.787.393.507,72

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

URAIAN	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	(264.124.807.742,32)	(87.266.712.398,19)
Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.188.883.779,86	0,00
Koreksi Saldo Awal bareskrim	0,00	15.972.083.587,70
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	(7.620.864.181,65)
Saldo Akhir Kas	346.935.976.553,12	605.871.900.515,58

7.5.6.6. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	346.935.976.553,12	605.871.900.515,58

Saldo Akhir Kas Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp346.935.976.553,12 diantaranya saldo akhir kas di Kas daerah sebesar Rp276.735.299.340,20, dan saldo akhir di BLUD sebesar Rp60.362.374.642,53, Kas di Bendahara BOS sebesar Rp3.844.736.884,53, Kas yang dibatasi Penggunaannya sebesar Rp5.188.883.779,86, dan Kas Lainnya sebesar Rp804.681.906,00. Saldo akhir kas 2020 sebagai berikut.

URAIAN	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Saldo Akhir Kas terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	276.735.299.340,20	538.378.995.565,51
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	590.256.332,00
Kas di BLUD	60.362.374.642,53	33.930.446.733,32
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	3.844.736.884,53	32.863.217.775,75
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.188.883.779,86	0,00
Kas Lainnya	804.681.906,00	108.984.109,00
Saldo Akhir Kas	346.935.976.553,12	605.871.900.515,58

7.5.7. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp10.715.920.803.773,84.

EKUITAS AWAL	11.413.340.755.425,99
SURPLUS/DEFISIT-LO	(716.528.352.125,65)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	19.108.400.473,50
EKUITAS AKHIR	10.715.920.803.773,84

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

7.5.7.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	11.413.340.755.425,99	10.889.810.823.960,17

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2020 adalah Rp11.413.340.755.425,99.

7.5.7.2. Surplus/Defisit-LO

Ekuitas Awal	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	(716.528.352.125,65)	38.707.523.501,83

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp(716.528.352.125,65).

7.5.7.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	19.108.400.473,50	484.822.407.963,99

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.108.400.473,50 Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan nilai Ekuitas. Koreksi Ekuitas Lainnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Koreksi Nilai Piutang Lainnya	0,00	(365.363.520,00)
2	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	0,00	3.924.642.904,03
3	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	0,00	(21.733.533,00)
4	Koreksi Nilai Persediaan	123.567.917,96	941.860,44
5	Koreksi Pembayaran Utang Salur Dana Bos SMA dan SMK Negeri Tahun 2018	0,00	15.343.999,95
6	Koreksi Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Kepada BUMD)	0,00	6.363.597.353,88
7	Koreksi Mutasi Aset Tetap-Tanah	0,00	460.570.397,54
8	Koreksi Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	0,00	1.259.847.899,85
9	Koreksi Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	0,00	675.322.310,95
10	Koreksi Mutasi Aset Tetap -Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	29.171.623.394,10
11	Koreksi Mutasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya	0,00	2.089.892.700,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
12	Koreksi Mutasi Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(2.733.545.372,60)
13	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	81.543.455.930,32
14	Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud	0,00	16.492.345.250,00
15	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	73.178.671,41	(634.895.895,14)
16	Koreksi Mutasi Aset Lainnya-Aset Lain-lain	0,00	(1.180.189.210,33)
17	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	20.714.414,00
18	Koreksi Utang Beban Pegawai	0,00	16.655.311,00
19	Koreksi Utang Beban Barang dan Jasa	0,00	21.785.913,00
20	Koreksi Utang Pengadaan Aset Tetap	9.045.372,60	0,00
21	Koreksi Pendapatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah	0,00	347.691.960.000,00
22	Koreksi Beban Pegawai	0,00	(258.951.599,00)
23	Koreksi Beban Barang dan Jasa	0,00	15.025.013,00
24	Koreksi Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	(439.831,00)
25	Koreksi Beban Penyisihan Piutang Pajak	0,00	255.034.000,00
26	Koreksi Kas di Bendahara BOS (31 Desember 2020 Setelah Tutup Buku)	0,00	415.546,00
27	Koreksi Kas Lainnya (Jasa Giro Tahun 2018)	0,00	(1.647.273,00)
28	Koreksi Kas di Bendahara BOS	409.865,00	0,00
29	Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya	4.054.797.440,93	0,00
30	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	4.125.599.871,35	0,00
31	Koreksi Saldo Awal Ekstra ke Intra	956.441.197,00	0,00
32	Koreksi Utang Beban Pegawai	92.262.000,00	0,00
33	Mapping 108	1.204.839.476,39	0,00
34	Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	(9.402.819,00)	0,00
35	Koreksi Saldo Awal Tagihan TGR	(80.000.000,00)	0,00
36	Koreksi Saldo Awal Piutang	(32.709.044,00)	0,00
37	Koreksi Saldo Awal Akum. Penyusutan	8.702.721.523,86	0,00
38	Koreksi Saldo Awal Kas di BLUD	(112.371.000,00)	0,00
39	Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	20.000,00	0,00
Jumlah		19.108.400.473,50	484.822.407.963,99

7.5.7.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	10.715.920.803.773,84	11.413.340.755.425,99

Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.715.920.803.773,80 Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

7.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan

Sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai dampak dari terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerahnya di tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka terdapat beberapa perubahan nama dan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 111 Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Perangkat Daerah Tahun 2018 (Perda Nomor 1 Tahun 2018)	TIPE
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	Dinas Pendidikan	A
2	Dinas Kesehatan	A
3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)	
4	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)	
5	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	Satuan Polisi Pamong Praja	A
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	
11	Dinas Sosial	A
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
3	Dinas Ketahanan Pangan	B
4	Dinas Lingkungan Hidup	A
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	C
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A
7	Dinas Perhubungan	B
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	A
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	A
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	A
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	A
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	A
	Urusan Pilihan	
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	A
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	A
3	Dinas Perkebunan	A
4	Dinas Kehutanan	A
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	A
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	A
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	A
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	B
3	PPKD	
4	Badan Pendapatan Daerah	C
5	Badan Kepegawaian Daerah	A
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A
7	Sekretariat Daerah	A
a.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
b.	Biro Kesejahteraan Rakyat	
c.	Biro Hukum	
d.	Biro Perekonomian	
e.	Biro Administrasi Pembangunan	
f.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
g.	Biro Organisasi	
h.	Biro Umum	

No	Perangkat Daerah Tahun 2018 (Perda Nomor 1 Tahun 2018)	TIPE
i.	Biro Administrasi Pimpinan	
9	Sekretariat DPRD	C
10	Badan Penghubung Prov. Kalteng di Jakarta	
11	DPRD	
12	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
13	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	B

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah maupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- f. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, agar tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera terwujud, dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berlandaskan pada kearifan lokal;
- b. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah;
- c. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; serta
- d. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

7.7. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa penyesuaian (*adjusting events*) dan peristiwa non-penyesuaian (*non-adjusting events*). Peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan (*adjusting events*) merupakan peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian pada tanggal pelaporan. Sedangkan peristiwa nonpenyesuaian setelah periode pelaporan mengindikasikan kondisi yang timbul setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendapatkan laporan dari negara China bahwa telah terjadi beberapa kasus penyakit pernapasan di Kota Wuhan dari virus yang belum diketahui. WHO baru mengumumkan

wabah ini menjadi darurat global (*global emergency*) pada tanggal 30 Januari 2020, sampai dengan tanggal 29 April 2021 kasus di dunia tembus pada 150 juta kasus, ditambah varian baru muncul di Negara India dengan nama B.1.617 dimana varian ini dijuluki sebagai “mutan ganda” karena adanya dua mutasi utama selama periode lonjakan virus.

Kasus pertama pasien positif Covid-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2021 lonjakan kasus di Indonesia sebanyak 1,66 juta kasus. Berdasarkan Data Media Center Satuan Tugas Covid-19 Kalimantan Tengah kasus positif yang terkonfirmasi sampai dengan tanggal 30 April 2021 sebanyak 20.029 ribu kasus.

Memperhatikan fakta-fakta berdasarkan lini masa (*timeline*) yang telah terjadi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang bahwa penyebaran Covid-19 merupakan peristiwa penyesuaian yang memengaruhi penyajian jumlah yang diakui di laporan keuangan 2020. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan bahwa pengukuran aset dan liabilitas mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal pelaporan keuangan. Berdasarkan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah dengan total penyerapan anggaran sebesar 79,78%. Anggaran realisasi per 31 Desember 2020 untuk penanganan Covid-19 berasal dari dana sisi DBH-DR dan DID sebesar 69,91% dan dana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 93,81%. Program kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 tersebar pada beberapa SKPD antara lain :

- A. Anggaran yang bersumber dari DBH-DR:
 - 1. Dinas Kesehatan;
 - 2. RSUD dr. Doris Sylvanus.
- B. Anggaran yang bersumber dari DID:
 - 1. Dinas Kesehatan;
 - 2. BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus;
 - 3. RSJ Kalawa Atei;
 - 4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.
- C. Anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT):
 - 1. Dinas Kesehatan;
 - 2. RSUD dr. Doris Sylvanus.
 - 3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
 - 4. Biro Protokol dan Komunikasi Publik;
 - 5. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - 6. Dinas Perhubungan.

Dampak non penyesuaian pada laporan keuangan tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Pendapatan Tahun 2020
Dampak pada pendapatan Tahun 2020 adalah adanya penambahan pada Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus, dan terdapat pengurangan pada dana Bagi Hasil Pajak dan pendapatan lainnya.
- b. Penyesuaian Belanja Tahun 2020
Dampak pada belanja Tahun 2020 adalah adanya penambahan pada belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, sedangkan pada belanja langsung bertambah pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Terdapat pengurangan pada belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Sedangkan pada belanja langsung berkurang pada belanja modal.

7.8. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

REKAPITULASI SALDO AKHIR TANAH

NO	SKPD	Saldo Awal (Audited) 1 Jan 2020	Total Mutasi Tambah	Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020
1	2	5	6	7	8
1	Sekretariat DPRD	9.916.000.000,00	346.000.000,00	360.000.000,00	9.902.000.000,00
2	Sekretariat Daerah	42.915.500.000,00	360.000.000,00	346.000.000,00	42.929.500.000,00
3	PU	1.454.154.884.123,00	-	-	1.454.154.884.123,00
4	Dinas Perumahan	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	4.549.657.200,00	-	-	4.549.657.200,00
6	Dinas Kesehatan	5.218.977.628,00	-	121.900.000,00	5.097.077.628,00
7	RSUD Doris APBD	12.340.000.000,00	-	-	12.340.000.000,00
	RSUD Doris BLUD	-	-	-	-
8	Rumah Sakit Jiwa	163.070.000,00	-	-	163.070.000,00
9	Dinas Pendidikan	112.541.498.957,55	255.956.000,00	-	112.797.454.957,55
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.997.500.000,00	-	-	3.997.500.000,00
11	Dinas Sosial	5.120.399.993,00	-	-	5.120.399.993,00
12	Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	2.730.000.000,00	-	-	2.730.000.000,00
14	Dinas Koperasi	2.765.620.002,00	-	128.750.000,00	2.636.870.002,00
15	Dinas Tenaga Kerja	14.747.676.000,00	-	627.880.000,00	14.119.796.000,00
16	Pemberdayaan perempuan anak dan KB	1.404.000.000,00	-	-	1.404.000.000,00
17	Dukcapil	82.000.000,00	39.781.819,00	39.781.819,00	82.000.000,00
18	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	16.292.778.084,00	62.686.200,00	10.856.200,00	16.344.608.084,00
19	Dinas Perkebunan	12.176.336.000,00	-	-	12.176.336.000,00
20	Dinas Kehutanan	21.665.102.500,00	483.324.700,00	187.500.000,00	21.960.927.200,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.502.000.040,00	-	-	18.502.000.040,00
22	Dinas Ketahanan pangan	-	-	-	-
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.842.100.000,00	-	153.600.000,00	1.688.500.000,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.506.000.000,00	-	-	3.506.000.000,00
25	Dinas Penanaman Modal TSP	788.000.000,00	-	-	788.000.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	2.826.340.500,00	-	-	2.826.340.500,00
27	Inspektorat	-	1.313.750.000,00	-	1.313.750.000,00
28	Bappedalitbang	6.412.500.000,00	-	-	6.412.500.000,00
29	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.887.500.000,00	-	50.000.000,00	4.837.500.000,00
31	Kesbangpol	2.932.800.000,00	-	-	2.932.800.000,00
32	Satuan Polisi pamong Praja	685.000.000,00	-	-	685.000.000,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
34	Badan Pengembangan sumber daya manusia	4.880.200.000,00	-	1.185.000.000,00	3.695.200.000,00
35	Badan Penghubung	4.290.000.000,00	-	-	4.290.000.000,00
36	Dinas Perpustakaan	1.340.500.000,00	-	-	1.340.500.000,00
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	168.672.937.862,48	187.500.000,00	1.776.800.000,00	167.083.637.862,48
total		1.944.646.878.890,03	3.048.998.719,00	4.988.068.019,00	1.942.707.809.590,03

-

REKAPITULASI SALDO AKHIR PERALATAN DAN MESIN

NO	SKPD	Saldo Awal (Audited) 1 Jan 2020	Total Mutasi Tambah	Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020
1	2	5	6	7	8
1	Sekretariat DPRD	33.302.476.299,32	11.257.406.911,50	9.280.726.628,35	35.279.156.582,47
2	Sekretariat Daerah	119.728.215.697,26	40.498.154.442,41	36.376.516.056,79	123.849.854.082,88
3	PU	54.557.245.236,17	6.865.832.297,97	6.580.167.523,58	54.842.910.010,56
4	Dinas Perumahan	7.215.686.900,00	2.067.840.025,61	1.121.489.200,00	8.162.037.725,61
5	Dinas Perhubungan	7.469.288.885,65	22.904.082.242,19	1.096.600.500,00	29.276.770.627,84
6	Dinas Kesehatan	39.037.318.523,00	13.129.567.332,00	3.803.739.322,00	48.363.146.533,00
7	RSUD Doris APBD	207.259.044.623,96	24.504.806.374,60	7.173.995.164,89	224.589.855.833,67
	RSUD Doris BLUD	15.117.946.978,46	10.059.998.092,00	520.711.850,00	24.657.233.220,46
8	Rumah Sakit Jiwa	11.191.606.047,50	2.089.283.743,00	1.317.173.722,00	11.963.716.068,50
9	Dinas Pendidikan	247.340.364.703,17	240.412.953.580,67	108.402.282.482,50	379.351.035.801,34
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.374.941.831,37	1.716.607.150,54	922.910.150,54	6.168.638.831,37
11	Dinas Sosial	7.850.183.238,02	1.937.160.596,00	1.238.819.596,00	8.548.524.238,02
12	Badan Penanggulangan Bencana	39.722.365.962,00	5.865.021.365,00	2.453.935.365,00	43.133.451.962,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	4.205.737.184,82	1.099.016.299,84	1.099.016.299,84	4.205.737.184,82
14	Dinas Koperasi	5.360.424.946,00	1.196.793.662,00	1.139.384.362,00	5.417.834.246,00
15	Dinas Tenaga Kerja	5.364.053.135,00	1.277.432.700,00	1.277.432.700,00	5.364.053.135,00
16	Pemberdayaan perempuan anak dan KB	2.500.907.013,00	480.594.677,00	500.763.827,00	2.480.737.863,00
17	Dukcapil	2.361.374.265,24	709.522.500,00	690.522.500,00	2.380.374.265,24
18	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	41.014.906.324,00	4.191.824.915,00	3.934.620.915,00	41.272.110.324,00
19	Dinas Perkebunan	12.920.265.492,11	1.477.601.840,00	1.446.101.840,00	12.951.765.492,11
20	Dinas Kehutanan	81.071.063.437,08	33.168.801.796,93	4.354.353.881,63	109.885.511.352,38
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.523.139.255,00	1.111.709.790,00	812.225.290,00	21.822.623.755,00
22	Dinas Ketahanan pangan	4.707.745.101,00	1.238.068.017,00	1.231.168.017,00	4.714.645.101,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17.091.321.353,58	1.396.647.422,00	1.396.647.422,00	17.091.321.353,58
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.682.887.368,99	2.329.115.276,00	2.267.212.776,00	11.744.789.868,99
25	Dinas Penanaman Modal TSP	7.809.338.589,15	1.981.710.425,00	1.888.756.425,00	7.902.292.589,15
26	Badan Pendapatan Daerah	27.410.434.875,49	8.597.781.161,04	7.358.049.254,71	28.650.166.781,82
27	Inspektorat	5.832.385.005,50	1.846.211.118,66	920.505.202,00	6.758.090.922,16
28	Bappedalitbang	15.528.103.266,00	5.030.480.812,00	4.844.218.812,00	15.714.365.266,00
29	Dinas Lingkungan Hidup	6.851.067.494,13	1.676.530.780,52	1.631.530.780,52	6.896.067.494,13
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.136.573.034,84	1.080.805.545,53	930.985.545,53	6.286.393.034,84
31	Kesbangpol	2.790.047.083,00	773.411.250,00	765.276.250,00	2.798.182.083,00
32	Satuan Polisi pamong Praja	4.436.517.206,00	1.187.093.688,00	1.187.093.688,00	4.436.517.206,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	7.564.423.673,68	2.732.137.274,33	3.112.434.044,99	7.184.126.903,02
34	Badan Pengembangan sumber daya manusia	14.834.897.447,00	3.186.553.219,00	2.887.293.169,00	15.134.157.497,00
35	Badan Penghubung	9.560.536.031,12	1.047.128.801,00	381.982.001,00	10.225.682.831,12
36	Dinas Perpustakaan	7.130.166.735,00	1.305.258.426,00	1.303.475.926,00	7.131.949.235,00
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.432.339.824,22	6.553.348.349,00	6.029.458.349,00	21.956.229.824,22
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	40.350.849.077,87	6.936.764.967,85	4.404.813.123,21	42.882.800.922,51
total		1.182.638.189.144,70	476.921.058.867,19	238.084.389.963,08	1.421.474.858.048,81

REKAPITULASI SALDO AKHIR GEDUNG DAN BANGUNAN

N O	SKPD	Saldo Awal (Audited) 1 Jan 2020	Total Mutasi Tambah	Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020
1	2	5	6	7	8
1	Sekretariat DPRD	30.992.911.191,98	2.201.472.160,00	3.309.758.100,00	29.884.625.251,98
2	Sekretariat Daerah	135.709.249.225,67	6.958.902.051,00	6.225.037.431,00	136.443.113.845,67
3	PU	138.374.296.416,70	8.980.094.870,22	8.105.506.370,22	139.248.884.916,70
4	Dinas Perumahan	-	-	-	-
5	Dinas Perhubungan	79.151.817.388,57	1.871.531.992,04	22.111.939.942,19	58.911.409.438,42
6	Dinas Kesehatan	47.238.865.213,01	7.039.779.100,00	-	54.278.644.313,01
7	RSUD Doris APBD	154.486.541.106,55	660.580.500,00	660.580.500,00	154.486.541.106,55
	RSUD Doris BLUD	531.895.000,00	-	-	531.895.000,00
8	Rumah Sakit Jiwa	23.471.030.431,57	1.570.273.300,00	0,06	25.041.303.731,51
9	Dinas Pendidikan	807.825.740.782,18	139.853.575.672,00	206.105.974,00	947.473.210.480,18
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	90.303.045.401,46	5.231.627.000,00	5.136.940.843,80	90.397.731.557,66
11	Dinas Sosial	44.891.264.858,68	-	-	44.891.264.858,68
12	Badan Penanggulangan Bencana	15.071.617.115,00	-	-	15.071.617.115,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	4.779.691.667,40	-	-	4.779.691.667,40
14	Dinas Koperasi	8.950.082.543,00	-	28.000.000,00	8.922.082.543,00
15	Dinas Tenaga Kerja	7.591.170.083,00	-	268.600.000,00	7.322.570.083,00
16	Pemberdayaan perempuan anak dan KB	-	-	-	-
17	Dukcapil	1.213.169.669,07	-	-	1.213.169.669,07
18	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	34.422.640.188,00	34.900.000,00	34.900.000,00	34.422.640.188,00
19	Dinas Perkebunan	20.062.326.086,00	-	31.500.000,00	20.030.826.086,00
20	Dinas Kehutanan	52.763.971.955,25	9.045.372,60	-	52.773.017.327,85
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	71.485.577.744,16	1.224.727.000,00	928.485.000,00	71.781.819.744,16
22	Dinas Ketahanan pangan	6.923.996.726,01	-	8.022.290,30	6.915.974.435,71
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	22.439.185.156,00	-	98.000.000,00	22.341.185.156,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.056.027.997,55	-	-	9.056.027.997,55
25	Dinas Penanaman Modal TSP	9.813.246.252,79	-	-	9.813.246.252,79
26	Badan Pendapatan Daerah	76.227.991.004,64	428.743.878,00	174.777.075,00	76.481.957.807,64
27	Inspektorat	4.595.837.850,00	1.197.061.500,00	-	5.792.899.350,00
28	Bappedalitbang	21.578.154.643,00	-	10.000.000,00	21.568.154.643,00
29	Dinas Lingkungan Hidup	4.962.994.502,02	-	45.000.000,00	4.917.994.502,02
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	34.250.995.146,55	-	-	34.250.995.146,55
31	Kesbangpol	4.353.438.309,50	-	-	4.353.438.309,50
32	Satuan Polisi pamong Praja	1.868.319.672,00	-	-	1.868.319.672,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	8.049.941.002,00	36.444.200,00	36.444.200,00	8.049.941.002,00
34	Badan Pengembangan sumber daya manusia	37.692.529.953,28	-	-	37.692.529.953,28
35	Badan Penghubung	15.448.067.408,00	-	-	15.448.067.408,00
36	Dinas Perpustakaan	12.182.037.496,00	79.000.000,00	79.000.000,00	12.182.037.496,00
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.835.848.178,55	349.099.673,15	349.099.673,15	9.835.848.178,55
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	118.851.238.456,74	2.231.211.680,39	470.100.000,00	120.612.350.137,13
total		2.167.446.753.821,88	179.958.069.949,40	48.317.797.399,72	2.299.087.026.371,56

REKAPITULASI SALDO AKHIR JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN

N O	SKPD	Saldo Awal (Audited) 1 Jan 2020	Total Mutasi Tambah	Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020
1	2	5	6	7	8
1	Sekretariat DPRD	1.515.532.000,00	-	-	1.515.532.000,00
2	Sekretariat Daerah	12.467.372.008,63	334.726.222,73	334.726.222,73	12.467.372.008,63
3	PU	5.846.353.205.598,74	1.395.104.388.436,16	171.490.730.082,09	7.069.966.863.952,81
4	Dinas Perumahan	1.759.587.166,00	-	-	1.759.587.166,00
5	Dinas Perhubungan	37.934.665.325,74	-	-	37.934.665.325,74
6	Dinas Kesehatan	4.814.380.750,00	-	-	4.814.380.750,00
7	RSUD Doris APBD	13.162.136.052,00	-	-	13.162.136.052,00
	RSUD Doris BLUD	-	-	-	-
8	Rumah Sakit Jiwa	1.721.724.500,00	-	-	1.721.724.500,00
9	Dinas Pendidikan	9.263.250.704,54	266.522.207,00	-	9.529.772.911,54
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.688.768.457,73	-	-	11.688.768.457,73
11	Dinas Sosial	4.239.576.319,91	-	-	4.239.576.319,91
12	Badan Penanggulangan Bencana	5.940.174.509,00	-	-	5.940.174.509,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	233.567.500,00	-	-	233.567.500,00
14	Dinas Koperasi	1.181.978.000,00	-	-	1.181.978.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja	174.895.000,00	-	-	174.895.000,00
16	Pemberdayaan perempuan anak dan KB	-	-	-	-
17	Dukcapil	299.500.000,00	-	-	299.500.000,00
18	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	7.783.201.078,00	-	-	7.783.201.078,00
19	Dinas Perkebunan	1.212.842.854,00	-	-	1.212.842.854,00
20	Dinas Kehutanan	3.905.616.930,00	36.078.000,00	-	3.941.694.930,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	31.287.320.573,00	1.136.902.500,00	-	32.424.223.073,00
22	Dinas Ketahanan pangan	844.588.500,00	-	-	844.588.500,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.965.242.471,96	-	-	2.965.242.471,96
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	40.284.432.213,00	-	-	40.284.432.213,00
25	Dinas Penanaman Modal TSP	199.280.000,00	-	-	199.280.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	1.144.772.106,00	174.910.300,00	-	1.319.682.406,00
27	Inspektorat	365.350.000,00	74.600.000,00	-	439.950.000,00
28	Bappedalitbang	185.468.400,00	-	-	185.468.400,00
29	Dinas Lingkungan Hidup	20.156.200,00	-	-	20.156.200,00
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	590.425.613,47	-	-	590.425.613,47
31	Kesbangpol	367.198.160,00	-	-	367.198.160,00
32	Satuan Polisi pamong Praja	335.100.000,00	-	-	335.100.000,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	1.182.421.660,00	-	-	1.182.421.660,00
34	Badan Pengembangan sumber daya manusia	2.070.090.465,00	-	-	2.070.090.465,00
35	Badan Penghubung	1.215.199.875,00	-	-	1.215.199.875,00
36	Dinas Perpustakaan	1.585.133.330,00	-	-	1.585.133.330,00
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.169.154.200,00	-	-	3.169.154.200,00
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	135.491.300,00	-	-	135.491.300,00
total		6.053.598.799.821,72	1.397.128.127.665,89	171.825.456.304,82	7.278.901.471.182,79

REKAPITULASI SALDO AKHIR ASET TETAP LAINNYA

N O	SKPD	Saldo Awal (Audited) 1 Jan 2020	Total Mutasi Tambah	Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020
1	2	5	6	7	8
1	Sekretariat DPRD	22.252.500,00	-	10.438.500,00	11.814.000,00
2	Sekretariat Daerah	1.748.872.900,00	99.088.000,00	99.088.000,00	1.748.872.900,00
3	PU	19.871.883.150,00	9.529.122.901,00	2.673.377.000,00	26.727.629.051,00
4	Dinas Perumahan	13.063.463.520,00	-	-	13.063.463.520,00
5	Dinas Perhubungan	529.268.400,00	-	-	529.268.400,00
6	Dinas Kesehatan	119.838.690,00	-	-	119.838.690,00
7	RSUD Doris APBD	277.546.850,00	-	-	277.546.850,00
	RSUD Doris BLUD	2.708.140.000,00	-	-	2.708.140.000,00
8	Rumah Sakit Jiwa	1.052.100.774,39	-	-	1.052.100.774,39
9	Dinas Pendidikan	73.525.574.926,92	35.719.778.030,14	22.061.254.290,00	87.184.098.667,06
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.791.946.563,66	-	777.297.000,00	4.014.649.563,66
11	Dinas Sosial	35.569.500,00	-	-	35.569.500,00
12	Badan Penanggulangan Bencana	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	147.475.000,00	-	-	147.475.000,00
14	Dinas Koperasi	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-
15	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-
16	Pemberdayaan perempuan anak dan KB	-	-	-	-
17	Dukcapil	373.310.420,00	39.781.819,00	19.000.000,00	394.092.239,00
18	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	521.666.985,00	3.554.281.317,99	115.510.000,00	3.960.438.302,99
19	Dinas Perkebunan	189.441.000,00	-	-	189.441.000,00
20	Dinas Kehutanan	74.328.500,00	-	-	74.328.500,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.663.844.348,00	1.860.000,00	11.860.000,00	2.653.844.348,00
22	Dinas Ketahanan pangan	375.378.750,00	-	-	375.378.750,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	98.631.104,67	-	-	98.631.104,67
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19.342.900,00	-	-	19.342.900,00
25	Dinas Penanaman Modal TSP	425.125.000,00	-	8.300.000,00	416.825.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	35.194.500,00	-	-	35.194.500,00
27	Inspektorat	1.316.694.700,00	784.533.500,00	959.333.500,00	1.141.894.700,00
28	Bappedalitbang	339.712.150,00	-	-	339.712.150,00
29	Dinas Lingkungan Hidup	214.807.000,00	-	-	214.807.000,00
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.643.316.326,00	-	149.820.000,00	4.493.496.326,00
31	Kesbangpol	61.839.200,00	-	-	61.839.200,00
32	Satuan Polisi pamong Praja	24.750.000,00	-	-	24.750.000,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	295.174.880,00	-	2.168.880,00	293.006.000,00
34	Badan Pengembangan sumber daya manusia	732.538.943,50	-	63.735.000,00	668.803.943,50
35	Badan Penghubung	17.420.000,00	-	-	17.420.000,00
36	Dinas Perpustakaan	13.129.642.215,45	-	-	13.129.642.215,45
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.260.211.950,00	198.120.000,00	-	1.458.331.950,00
total		144.706.303.647,59	49.949.365.568,13	26.964.382.170,00	167.691.287.045,72

PENGEMBALIAN DANA BPO - TKI, TAHUN 2006
PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	NAMA	BPO-TKI																	Ket	Nama Anggt yg msh aktif Periode 2019- 2024
		Jumlah yg harus dikembalikan	Jumlah yg dikembalikan TA. 2007 s/d Januari 2008	Jumlah yg dikembalikan Februari s/d Desember 2008	Jumlah yg dikembalikan Januari s/d Desember 2009	Yang disetor Januari s/d Desember 2010	Yang disetor Januari s/d Desember 2011	Yang disetor Januari s/d Desember 2012	Yang disetor Januari s/d Desember 2013	Yang disetor Januari s/d Desember 2014	Yang disetor Jan s/d Des 2015	Yang disetor Jan s/d Des 2016	Yang disetor Jan s/d Des 2017	Yang disetor Jan s/d Des 2018	Yang disetor Jan s/d Des 2019	Yang disetor Jan s/d Des 2020	Total yg sdh disetor s/d Juni 2021	Sisa yg msh harus disetor		
1	R. ATU NARANG, SE	275.400.000	40.000.000	55.000.000	180.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.400.000	-	Lunas	
2	SAPTANOESA WENTHE (ALM)	189.720.000	40.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000.000	124.720.000	SA	
3	H.BAMBANG SURYADI	189.720.000	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	149.720.000	SA	
4	KATHARINA DN SINGARACA	91.800.000	28.248.000	38.841.000	21.186.000	-	3.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
5	H. SUHAIMI KURNIAWAN	91.800.000	14.124.000	24.717.000	7.062.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.903.000	45.897.000	SA	
6	H. ABDUL KADIR	91.800.000	14.124.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.124.000	77.676.000	SA	
7	Dra. Hj. SITI NAFSIAH RAFFLES	91.800.000	14.124.000	7.500.000	10.000.000	-	-	60.176.000	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	Aktif
8	Drs. ANDI SURYA	91.800.000	14.124.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.124.000	77.676.000	SA	
9	DANTHE THEODORE	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	TPS	
10	PAUDJIAH, SH	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	TPS	
11	MUMPUNG I. BANGAS,SE,M.Si.	61.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.200.000	TPS	
12	H. KAMBERANI SEMAN, BA	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	TPS	
13	JOHAN LH. BANGKAN, SE	61.200.000	9.416.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.416.000	51.784.000	SA	
14	LAMSYAH A. GANI	30.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.600.000	TPS	
15	Drs. LIBER SIGAI	91.800.000	-	-	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
16	KAMSYIAH A. MAMAT	91.800.000	-	-	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
17	Drs. ARTON S. DOHONG	91.800.000	28.248.000	38.841.000	3.531.000	-	21.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
18	Drs.YOHANES FREDDY ERING	91.800.000	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	41.800.000	SA	Aktif
19	Ir. ARTABAN	91.800.000	-	-	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	Aktif
20	EMANUEL MILO WAWO	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	TPS	
21	AKHMAD SUBANDI	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	TPS	
22	BORAK MILTON	91.800.000	-	-	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
23	Ir.MUHAMAD MAWARDI,MM	91.800.000	28.248.000	63.552.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
24	Drs. ANDRIS P. NANDJAN	91.800.000	28.248.000	38.841.000	24.711.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
25	Drs. MATLIM ALANG	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	TPS	
26	MASHUR BACHSIN	7.650.000	2.360.000	3.245.000	2.045.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.650.000	-	Lunas	
27	H. ANANG ABDULLAH (ALM)	61.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.200.000	TPS	
28	Dra. Hj. NOORHASANAH	91.800.000	28.248.000	28.248.000	24.717.000	-	10.587.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
29	H.M. SAN MARWAN	91.800.000	14.124.000	22.500.000	15.000.000	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.124.000	37.676.000	SA	
30	ABDUL HADI, SE	91.800.000	3.531.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.531.000	88.269.000	SA	
31	Drs. HENDRY S. DJALA	91.800.000	-	-	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
32	R.Y.M SOEBANDI (ALM)	91.800.000	3.531.000	-	88.269.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
33	H. KIMIN ERWAN SUBROTO	91.800.000	3.531.000	-	88.269.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
34	SRIE ALFIATI	91.800.000	28.248.000	31.779.000	-	-	7.056.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
35	SUKRIADI, ST	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	TPS	
36	Ir. ARIEF BUDIATMO	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	TPS	
37	HANG ALI SAPUTRA S.PAHAN	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	TPS	
38	Drs. RINCO NORKIM	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	41.000.000	-	-	-	-	-	-	41.000.000	50.800.000	SA	
39	Drs.WILLYAN L. BAHAN	91.800.000	28.248.000	38.841.000	24.711.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
40	H.TADJUDIN NOOR,SE	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	TPS	
41	H. HAMBERI ELLEP (ALM)	91.800.000	17.655.000	-	74.145.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
42	H. M. ASERA	91.800.000	3.531.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.531.000	88.269.000	SA	
43	SYAHRANI UMBRAN	91.800.000	28.248.000	38.841.000	24.711.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
44	SALUNDIK GOHONG	91.800.000	28.248.000	38.841.000	24.711.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	-	Lunas	
45	BUDI SANTOSO	91.800.000	25.000.000	-	64.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.750.000	2.050.000	SA	
46	H. MUCHRAN MACHRUS	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000	TPS	
47	FLEDERYCK, S.Pi	91.800.000	28.248.000	38.841.000	17.655.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	87.744.000	4.056.000	SA	
48	Pajak yg diterima Bend TA. 2006	786.510.000																		